



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI



HASIL PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (ITKPD) TAHUN 2024

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
KEWILAYAHAN, KEPENDUDUKAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
BSKDN KEMENDAGRI



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2024”. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memublikasikan hasil penilaian ITKPD tahun 2024 yang harapannya dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dibuat berdasarkan disposisi Bapak Menteri Dalam Negeri yang menugaskan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Konsep ITKPD didesain untuk mengukur kualitas sebuah tata kelola pemerintahan daerah yang komprehensif dengan melihat kondisi sistem pendukung pemerintahan, kapasitas pemerintahan, serta capaian tujuan pembangunan pada suatu daerah.

Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34 Provinsi, di mana 4 Provinsi Daerah Otonom Baru belum memiliki data-data yang lengkap. Penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. Meskipun memiliki *lag* waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan tata kelola pemerintahan di daerah.

Penilaian ITKPD dan Penyusunan Buku Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah tahun 2024 dilakukan dengan berkolaborasi multipihak baik dari akademisi, praktisi, Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan buku hasil Penilaian ITKPD 2024 ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat berbagai kekurangan, karena itu diharapkan sumbang saran pemikiran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah, memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Jakarta, Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Cakupan Penilaian	2
1.4 Tahapan dan Jadwal Penilaian ITKPD	2
BAB II KONSEP DAN RANCANG BANGUN ITKPD	3
2.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3
2.2 Kerangka Rancang Bangun.....	4
2.3 Klasifikasi Hasil	12
BAB III GAMBARAN UMUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	13
3.1 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Secara Nasional	13
3.2 Analisis Tematis Perbandingan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah per Kapasitas Fiskal.....	16
3.3 Analisis Tematis Perbandingan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berdasarkan Proporsi Pertambangan dan Penggalian	18
BAB IV HASIL PENILAIAN ITKPD 2024 PER PROVINSI	23
4.1 Aceh	28
4.2 Sumatera Utara	32
4.3 Sumatera Barat.....	36
4.4 Riau	40
4.5 Jambi.....	44
4.6 Sumatera Selatan.....	48
4.7 Bengkulu	52

4.8	Lampung	56
4.9	Kep. Bangka Belitung	60
4.10	Kep. Riau	64
4.11	DKI Jakarta.....	68
4.12	Jawa Barat	72
4.13	Jawa Tengah	76
4.14	DI Yogyakarta.....	80
4.15	Jawa Timur	84
4.16	Banten.....	88
4.17	Bali	92
4.18	Nusa Tenggara Barat	96
4.19	Nusa Tenggara Timur	100
4.20	Kalimantan Barat	104
4.21	Kalimantan Tengah	108
4.22	Kalimantan Selatan	112
4.23	Kalimantan Timur	116
4.24	Kalimantan Utara	120
4.25	Sulawesi Utara	124
4.26	Sulawesi Tengah	128
4.27	Sulawesi Selatan	132
4.28	Sulawesi Tenggara	136
4.29	Gorontalo	140
4.30	Sulawesi Barat	144
4.31	Maluku	148
4.32	Maluku Utara.....	152
4.33	Papua	156
4.34	Papua Barat	160
BAB IV PENUTUP		165
DAFTAR PUSTAKA		167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aspek dan Variabel ITKPD	4
Gambar 2. Subvariabel dan Jumlah Indikator per Subvariabel	5
Gambar 3. Rata-rata nasional Skor ITKPD dan Skor Aspek	13
Gambar 4. Rata-rata nasional skor ITKPD per variabel	13
Gambar 5. Rata-rata nasional skor ITKPD per subvariabel	14
Gambar 6. Peta sebaran skor ITKPD di Provinsi se-Indonesia.....	15
<i>Gambar 7. Boxplot distribusi skor per aspek ITKPD.....</i>	<i>16</i>
Gambar 8. Matrix plot ITKPD berdasarkan KFD	17
Gambar 9. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata ITKPD berdasarkan Kategori KFD	18
Gambar 10. Matrix Plot ITKPD berdasarkan Daerah Tambang – Non Tambang	20
Gambar 11. Grafik Nilai ITKPD 34 Provinsi.....	23
Gambar 12. Grafik Nilai ITKPD per Aspek	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Tahapan dan Jadwal Penilaian ITKPD	2
Tabel 2. Daftar Indeks/Data Sekunder dari Kementerian/Lembaga yang menjadi indikator ITKPD	5
Tabel 3. Susunan dan Perhitungan Rancang Bangun ITKPD	7
Tabel 4. Klasifikasi Skor ITKPD	12
Tabel 5. Kategori Kapasitas Fiskal Provinsi Tahun 2023 berdasarkan PMK No. 84/2003	16
Tabel 6. Tabel Kategori Provinsi berdasarkan Proporsi Sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah melalui perubahan besar dalam konteks demokrasi dan pemerintahan, terutama sejak pelaksanaan desentralisasi yang efektif sejak tahun 2001. Proses ini menjadi awal dari reformasi penting yang mengubah paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Talitha et al., 2020; Usman, 2001). Desentralisasi bertujuan untuk memperbaiki alokasi sumber daya, meningkatkan pelayanan publik, serta membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Holzhacker et al., 2015; Talitha et al., 2020; World Bank, 2003). Ini sejalan dengan tren global di mana desentralisasi dianggap sebagai alat reformasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan (Faguet, 2014; Nasution, 2017; Talitha et al., 2020).

Salah satu indikator yang banyak digunakan di berbagai negara untuk mengukur kinerja pemerintahan adalah indeks komposit. Indeks ini umumnya dibuat dari berbagai dimensi untuk mewakili banyak aspek pemerintahan dalam hal *input*, *process* dan *output*. Indikator ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara berkala. Indeks ini juga harus berkelanjutan agar kinerja pemerintah dapat dinilai dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat apakah bergerak ke arah yang lebih baik (Pusat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) (CGG, 2017). Mengingat kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga mencakup berbagai urusan atau sektor, maka pengukuran kinerja harus dilakukan secara komprehensif.

Dalam upaya untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam konteks tata kelola, banyak indeks serupa telah dikembangkan di Indonesia. Namun, permasalahannya adalah indeks-indeks ini dibuat oleh berbagai Kementerian dan Lembaga secara terpisah tanpa koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan pengukuran kinerja yang parsial, terpisah, dan tumpang tindih. Untuk mengatasi permasalahan ini, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dikembangkan sebagai solusi yang bersifat komprehensif dan inklusif

ITKPD tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan internal Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh institusi lain dalam lingkungan Kementerian/Lembaga untuk mengukur kinerjanya terkait dengan kesuksesan pembangunan daerah. ITKPD didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diharapkan menjadi alat evaluasi yang kuat untuk pemerintah daerah, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian pembangunan nasional.

Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34 Provinsi, dimana 4 Provinsi Daerah Otonom Baru belum memiliki data-data yang lengkap. Penilaian ITKPD 2024 menggambarkan kondisi kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan data-data pengukuran tahun 2023. Meskipun memiliki *lag* waktu, hasil penilaian ITKPD masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk penguatan tata kelola pemerintahan di daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan Penilaian ITKPD yaitu:

1. mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
2. memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; dan
3. memberikan rekomendasi kebijakan strategis tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.3 Cakupan Penilaian

Cakupan penilaian ITKPD 2024 dilakukan pada pemerintahan daerah tingkat provinsi dengan mempertimbangkan kelengkapan data indikator dari setiap provinsi. Berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh, 4 provinsi DOB belum memiliki ketersediaan data yang cukup. Oleh karena itu penilaian dan analisis hanya dilakukan terhadap 34 Provinsi.

1.4 Tahapan dan Jadwal Penilaian ITKPD

Penilaian ITKPD merupakan pengukuran indeks berbasis komposit yang mengoptimalkan penggunaan data sekunder tanpa adanya indikator primer yang memerlukan penginputan secara khusus oleh Pemda. Pelaksanaan penilaian ITKPD tidak melibatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengisian Instrumen ITKPD secara khusus. Pelaksanaan pengukuran ITKPD 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2024 dengan tahapan dan jadwal sebagaimana berikut:

Tabel 1. Tabel Tahapan dan Jadwal Penilaian ITKPD 2024

NO	TAHAPAN	TANGGAL*
1.	Pengumpulan Data Indikator	Agustus s.d Oktober 2024
2.	Pengukuran dan Analisis	Oktober s.d November 2024
3.	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	November 2024
4.	Sosialisasi / Publikasi Hasil	Desember 2024

* tanggal sewaktu-waktu dapat mengalami penyesuaian

2 | Hasil Penilaian ITKPD 2024

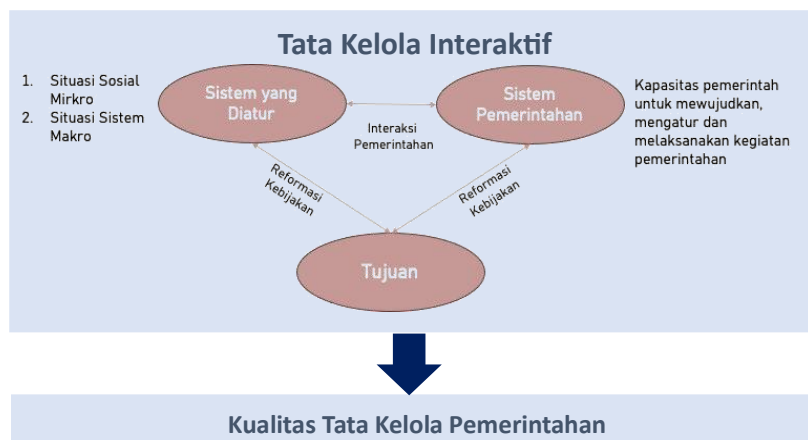
BAB II

KONSEP DAN RANCANG BANGUN ITKPD

2.1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan saat ini dianggap sebagai konsep yang demokratis berbasis kepentingan *stakeholder* dalam *input*, proses, dan *output* yang deliberatif guna mencapai visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui tata kelola pemerintahan akan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dalam implementasi kebijakan publik dan pelayanan publik (Salomon dalam Osborne, 2010). Kooiman (2010) dalam buku *New Public Governance* menuliskan bahwa untuk mengelola interaksi antar aktor dan institusi publik, maka pemerintah harus memiliki kemampuan mengatur dan saling berinteraksi yang dikenal dengan *Interactive Governance* atau tata kelola interaktif.

Pendekatan tata kelola interaktif mengasumsikan bahwa kondisi dari sistem-sistem pemerintahan terus berinteraksi dan beradaptasi sebagai respons terhadap tantangan eksternal dan internal. Sistem-sistem pemerintahan dimaksud yaitu sebuah mekanisme pemerintahan yang terdiri dari *System to be Govern* (Sistem yang diatur), *Governing System* (Sistem Pemerintahan) dan interaksi diantara keduanya sehingga dapat mencapai tujuan (*Goals*) penyelenggaraan pemerintahan (Kooiman dalam Osborne, 2010).



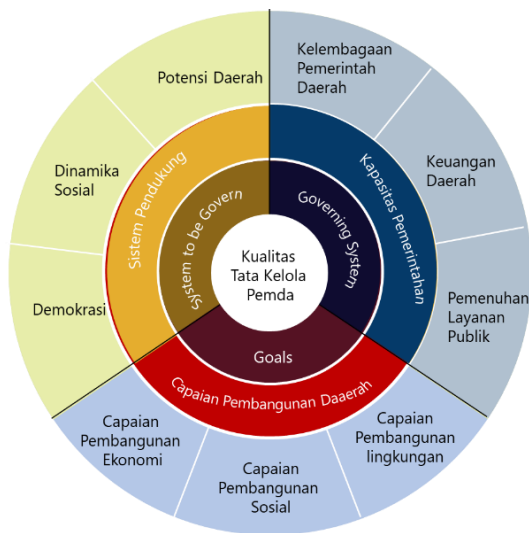
Gambar 1. Konsep Tata Kelola Interaktif

Sistem yang diatur didefinisikan melalui dua hal, yaitu: 1) situasi sosial yang mikro melalui dinamika sosial dan politik di wilayah pemerintahan, serta 2) situasi makro sistem seperti kondisi demografi, ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah untuk mewujudkan,

mengatur, dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, ITKPD akan mengukur suatu kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang digambarkan melalui kualitas sistem pendukung suatu daerah, kapasitas pemerintahan, serta capaian tujuan pembangunan daerah.

2.2 Kerangka Rancang Bangun

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ITKPD didefinisikan sebagai indeks yang secara komprehensif mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan keterkaitan antara sistem pendukung, kapasitas pemerintahan dan capaian pembangunan daerah. Kerangka rancang bangun ITKPD terdiri atas 3 Aspek, 9 Variabel, 28 Subvariabel, dan 64 Indikator. Aspek dan Variabel merupakan turunan atas konsep dari tata kelola interaktif yang dijadikan acuan dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan suatu daerah.



Gambar 1. Aspek dan Variabel ITKPD

Pada ITKPD, Aspek Sistem Pendukung merupakan ukuran kualitas dari faktor-faktor pendukung pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola meliputi kualitas demokrasi, dinamika sosial dan potensi daerah; Aspek Kapasitas Pemerintahan merupakan ukuran kemampuan Pemda dalam mengelola kelembagaan, keuangan daerah, serta pemenuhan layanan publik; sedangkan Aspek Capaian Pembangunan Daerah merupakan ukuran yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Adapun Subvariabel merupakan pengelompokan indikator dalam menggambarkan suatu variabel. Rincian subvariabel dan jumlah indikator dalam rancang bangun ITKPD adalah sebagaimana berikut:

SISTEM PENDUKUNG	KAPASITAS PEMERINTAHAN	CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kualitas Demokrasi - Kondisi Demokrasi (1 Indikator) Dinamika Sosial - Kondisi Keamanan (2) - Kohesivitas Sosial (2) Potensi Daerah - Potensi Sumber Daya Alam (1) - Potensi Pariwisata (1) - Kondisi Demografi (2) - Kondisi Geografis (2)	Kelembagaan Pemerintah Daerah - Kapasitas SDM Pemerintah (2) - Tata Laksana (4) - Akuntabilitas dan Integritas (3) Keuangan Daerah - Kapasitas Fiskal (2) - Alokasi Anggaran (4)	Pemenuhan Layanan Publik - Layanan Kesehatan (2) - Layanan Pendidikan (2) - Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (3) - Layanan Sosial dan Trantibumlinmas (2) - Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah (2) - Layanan Ketenagakerjaan (6) Capaian Pembangunan Ekonomi - Daya Beli (1) - Pertumbuhan Ekonomi (1) - Kestabilan Harga (1) - Pertumbuhan Investasi (2) - Kondisi Ketenagakerjaan (3) Capaian Pembangunan Sosial - Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (5) - Tingkat Pendidikan Masyarakat (2) - Kualitas Kesehatan Masyarakat (2) - Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (3) Capaian Pembangunan Lingkungan - Kualitas Lingkungan Hidup (1)

Gambar 2. Subvariabel dan Jumlah Indikator per Subvariabel

Indikator pada rancang bangun ITKPD bersumber dari data sekunder yang berupa indeks/bagian dari indeks/data satuan yang sudah tersedia di Kementerian/Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan institusi lainnya yang memiliki kesesuaian dengan kerangka ITKPD. Indikator ITKPD berasal dari 46 indeks/data sekunder yang diampu oleh 23 Kementerian/Lembaga dengan nomenklatur yang lama sebelum terbitnya Peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024. Rincian daftar indeks/data sekunder dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Indeks/Data Sekunder dari Kementerian/Lembaga yang menjadi indikator ITKPD

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JML	INDEKS/DATA SATUAN
1	Badan Pusat Statistik	15	Indeks Demokrasi Indonesia; Indeks Modal Sosial; Data Dependensi Rasio; Indeks Kemahalan Konstruksi; Indeks Khusus Penanganan Stunting; Indeks Pembangunan Manusia; Data Laju Pertumbuhan PDRB; Data Inflasi Gabungan Provinsi; Data Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Data Rasio Gini; Data Partisipasi Pendidikan; Indeks Pemberdayaan Gender; Indeks Pembangunan Gender
2	Kepolisian RI	2	Angka Crime Rate; Angka Crime Clock
3	Kementerian Agama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
4	Kementerian Keuangan	1	Indeks Kapasitas Fiskal

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JML	INDEKS/DATA SATUAN
5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Indeks Pembangunan Pemuda
7	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Indeks Risiko Bencana Indonesia
8	Badan Kepegawaian Negara	2	Data ASN per Provinsi; Indeks NSPK Manajemen ASN
9	Ombudsman RI	1	Skor Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3	Skor Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
11	Kementerian Dalam Negeri	5	Data Anggaran APBD; Data Realisasi APBD; Indeks Inovasi Daerah; Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Indeks Ketercapaian SPM
12	Badan Pemeriksa Keuangan	1	Opini BPK-RI Atas LKPD
13	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Survei Penilaian Integritas
14	Perpustakaan Nasional RI	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Data Kemantapan Jalan
16	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	Indeks Persaingan Usaha
17	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
18	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup
19	Kementerian Investasi	2	Data PMDN; Data PMA
20	Kementerian Kesehatan	1	Data Prevalensi Stunting
21	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Indeks Desa Membangun
22	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Indeks Perlindungan Anak
23	Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah	1	Indeks Tata Kelola Pengadaan
TOTAL 46 INDEKS/DATA SEKUNDER DARI 23 KEMENTERIAN/LEMBAGA			

Penggunaan data sekunder dari Kementerian/Lembaga pada indikator ITKPD terbagi menjadi 3 perlakuan yaitu 1) Digunakan nilai indeks secara utuh; 2) Digunakan hanya bagian dari indeks; dan 3) dilakukan pengolahan lanjutan dengan data lainnya. Sehingga susunan aspek, variabel, subvariabel dan indikator ITKPD yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan dan Perhitungan Rancang Bangun ITKPD

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
1	Sistem Pendukung	
1.1	Kualitas Demokrasi	
1.1.1	Kondisi Demokrasi	
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	Skor Indeks Demokrasi Indonesia
1.2	Dinamika Sosial	
1.2.1	Kondisi Keamanan	
1.2.1.1	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	Data Risiko Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	Data Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)
1.2.2	Kohesivitas Sosial	
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama
1.2.2.2	Modal Sosial	Skor Indeks Modal Sosial
1.3	Potensi Daerah	
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam	
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Dana Bagi Hasil SDA}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$
1.3.2	Potensi Pariwisata	
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	Skor Sub Indeks <i>Travel & Tourism Demand Drivers</i> , Indeks Pembangunan Kepariwisataa Nasional
1.3.3	Kondisi Demografi	
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	$\frac{P_{0-14} + P_{65}}{P_{15-64}} \times 100$ <i>P</i>₀₋₁₄ : Penduduk usia 0-14 tahun <i>P</i>₆₅ : Penduduk usia > 65 tahun <i>P</i>₁₅₋₆₄ : Penduduk usia 15-64 tahun

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
		Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	Skor Indeks Pembangunan Pemuda
1.3.4	Kondisi Geografis	
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	Skor Indeks Kemahalan Konstruksi
1.3.4.2	Tingkat Risiko Bencana	Skor Indeks Resiko Bencana Indonesia
2	Kapasitas Pemerintahan	
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah	
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah	
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	$\left \frac{\text{Jumlah ASN Daerah } i}{\text{Jumlah Penduduk Daerah } i} - 1,5\% \right $ Rasio Ideal ASN dgn Penduduk=1,5%
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	Skor Indeks NSPK Manajemen ASN
2.1.2	Tata Laksana	
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Skor Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	Skor Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	Skor Aspek Satuan Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas	
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Opini BPK-RI Atas LKPD
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas KPK
2.2	Keuangan Daerah	
2.2.1	Kapasitas Fiskal	
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	Skor Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	$\frac{PAD}{Pendapatan Daerah}$
2.2.2	Alokasi Anggaran	
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	Skor dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	$\frac{Total\ realisasi\ belanja\ daerah}{Total\ anggaran\ belanja\ daerah} \times 100$
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	$\frac{Total\ anggaran\ belanja\ modal}{Total\ anggaran\ belanja\ daerah} \times 100$
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	$\frac{Total\ anggaran\ urusan\ LH}{Total\ anggaran\ belanja\ daerah} \times 100$
2.3	Pemenuhan Layanan Publik	
2.3.1	Layanan Kesehatan	
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i> terhadap rumah tangga 1000HPK	Skor Indeks Khusus Penanganan Stunting
2.3.2	Layanan Pendidikan	
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	$\frac{Jalan\ katagori\ mantap\ (km)}{Total\ Panjang\ Jln\ Provinsi\ (km)} \times 100$
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas	

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Bidang Minimal Sosial
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	Skor Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah	
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	Skor Indeks Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan SAMSAT/Bapenda Provinsi
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	Skor Indeks Persaingan Usaha
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan	
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Skor Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Skor Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	Skor Indikator Utama Hubungan Industrial, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	Skor Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Skor Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Skor Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
3	Capaian Pembangunan Daerah	
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi	
3.1.1	Daya Beli	
3.1.1.1	Angka pengeluaran riil per kapita pertahun yang disesuaikan	Skor Dimensi Standar Hidup Layak, Indeks Pembangunan Manusia
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Data Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
3.1.3	Kestabilan Harga	

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
3.1.3.1	Tingkat Kesesuaian Inflasi Tahunan dengan Target Nasional	<i> tingkat inflasi gabungan provinsi </i>
3.1.4	Pertumbuhan Investasi	
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	$\frac{PMDN_t - PMDN_{t-1}}{PMDN_{t-1}} \times 100$
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	$\frac{PMA_t - PMA_{t-1}}{PMA_{t-1}} \times 100$
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan	
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	Skor Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	Skor Indikator Utama Kesempatan Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
3.2	Capaian Pembangunan Sosial	
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (P0)
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Skor Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Skor Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
3.2.1.4	Rasio Gini	Rasio Gini
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	$\frac{Jumlah\ Desa\ Tertinggal + Jumlah\ Desa\ Sangat\ Tertinggal}{Total\ Desa} \times 100$ *Kategori Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal didasarkan oleh hasil pengukuran pada Indeks Desa Membangun, Kemendes-PDTT
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat	
3.2.2.1	Tingkat representasi masyarakat dalam mengakses pendidikan formal	Skor Dimensi Pengetahuan, Indeks Pembangunan Manusia
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat

ID	ASPEK/ VARIABEL/ SUBVARIABEL/ INDIKATOR	PERHITUNGAN / UKURAN
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat	
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	Skor Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Indeks Pembangunan Manusia
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	Prevalensi Status Gizi (TB/U) Pada Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) Menurut Provinsi, Survei Kesehatan Indonesia
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	Skor Indeks Pemberdayaan Gender
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	Skor Indeks Pembangunan Gender
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	Skor Indeks Perlindungan Anak
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan	
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup	
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun rincian lainnya seperti bobot, perumusan perhitungan, dan proses bisnis Penilaian ITKPD dapat dilihat lebih lanjut pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.5 – 240 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

2.3 Klasifikasi Hasil

Hasil penghitungan ITKPD yang diperoleh akan menghasilkan angka kontinu dengan interval 0 sampai dengan 100 yang menunjukkan tingkat kualitas tata kelola pemerintahan suatu daerah. Angka yang semakin tinggi dari skor ITKPD menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Skor ITKPD

KLASIFIKASI	RENTANG SKOR
Sangat Baik	$85 < \text{skor} \leq 100$
Baik	$70 < \text{skor} \leq 85$
Cukup	$55 < \text{skor} \leq 70$
Kurang	$40 < \text{skor} \leq 55$
Sangat Kurang	$0 < \text{skor} \leq 40$

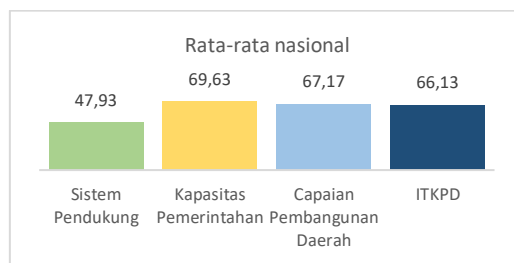
BAB III

GAMBARAN UMUM

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

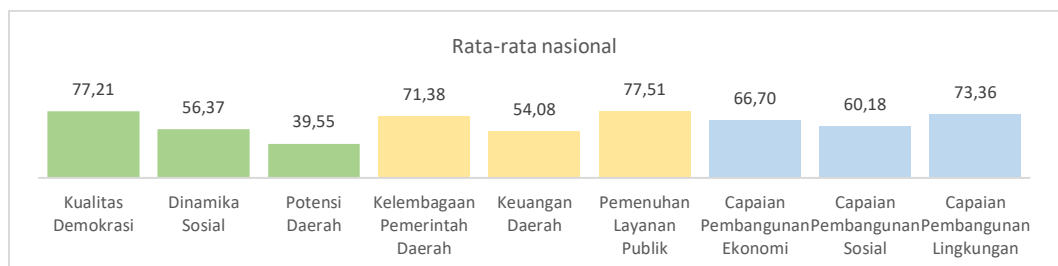
3.1 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Secara Nasional

ITKPD dapat berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap kualitas daerah sekaligus menggambarkan efektivitas tata kelola yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Nilai ITKPD ini merupakan agregasi antara ukuran kondisi sistem pendukung suatu daerah, kapasitas pemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan daerah, dan kualitas capaian pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, suatu pemerintahan daerah dinyatakan memiliki tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas saat ketiga elemen tata kelola tersebut dicapai secara optimal.

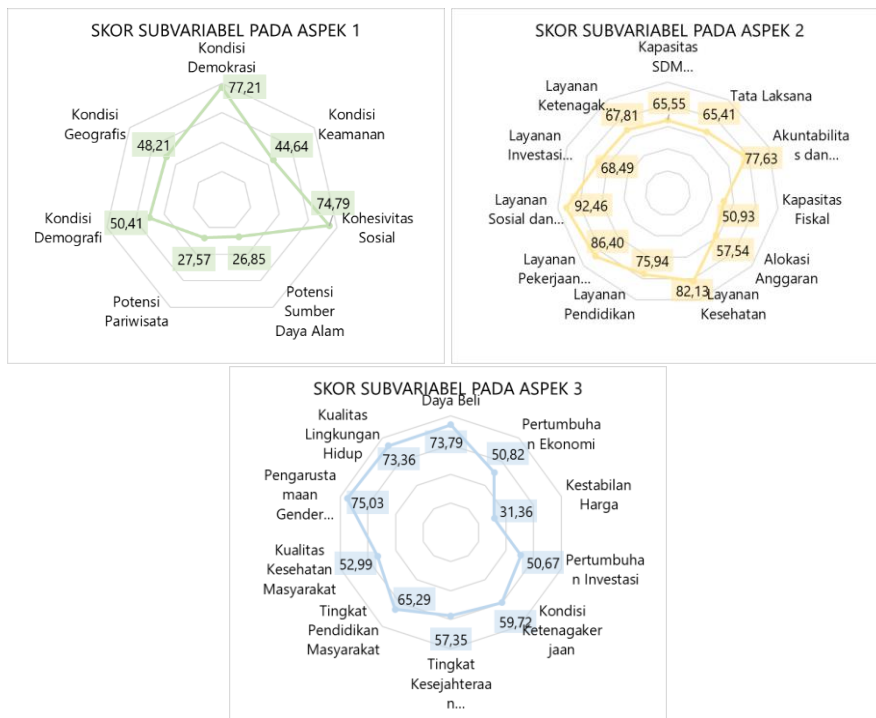


Gambar 3. Rata-rata nasional Skor ITKPD dan Skor Aspek

Secara rata-rata nasional, kondisi tata kelola pemerintah daerah berada pada kategori cukup dengan skor 66,13. Adapun jika dilihat per aspek, kualitas sistem pendukung pemerintahan daerah pada umumnya berada di katagori kurang dengan rata-rata skor 47,93; kapasitas pemerintahan pada kategori cukup dengan rata-rata skor 69,63; dan capaian pembangunan daerah pada kategori cukup dengan rata-rata 67,17. Pemerintahan daerah perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong kualitas sistem pendukungnya baik dari sisi kualitas demokrasinya, kondisi keamanan dan kohesivitas sosial, maupun mendorong pemanfaatan atas potensi-potensi daerah yang ada.



Gambar 4. Rata-rata nasional skor ITKPD per variabel



Gambar 5. Rata-rata nasional skor ITKPD per subvariabel

Jika dilihat berdasarkan skor per variabel, pada aspek sistem pendukung, variabel kualitas demokrasi telah memiliki rata-rata nasional yang baik dengan nilai 77,21, sedangkan variabel dinamika sosial memiliki nilai 56,37 dengan kategori cukup. Variabel yang masih berkategori sangat kurang dan membutuhkan intervensi adalah variabel potensi daerah dengan skor 39,55. Jika dilihat lebih dalam hingga level subvariabel, sektor yang berkategori kurang dan memerlukan intervensi yaitu kondisi keamanan, potensi sumber daya alam, potensi pariwisata, kondisi geografis dan kondisi demografi. **Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan forkopimda dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kejahatan maupun aman dari bencana. Selain itu, perlu adanya optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata melalui dukungan akses, konektivitas, dan jaminan keamanan.**

Pada aspek kapasitas pemerintahan, variabel yang masih berkategori kurang dan memerlukan intervensi yaitu variabel keuangan daerah dengan skor 54,08. Sedangkan untuk variabel kelembagaan pemerintah daerah dengan skor 71,38 dan pemenuhan layanan publik dengan skor 77,51 sudah masuk dalam kategori baik. Adapun pada level subvariabel, sektor yang masih berkategori kurang dan memerlukan intervensi yaitu kapasitas fiskal. **Hal tersebut mengindikasikan saat ini daerah masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang cukup tinggi.**

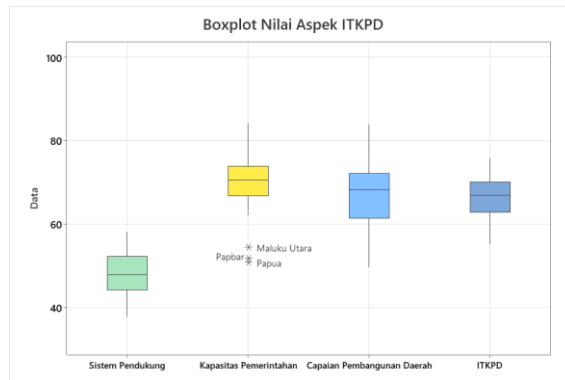
Pada aspek capaian pembangunan daerah, capaian pembangunan ekonomi dengan skor 66,70 dan pembangunan sosial dengan skor 60,18 sudah pada kategori cukup serta variabel capaian pembangunan lingkungan sudah pada kategori baik dengan skor 73,36. **Meskipun secara variabel tidak ada yang berkategori kurang, masih terdapat subvariabel yang memiliki nilai sangat kurang yaitu kestabilan harga serta subvariabel yang memiliki nilai kurang yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat kestabilan harga perlu dikendalikan secara serius karena akan berdampak pada banyak sektor termasuk kualitas kesehatan masyarakat.**



Gambar 6. Peta sebaran skor ITKPD di Provinsi se-Indonesia

Jika dilihat berdasarkan peta sebaran skor ITKPD di Provinsi se-Indonesia, variasi nilai ITKPD provinsi cenderung pada tingkatan yang tidak terlalu berbeda. Hal tersebut tercerminkan dari gradasi warna yang tidak terlalu kontras antar provinsi se Indonesia. Jika dilihat sebaran per aspeknya berdasarkan *boxplot* dibawah, dapat dilihat bahwa Aspek Capaian Pembangunan Daerah cenderung lebih bervariasi dilihat melalui ukuran *boxplot* yang lebih lebar dibandingkan dengan Aspek Sistem Pendukung maupun Aspek Kapasitas Pemerintahan.

Kondisi sistem pendukung dan kapasitas pemerintahan yang cenderung tidak bervariasi namun capaian pembangunan daerah yang dihasilkan memiliki tingkat variasi yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa Capaian Pembangunan Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Sistem Pendukung dan Kapasitas Pemerintahan yang ada di daerah saja, melainkan terdapat faktor lain yang cukup mempengaruhi capaian pembangunan daerah diantaranya yaitu intervensi langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas dari otonomi dan desentralisasi kebijakan yang ada di daerah dalam mencapai pembangunan daerah itu sendiri.



Gambar 7. Boxplot distribusi skor per aspek ITKPD

3.2 Analisis Tematis Perbandingan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah per Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah melalui pendapatan daerah yang dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah telah mengelompokkan daerah Provinsi terkait kemampuan keuangan daerah dengan kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:

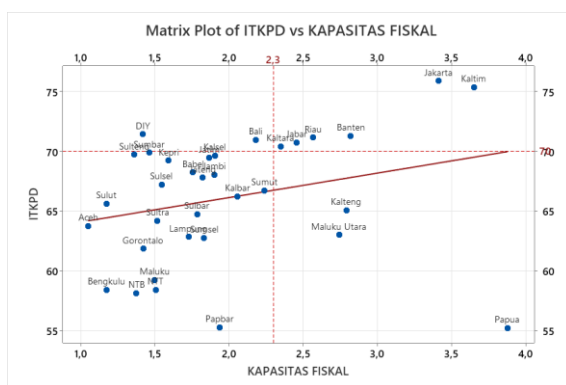
Tabel 5. Kategori Kapasitas Fiskal Provinsi Tahun 2023 berdasarkan PMK No. 84/2003

ID	PROVINSI	KFD	KAT_KFD	ID	PROVINSI	KFD	KAT_KFD
11	Aceh	1,05	Sangat Rendah	52	Nusa Tenggara Barat	1,38	Rendah
12	Sumatera Utara	2,24	Sedang	53	Nusa Tenggara Timur	1,51	Rendah
13	Sumatera Barat	1,46	Rendah	61	Kalimantan Barat	2,06	Sedang
14	Riau	2,57	Tinggi	62	Kalimantan Tengah	2,79	Tinggi
15	Jambi	1,90	Sedang	63	Kalimantan Selatan	1,90	Sedang
16	Sumatera Selatan	1,83	Sedang	64	Kalimantan Timur	3,65	Sangat Tinggi
17	Bengkulu	1,17	Sangat Rendah	65	Kalimantan Utara	2,35	Tinggi
18	Lampung	1,73	Rendah	71	Sulawesi Utara	1,17	Sangat Rendah
19	Kep. Bangka Belitung	1,76	Rendah	72	Sulawesi Tengah	1,36	Rendah

ID	PROVINSI	KFD	KAT_KFD
21	Kep. Riau	1,59	Rendah
31	DKI Jakarta	3,41	Sangat Tinggi
32	Jawa Barat	2,46	Tinggi
33	Jawa Tengah	1,82	Sedang
34	DI Yogyakarta	1,42	Rendah
35	Jawa Timur	1,87	Sedang
36	Banten	2,82	Sangat Tinggi
51	Bali	2,18	Sedang

ID	PROVINSI	KFD	KAT_KFD
73	Sulawesi Selatan	1,55	Rendah
74	Sulawesi Tenggara	1,52	Rendah
75	Gorontalo	1,42	Rendah
76	Sulawesi Barat	1,78	Rendah
81	Maluku	1,50	Rendah
82	Maluku Utara	2,74	Tinggi
91	Papua	3,88	Sangat Tinggi
92	Papua Barat	1,94	Sedang

Dengan menggunakan garis referensi pada nilai 2,296 yang merupakan batas minimal kategori KFD tinggi sebagai sumbu x dan nilai 70 yang merupakan batas minimal kategori ITKPD baik sebagai sumbu y, maka diperoleh sebaran kualitas tata kelola pemerintah daerah berdasarkan tingkat KFD sebagai berikut:



Gambar 8. Matrix plot ITKPD berdasarkan KFD

Berdasarkan matrix plot diatas, perolehan nilai ITKPD cenderung menyebar dan tidak berada di garis linear pada seluruh kategori kapasitas fiskal daerah (KFD). Terdapat daerah dengan KFD tinggi namun memiliki nilai ITKPD yang kurang baik seperti Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah. Sebaliknya terdapat daerah dengan KFD rendah namun dapat memperoleh nilai ITKPD yang baik, seperti DI Yogyakarta dan Bali. Gambaran tersebut diperkuat dengan uji beda rata-rata skor ITKPD antar masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah dengan hasil sebagai berikut:

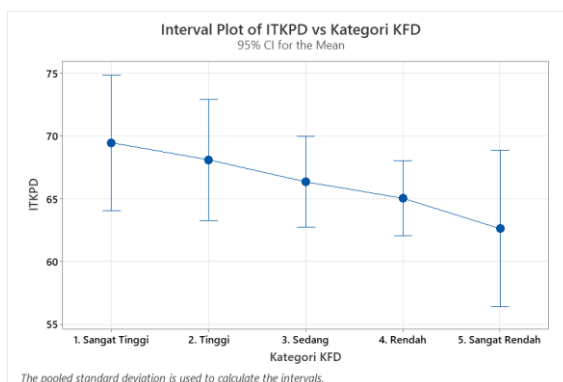
Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Kategori KFD	4	116,6	29,16	1,05	0,401
Error	29	808,3	27,87		
Total	33	924,9			

Means

Kategori KFD	N	Mean	StDev	95% CI
1. Sangat Tinggi	4	69,45	9,70	(64,05; 74,85)
2. Tinggi	5	68,09	3,76	(63,26; 72,92)
3. Sedang	9	66,33	4,77	(62,73; 69,93)
4. Rendah	13	65,03	4,65	(62,03; 68,02)
5. Sangat Rendah	3	62,61	3,75	(56,37; 68,84)

Pooled StDev = 5,27930



Gambar 9. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata ITKPD berdasarkan Kategori KFD

Dari hasil uji beda di atas, terlihat bahwa nilai P-Value adalah sebesar 0,401 atau lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai ITKPD antara daerah-daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak menjadi faktor yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Daerah dengan KFD rendah tetap memiliki potensi untuk dapat melaksanakan tata kelola yang berkualitas dan berdampak terhadap capaian pembangunan daerah. Namun jika dilihat secara rata-rata, ada kecenderungan bahwa daerah yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi akan memiliki rata-rata skor ITKPD yang lebih tinggi.

3.3 Analisis Tematis Perbandingan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah berdasarkan Proporsi Pertambangan dan Penggalian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam, khususnya pertambangan dan penggalian. Namun potensi tersebut tidak merata di seluruh Provinsi di Indonesia. Potensi pertambangan dapat berfungsi sebagai daya ungkit perekonomian dan pembangunan di daerah. Daerah yang memiliki potensi pertambangan dan penggalian seharusnya bisa memiliki dukungan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disisi lain, terdapat fenomena *Dutch Disease* yang merupakan fenomena ekonomi ketika eksploitasi sumber daya alam memicu kelemahan di sektor lain. *Dutch disease* umumnya dikaitkan dengan daerah-daerah yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat perbandingan kondisi tata kelola pemerintahan daerah antara daerah yang memiliki dukungan sumber daya alam dalam hal ini potensi pertambangan dan penggalian yang tinggi dengan daerah yang tidak memiliki kondisi tersebut.

Pada analisis ini, Provinsi akan dikategorikan berdasarkan proporsi PDRB sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB keseluruhan. “Daerah tambang” merupakan dikategorikan berdasarkan tingkat proporsi PDRB sektor pertambangan dan penggalian > 10%, sedangkan yang memiliki proporsi < 10% masuk dalam kategori daerah dengan “Daerah non-tambang”. Berikut adalah tabel tingkat proporsi PDRB sektor pertambangan dan penggalian:

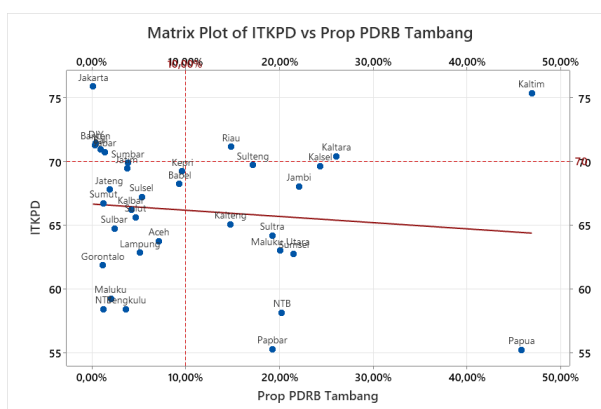
Tabel 6. Tabel Kategori Provinsi berdasarkan Proporsi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

ID	PROVINSI	PROP. PDRB TAMBANG	KATEGORI	ID	PROVINSI	PROP. PDRB TAMBANG	KATEGORI
11	Aceh	7,13%	Non Tambang	52	Nusa Tenggara Barat	20,24%	Tambang
12	Sumatera Utara	1,25%	Non Tambang	53	Nusa Tenggara Timur	1,22%	Non Tambang
13	Sumatera Barat	3,81%	Non Tambang	61	Kalimantan Barat	4,18%	Non Tambang
14	Riau	14,87%	Tambang	62	Kalimantan Tengah	14,78%	Tambang
15	Jambi	22,09%	Tambang	63	Kalimantan Selatan	24,35%	Tambang
16	Sumatera Selatan	21,53%	Tambang	64	Kalimantan Timur	46,91%	Tambang
17	Bengkulu	3,61%	Non Tambang	65	Kalimantan Utara	26,07%	Tambang
18	Lampung	5,12%	Non Tambang	71	Sulawesi Utara	4,63%	Non Tambang
19	Kep. Bangka Belitung	9,31%	Non Tambang	72	Sulawesi Tengah	17,16%	Tambang
21	Kep. Riau	9,61%	Non Tambang	73	Sulawesi Selatan	5,31%	Non Tambang
31	DKI Jakarta	0,10%	Non Tambang	74	Sulawesi Tenggara	19,22%	Tambang

ID	PROVINSI	PROP. PDRB TAMBANG	KATEGORI
32	Jawa Barat	1,38%	Non Tambang
33	Jawa Tengah	1,86%	Non Tambang
34	DI Yogyakarta	0,42%	Non Tambang
35	Jawa Timur	3,74%	Non Tambang
36	Banten	0,33%	Non Tambang
51	Bali	0,89%	Non Tambang

ID	PROVINSI	PROP. PDRB TAMBANG	KATEGORI
75	Gorontalo	1,17%	Non Tambang
76	Sulawesi Barat	2,40%	Non Tambang
81	Maluku	2,02%	Non Tambang
82	Maluku Utara	20,10%	Tambang
91	Papua	45,84%	Tambang
92	Papua Barat	19,24%	Tambang

Dengan menggunakan garis referensi pada nilai 10% sebagai batas kategori daerah tambang dan nilai 70 yang merupakan batas minimal kategori ITKPD baik, maka diperoleh sebaran kualitas tata kelola pemerintah daerah berdasarkan proporsi pertambangan sebagai berikut:



Gambar 10. Matrix Plot ITKPD berdasarkan Daerah Tambang – Non Tambang

Berdasarkan matrix plot diatas, perolehan nilai ITKPD cenderung menyebar di seluruh kategori wilayah baik daerah tambang maupun non tambang. Terdapat daerah yang merupakan daerah tambang namun memiliki nilai ITKPD yang kurang baik seperti Papua, Papua Barat, NTB, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Sebaliknya terdapat daerah yang memiliki proporsi PDRB pertambangan yang rendah namun dapat memperoleh nilai ITKPD yang baik, seperti Jakarta, DIY, Banten, dan Jawa Barat. Gambaran tersebut diperkuat dengan uji beda rata-rata skor ITKPD antar masing-masing kategori dengan hasil sebagai berikut:

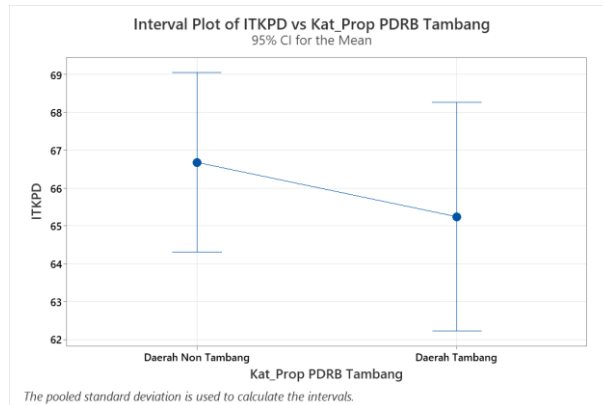
Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Kat_Prop PDRB Tambang	1	16,47	16,47	0,58	0,452
Error	32	908,41	28,39		
Total	33	924,88			

Means

Kat_Prop PDRB Tambang	N	Mean	StDev	95% CI
Daerah Non Tambang	21	66,68	4,66	(64,31; 69,05)
Daerah Tambang	13	65,25	6,28	(62,24; 68,26)

Pooled StDev = 5,32802

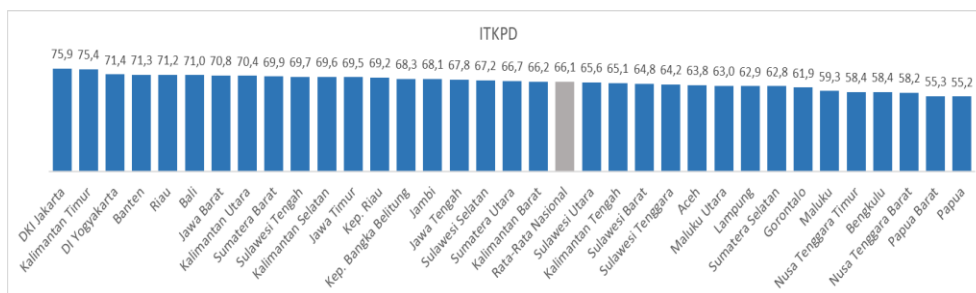


Dari hasil uji beda di atas, terlihat bahwa nilai P-Value adalah sebesar 0,452 atau lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari nilai ITKPD antara daerah tambang dengan daerah non tambang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertambangan belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Bahkan jika dilihat secara rata-rata, ada potensi terjadinya fenomena *Dutch Disease* dimana justru daerah tambang memiliki rata-rata nilai tata kelola pemerintahan daerah lebih rendah dari pada daerah non-tambang.

BAB IV

HASIL PENILAIAN ITKPD 2024 PER PROVINSI

Penilaian ITKPD 2024 dilakukan terhadap 34 provinsi tanpa memasukkan 4 Daerah Otonom Baru pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ketersediaan data sekunder yang mengukur 4 DOB baru, masih belum tersedia secara menyeluruh. Oleh karena itu, Penilaian ITKPD 2024 belum memasukan hasil pengukuran dari 4 DOB tersebut. Adapun grafik nilai ITKPD 34 Provinsi adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Grafik Nilai ITKPD 34 Provinsi

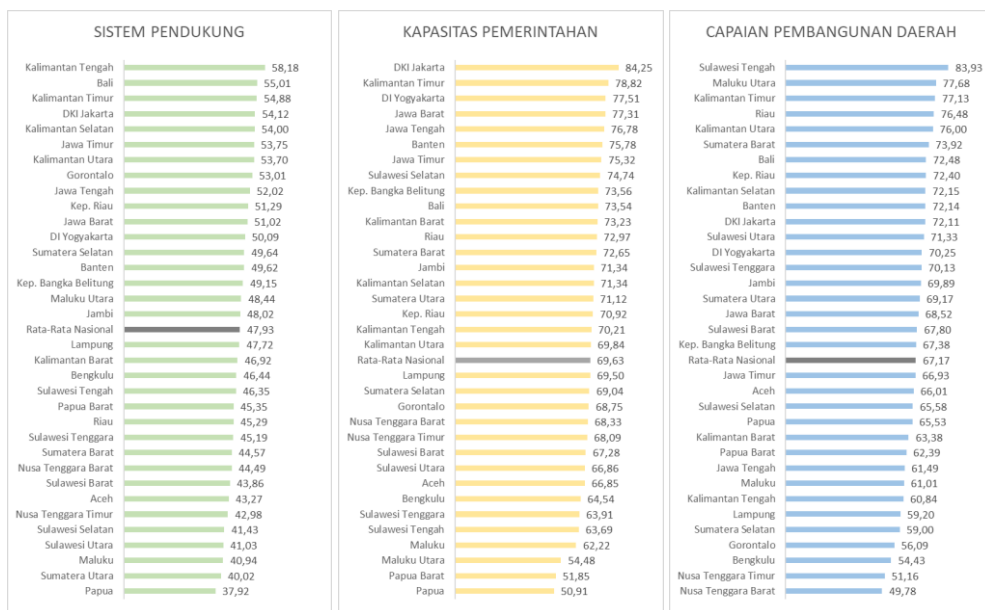
Berdasarkan gambar diatas, Kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada 34 Provinsi di Indonesia pada umumnya berada pada kategori cukup. Terdapat 8 Provinsi yang memiliki nilai ITKPD berkategori Baik yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Banten, Riau, Bali, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Adapun 26 provinsi lainnya berada pada kategori cukup. Tidak ada provinsi yang memiliki kategori Sangat Baik, Kurang maupun Sangat Kurang.

Jika dilihat per aspek, pada Aspek Sistem Pendukung, rata-rata nasional berada pada kategori kurang. Hanya terdapat 2 provinsi yang memiliki sistem pendukung dengan nilai cukup yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali. Adapun provinsi dengan nilai sistem pendukung sangat kurang yaitu Provinsi Papua. Tidak ada provinsi yang memiliki nilai aspek sistem pendukung yang baik maupun sangat baik.

Pada Aspek Kapasitas Pemerintahan, rata-rata nasional berada pada kategorinya cukup. 18 provinsi sudah masuk dalam kategori memiliki kapasitas pemerintahan yang baik, 13 provinsi memiliki kapasitas pemerintahan yang cukup, dan terdapat 3 provinsi yang memiliki kapasitas pemerintahan kurang, yaitu Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pada Aspek Capaian Pembangunan Daerah, rata-rata nasional berada pada kategori cukup. 14 provinsi sudah masuk dalam kategori memiliki capaian

pembangunan daerah yang baik, 17 provinsi memiliki capaian pembangunan yang cukup baik, dan terdapat 3 provinsi yang memiliki capaian pembangunan kurang baik, yaitu Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.



Gambar 12. Grafik Nilai ITKPD per Aspek

Adapun rincian tabel skor per Aspek untuk 34 Provinsi adalah sebagai berikut:

ID	PROVINSI	ASPEK			ITKPD	KATEGORI
		SISTEM PENDUKUNG	KAPASITAS PEMERINTAHAN	CAPAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
11	Aceh	43,27	66,86	66,01	63,78	Cukup
12	Sumatera Utara	40,02	71,19	69,17	66,76	Cukup
13	Sumatera Barat	44,57	72,66	73,92	69,90	Cukup
14	Riau	45,29	73,25	76,48	71,29	Baik
15	Jambi	48,02	71,13	69,89	67,95	Cukup
16	Sumatera Selatan	49,64	68,74	59,00	62,64	Cukup
17	Bengkulu	46,44	64,52	54,43	58,40	Cukup
18	Lampung	47,72	69,52	59,20	62,87	Cukup
19	Kep. Bangka Belitung	49,15	73,53	67,38	68,25	Cukup

ID	PROVINSI	ASPEK			ITKPD	KATEGORI
		SISTEM PENDUKUNG	KAPASITAS PEMERINTAHAN	CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH		
21	Kep. Riau	51,29	70,85	72,40	69,20	Cukup
31	DKI Jakarta	54,12	84,12	72,11	75,85	Baik
32	Jawa Barat	51,02	77,31	68,52	70,75	Baik
33	Jawa Tengah	52,02	76,73	61,49	67,78	Cukup
34	DI Yogyakarta	50,09	77,68	70,25	71,51	Baik
35	Jawa Timur	53,75	75,32	66,93	69,47	Cukup
36	Banten	49,62	75,69	72,14	71,24	Baik
51	Bali	55,01	73,39	72,48	70,89	Baik
52	Nusa Tenggara Barat	44,49	68,30	49,78	58,15	Cukup
53	Nusa Tenggara Timur	42,98	67,89	51,16	58,33	Cukup
61	Kalimantan Barat	46,92	73,22	63,38	66,24	Cukup
62	Kalimantan Tengah	58,18	70,14	60,84	65,04	Cukup
63	Kalimantan Selatan	54,00	71,49	72,15	69,72	Cukup
64	Kalimantan Timur	54,88	78,79	77,13	75,35	Baik
65	Kalimantan Utara	53,70	69,68	76,00	70,34	Baik
71	Sulawesi Utara	41,03	66,78	71,33	65,60	Cukup
72	Sulawesi Tengah	46,35	63,47	83,93	69,64	Cukup
73	Sulawesi Selatan	41,43	74,69	65,58	67,19	Cukup
74	Sulawesi Tenggara	45,19	63,78	70,13	64,15	Cukup
75	Gorontalo	53,01	68,44	56,09	61,72	Cukup
76	Sulawesi Barat	43,86	67,00	67,80	64,63	Cukup
81	Maluku	40,94	62,26	61,01	59,29	Cukup
82	Maluku Utara	48,44	54,54	77,68	63,06	Cukup

ID	PROVINSI	ASPEK			ITKPD	KATEGORI
		SISTEM PENDUKUNG	KAPASITAS PEMERINTAHAN	CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH		
91	Papua	37,92	51,12	65,53	55,33	Cukup
92	Papua Barat	45,35	52,11	62,39	55,42	Cukup
100	Rata-Rata Nasional	47,93	69,63	67,17	66,13	Cukup

**HASIL PENILAIAN, ANALISIS DAN
REKOMENDASI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT PROVINSI**



ACEH

63,78/66,13 – Cukup

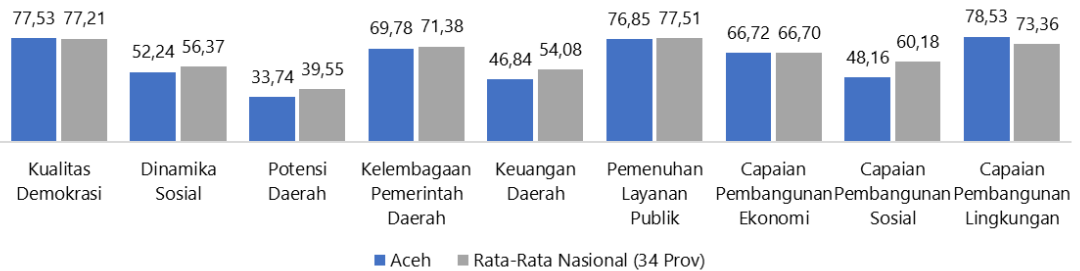
**Aspek
Sistem Pendukung
43,27/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
66,85/69,63**

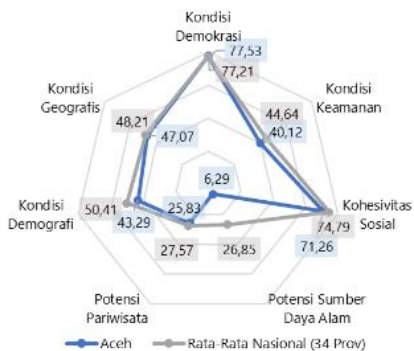
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
66,01/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

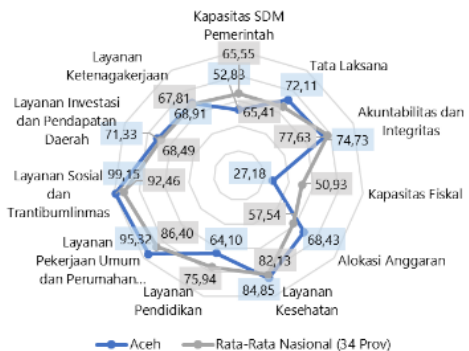
SKOR VARIABEL



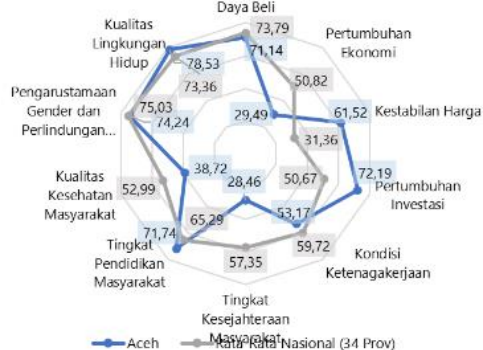
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Pemerintah Provinsi Aceh perlu melakukan perbaikan pada peningkatan potensi daerah melalui: 1) peningkatan daya saing pariwisata, dan 2) menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor lainnya.
- Kelembagaan pemerintah perlu ditingkatkan melalui: 1) peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal; 2) Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk; dan 3) Tingkat inovasi daerah
- Pemerintah Provinsi Aceh telah berupaya memberikan pelayanan publik yang baik. Namun, masih terdapat jenis layanan yang belum optimal, yaitu terkait dengan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan, sosial dan tramtibuslinmas serta pelayanan pada bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- Capaian pembangunan belum optimal, Pemerintah Provinsi Aceh dapat mendorong perbaikan dalam bidang: 1) pada bidang sosial perlu perbaikan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kesehatan masyarakat; 2) pada bidang ekonomi perlu strategi Provinsi Aceh untuk dapat melakukan kebijakan kestabilan harga sehingga inflasi dapat ditekan.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI ACEH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		63,78
1	Sistem Pendukung		43,27
1.1	Kualitas Demokrasi		77,53
1.1.1	Kondisi Demokrasi		77,53
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	77,53	77,53
1.2	Dinamika Sosial		52,24
1.2.1	Kondisi Keamanan		40,12
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	216,00	56,71
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2539,00	23,53
1.2.2	Kohesivitas Sosial		71,26
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	73,09	73,09
1.2.2.2	Modal Sosial	69,42	69,42
1.3	Potensi Daerah		33,74
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		6,29
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,50	6,29
1.3.2	Potensi Pariwisata		25,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,55	25,83
1.3.3	Kondisi Demografi		43,29
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	48,01	26,57
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	60,00	60,00
1.3.4	Kondisi Geografis		47,07
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	97,38	58,20
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	146,90	35,93
2	Kapasitas Pemerintahan		66,85
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		69,78
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		52,83
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	28,16
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		72,11
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	80,67	80,67
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,62	65,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	88,71	88,71
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	97,21	51,98
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		74,73
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	67,05	67,05
2.2	Kuangan Daerah		46,84
2.2.1	Kapasitas Fiskal		27,18
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,05	23,75
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,28	30,60
2.2.2	Alokasi Anggaran		68,43
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,29	96,43
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	97,71	88,65
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	15,65	46,07
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,89	43,62
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		76,85
2.3.1	Layanan Kesehatan		84,85
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	69,70	69,70
2.3.2	Layanan Pendidikan		64,10
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	61,96	61,96
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	66,23	66,23

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI ACEH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		95,32
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	99,29	99,29
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,84	84,41
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,15
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	98,30	98,30
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		71,33
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,55	91,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,10	51,67
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		68,91
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,50	85,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	7,58	50,52
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,80	28,02
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	8,96	89,61
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,33	63,34
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		66,01
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		66,72
3.1.1	Daya Beli		71,14
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,71	71,14
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		29,49
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,23	29,49
3.1.3	Kestabilan Harga		61,52
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	1,53	61,52
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		72,19
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	50,20	74,99
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	48,67	69,40
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		53,17
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	5,69	56,86
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	9,87	65,80
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,60	36,03
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		48,16
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		28,46
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	14,45	32,06
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,76	29,23
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,78	21,21
3.2.1.4	Gini Ratio	0,30	40,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	13,12	57,21
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		71,74
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,72	71,78
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	71,70	71,70
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		38,72
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	77,45
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	29,40	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		74,24
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	63,56	63,56
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	92,55	92,55
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,34	64,34
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		78,53
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		78,53
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	78,53	78,53

SUMATERA UTARA

66,73/66,13 – Cukup

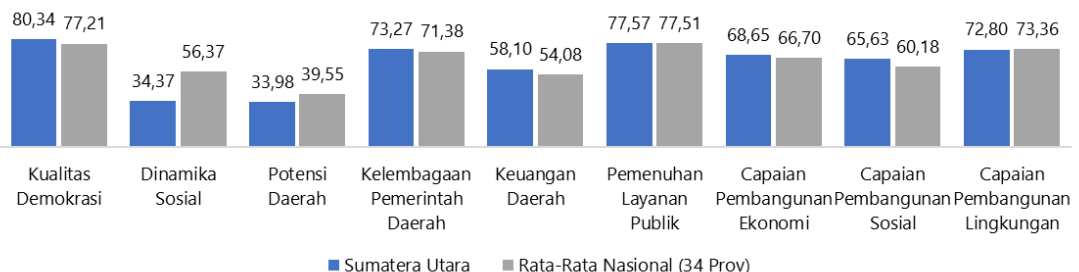
Aspek
Sistem Pendukung
40,02/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
71,12/69,63

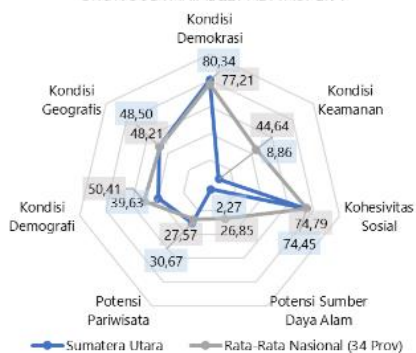
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
69,17/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

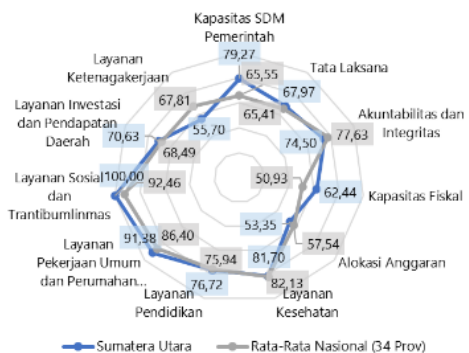
SKOR VARIABEL



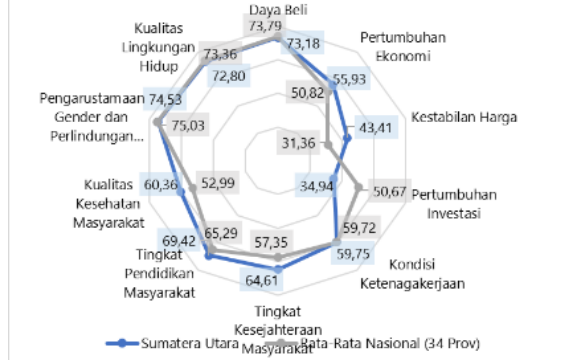
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Situasi keamanan masyarakat perlu menjadi agenda perbaikan Provinsi Sumatera Utara. Selain situasi keamanan, peningkatan potensi daerah juga perlu ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1) meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor lainnya dan 2) meningkatkan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang potensial di Provinsi Sumatera Utara.
- Kapasitas fiskal yang besar belum dikelola secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan serapan anggaran untuk realisasi belanja dan anggaran lingkungan hidup.
- Pelayanan publik diimplementasikan dengan baik, namun kinerja layanan kesehatan dan ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan
- Rendahnya layanan kesehatan berdampak pada capaian kualitas kesehatan masyarakat pada capaian pembangunan sosial. Pertumbuhan investasi perlu ditingkatkan guna mendorong capaian pembangunan ekonomi.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		66,73
1	Sistem Pendukung		40,02
1.1	Kualitas Demokrasi		80,34
1.1.1	Kondisi Demokrasi		80,34
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	80,34	80,34
1.2	Dinamika Sosial		34,37
1.2.1	Kondisi Keamanan		8,86
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	434,00	13,03
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	506,00	4,69
1.2.2	Kohesivitas Sosial		74,45
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,61	77,61
1.2.2.2	Modal Sosial	71,28	71,28
1.3	Potensi Daerah		33,98
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		2,27
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,54	2,27
1.3.2	Potensi Pariwisata		30,67
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,84	30,67
1.3.3	Kondisi Demografi		39,63
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	48,56	22,94
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	56,33	56,33
1.3.4	Kondisi Geografis		48,50
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	98,81	54,38
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	140,65	42,62
2	Kapasitas Pemerintahan		71,12
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		73,27
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		79,27
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	81,05
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		67,97
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	87,96	87,96
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,21	55,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	81,91	81,91
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	81,90	43,80
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		74,50
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	66,37	66,37
2.2	Kuangan Daerah		58,10
2.2.1	Kapasitas Fiskal		62,44
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,24	60,00
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,58	64,87
2.2.2	Alokasi Anggaran		53,35
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	89,32	47,05
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	22,88	69,27
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,04	2,11
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		77,57
2.3.1	Layanan Kesehatan		81,70
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	63,40	63,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		76,72
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	97,35	97,35
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	56,10	56,10

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		91,38
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	92,91	92,91
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	98,57	98,57
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,81	80,51
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		70,63
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,38	67,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,42	73,67
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		55,70
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	7,89	78,89
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	3,02	20,14
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,69	36,91
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	2,59	25,90
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,63	76,27
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		69,17
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		68,65
3.1.1	Daya Beli		73,18
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,73	73,18
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		55,93
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,01	55,93
3.1.3	Kestabilan Harga		43,41
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,25	43,41
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		34,94
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	-5,63	24,38
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-11,41	45,49
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		59,75
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,81	68,12
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	9,92	66,14
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,42	44,25
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		65,63
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		64,61
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	8,15	61,68
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,26	67,69
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,32	67,68
3.2.1.4	Gini Ratio	0,31	38,20
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	29,46	3,94
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		69,42
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,70	70,18
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	68,67	68,67
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		60,36
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	76,89
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	18,90	43,82
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		74,53
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	69,18	69,18
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	91,31	91,31
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	61,64	61,64
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		72,80
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		72,80
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	72,80	72,80

SUMATERA BARAT

69,89/66,13 – Cukup

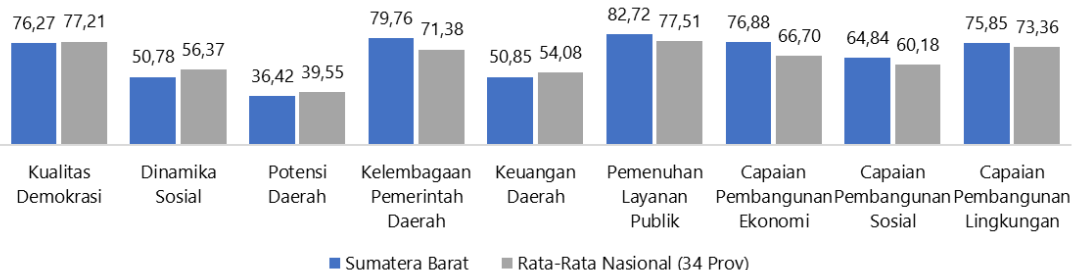
Aspek
Sistem Pendukung
44,57/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
72,65/69,63

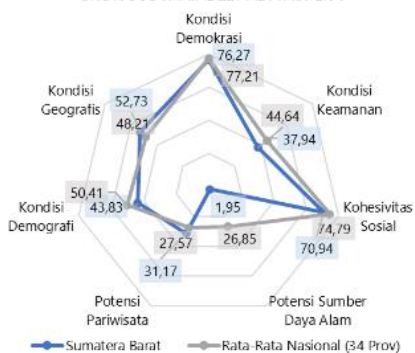
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
73,92/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

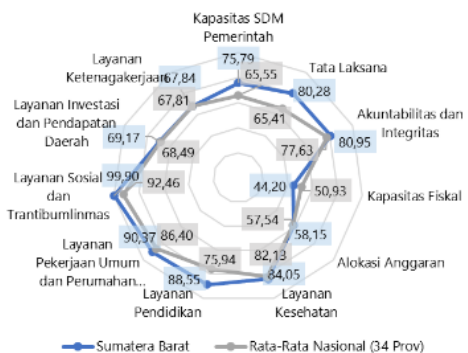
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Sistem pendukung termasuk kategori kurang, perlu adanya peningkatan potensi daerah. Sumber potensi daerah perlu ditingkatkan tidak hanya dari sumber daya alam yang rendah, namun juga dari potensi pariwisata.
- Keuangan daerah perlu perbaikan melalui: 1) peningkatan kapasitas fiskal; 2) peningkatan alokasi belanja modal dan alokasi anggaran urusan lingkungan hidup.
- Kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik patut diapresiasi. Namun, pelayanan investasi dan ketenagakerjaan perlu dilakukan perbaikan.
- Capaian kualitas kesehatan masyarakat dapat diperbaiki melalui peningkatan strategi untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Capaian ekonomi dapat ditingkatkan melalui: 1) peningkatan laju pertumbuhan ekonomi; 2) penurunan tingkat inflasi; dan 3) penyediaan kesempatan kerja yang luas.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		69,89
1	Sistem Pendukung		44,57
1.1	Kualitas Demokrasi		76,27
1.1.1	Kondisi Demokrasi		76,27
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	76,27	76,27
1.2	Dinamika Sosial		50,78
1.2.1	Kondisi Keamanan		37,94
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	235,00	52,91
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2478,00	22,97
1.2.2	Kohesivitas Sosial		70,94
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	71,58	71,58
1.2.2.2	Modal Sosial	70,30	70,30
1.3	Potensi Daerah		36,42
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		1,95
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,47	1,95
1.3.2	Potensi Pariwisata		31,17
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,87	31,17
1.3.3	Kondisi Demografi		43,83
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	47,20	32,00
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,67	55,67
1.3.4	Kondisi Geografis		52,73
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	94,15	66,84
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	144,38	38,63
2	Kapasitas Pemerintahan		72,65
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		79,76
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		75,79
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	74,08
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		80,28
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,71	91,71
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,75	68,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	84,74	84,74
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	138,48	74,05
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,95
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	71,41	71,41
2.2	Kuangan Daerah		50,85
2.2.1	Kapasitas Fiskal		44,20
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,46	36,28
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,47	52,13
2.2.2	Alokasi Anggaran		58,15
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	94,18	71,15
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	15,28	44,88
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,39	18,89
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		82,72
2.3.1	Layanan Kesehatan		84,05
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	68,10	68,10
2.3.2	Layanan Pendidikan		88,55
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	99,79	99,79
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	77,31	77,31

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		90,37
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,66	66,09
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,90
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	99,81	99,81
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		69,17
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,50	70,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,10	68,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		67,84
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,44	84,36
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	13,42	89,50
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	1,89	18,89
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	4,51	45,14
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,58	75,79
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		73,92
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		76,88
3.1.1	Daya Beli		74,09
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	74,09
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		42,71
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,62	42,71
3.1.3	Kestabilan Harga		37,88
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,47	37,88
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		63,36
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	42,97	68,44
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	20,75	58,29
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		62,25
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,09	60,90
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,90	52,67
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7,37	73,73
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		64,84
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		77,97
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	5,95	72,03
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,82	78,97
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,18	81,82
3.2.1.4	Gini Ratio	0,28	44,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	2,42	92,12
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		69,65
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,70	70,13
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	69,18	69,18
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		47,03
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	77,22
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	23,70	16,85
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		74,94
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	65,34	65,34
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	94,93	94,93
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	62,38	62,38
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		75,85
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		75,85
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	75,85	75,85

RIAU

71,16/66,13 – Baik

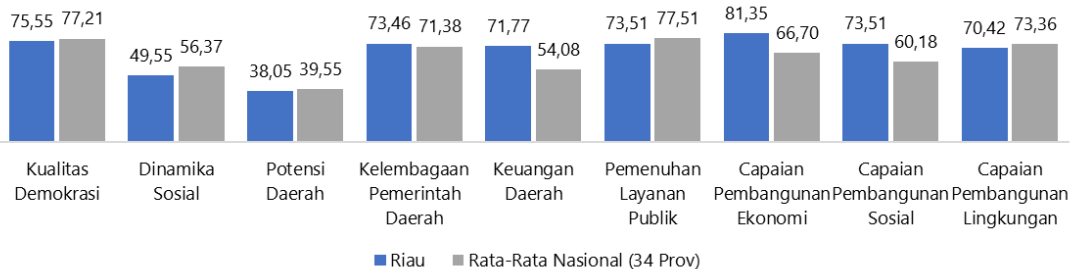
**Aspek
Sistem Pendukung
45,29/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
72,97/69,63**

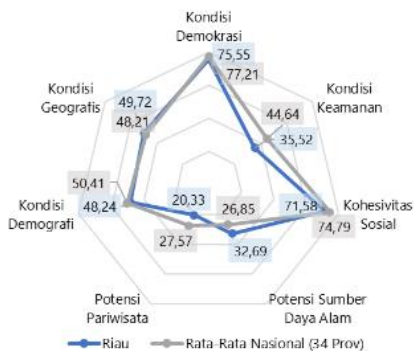
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
76,48/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

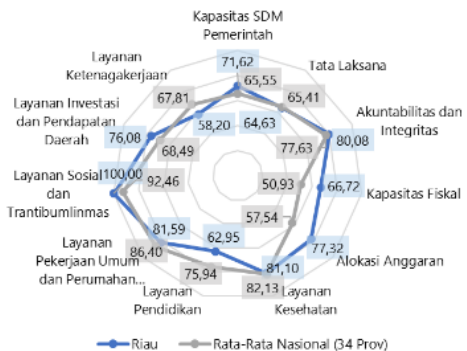
SKOR VARIABEL



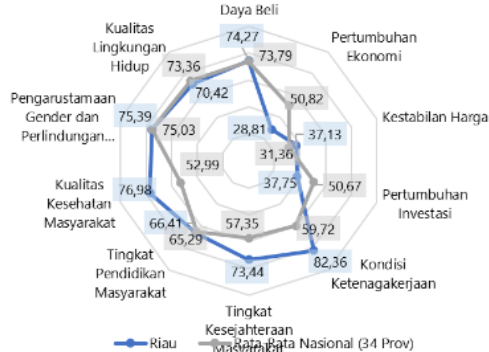
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Dinamika sosial dan potensi daerah menjadi tantangan dalam sistem pendukung di Provinsi Riau. Perbaikan dinamika sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kondisi keamanan masyarakat. Potensi daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan potensi pariwisata melalui: 1) peningkatan konektivitas; 2) menyusun kebijakan yang mendorong persaingan usaha dan melakukan perbaikan pelayanan publik khususnya pada bidang ketenagakerjaan.
- Kapasitas kelembagaan dan keuangan perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Perbaikan dapat dilakukan melalui: 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan; 2) menyusun inovasi daerah; 3) meningkatkan integritas dalam upaya pemberantasan korupsi; 4) peningkatan alokasi belanja modal dan alokasi anggaran urusan lingkungan hidup.
- Pelayanan ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) kapasitas pelatihan dan kompetensi kerja; 2) kondisi hubungan industrial; dan 3) kondisi lingkungan kerja.
- Capaian pembangunan daerah yang perlu ditingkatkan adalah pembangunan ekonomi. Pemerintah Provinsi Riau harapannya dapat memberi perhatian pada: 1) peningkatan pertumbuhan Ekonomi; 2) tingkat inflasi untuk menstabilkan harga; dan 3) pertumbuhan investasi.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI RIAU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		71,16
1	Sistem Pendukung		45,29
1.1	Kualitas Demokrasi		75,55
1.1.1	Kondisi Demokrasi		75,55
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	75,55	75,55
1.2	Dinamika Sosial		49,55
1.2.1	Kondisi Keamanan		35,52
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	237,00	52,51
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	1999,00	18,53
1.2.2	Kohesivitas Sosial		71,58
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	71,60	71,60
1.2.2.2	Modal Sosial	71,56	71,56
1.3	Potensi Daerah		38,05
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		32,69
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	7,82	32,69
1.3.2	Potensi Pariwisata		20,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,22	20,33
1.3.3	Kondisi Demografi		48,24
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,80	41,31
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,17	55,17
1.3.4	Kondisi Geografis		49,72
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	99,06	53,71
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	137,75	45,72
2	Kapasitas Pemerintahan		72,97
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		73,46
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		71,62
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	95,75
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	47,50	47,50
2.1.2	Tata Laksana		64,63
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	88,16	88,16
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,01	50,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	72,01	72,01
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	83,81	44,82
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,08
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	68,81	68,81
2.2	Kuangan Daerah		71,77
2.2.1	Kapasitas Fiskal		66,72
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,57	70,03
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,57	63,41
2.2.2	Alokasi Anggaran		77,32
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	97,27	86,47
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	22,25	67,23
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,16	56,74
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		73,51
2.3.1	Layanan Kesehatan		81,10
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	98,00	98,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	64,20	64,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		62,95
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	59,02	59,02
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	66,88	66,88

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI RIAU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		81,59
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	76,74	76,74
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,65	64,94
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		76,08
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,45	89,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,79	63,17
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		58,20
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,43	84,33
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	6,39	42,63
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,00	20,03
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	3,34	33,41
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,41	74,09
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		76,48
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		81,35
3.1.1	Daya Beli		74,27
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	74,27
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		28,81
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,21	28,81
3.1.3	Kestabilan Harga		37,13
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,50	37,13
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		37,75
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	10,74	39,22
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-34,59	36,27
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		82,36
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,88	68,82
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	11,87	79,16
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	10,00	99,97
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		73,51
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		73,44
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,68	68,59
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,00	74,36
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	75,76
3.2.1.4	Gini Ratio	0,32	35,20
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		66,41
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,68	68,01
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	64,81	64,81
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		76,98
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,80	80,37
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	13,60	73,60
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		75,39
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	72,29	72,29
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	88,98	88,98
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	63,89	63,89
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		70,42
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		70,42
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	70,42	70,42

JAMBI

68,05/66,13 – Cukup

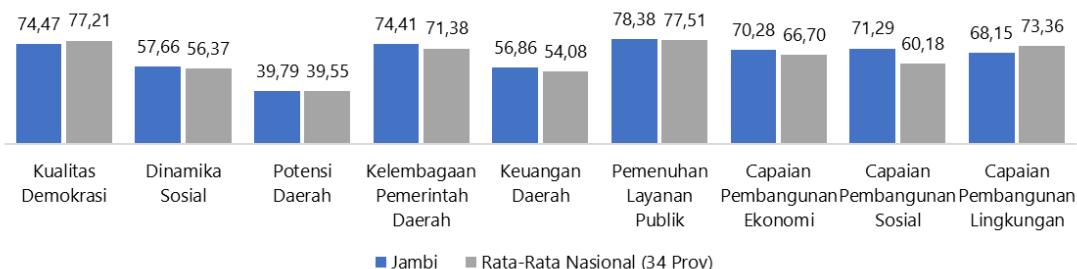
**Aspek
Sistem Pendukung
48,02/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
71,34/69,63**

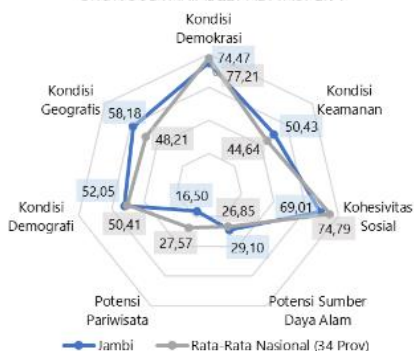
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
69,89/67,17**

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

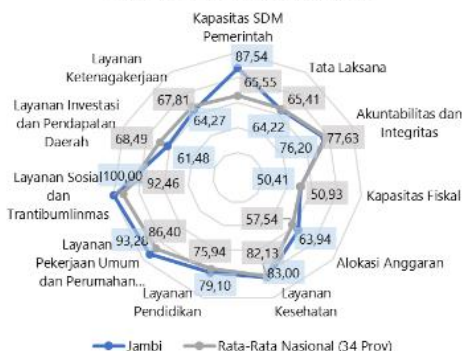
SKOR VARIABEL



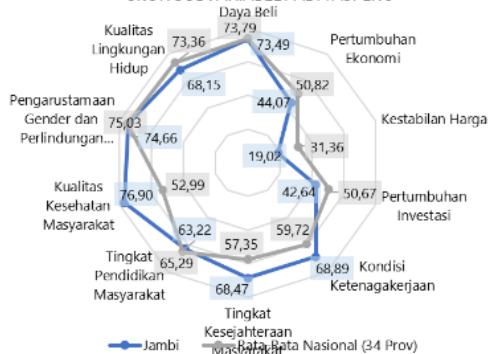
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Pengembangan potensi daerah bidang pariwisata menjadi hal yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi keamanan terkait dengan maraknya tindak kejahatan dan kohesivitas sosial juga menjadi tantangan Provinsi Jambi dalam membangun dinamika sosial yang aman dan harmonis.
- Kapasitas fiskal masih perlu ditingkatkan guna mendukung kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik yang terendah pada bidang investasi dan pendapatan. Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan intervensi dalam bidang persaingan usaha dan meningkatkan kinerja layanan investasi daerah.
- Capaian pembangunan daerah yang perlu ditingkatkan adalah capaian sosial. Pemerintah Provinsi Riau harapannya dapat memberi perhatian pada: 1) tingkat kesejahteraan masyarakat; 2) tingkat pendidikan masyarakat; dan 3) kualitas kesehatan masyarakat. Capaian kualitas lingkungan hidup termasuk dalam kategori cukup dibutuhkan perbaikan pada kualitas air, udara, dan tanah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAMBI

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		68,05
1	Sistem Pendukung		48,02
1.1	Kualitas Demokrasi		74,47
1.1.1	Kondisi Demokrasi		74,47
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	74,47	74,47
1.2	Dinamika Sosial		57,66
1.2.1	Kondisi Keamanan		50,43
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	192,00	61,52
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4243,00	39,33
1.2.2	Kohesivitas Sosial		69,01
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	65,17	65,17
1.2.2.2	Modal Sosial	72,85	72,85
1.3	Potensi Daerah		39,79
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		29,10
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	6,96	29,10
1.3.2	Potensi Pariwisata		16,50
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	1,99	16,50
1.3.3	Kondisi Demografi		52,05
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	44,91	47,26
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	56,83	56,83
1.3.4	Kondisi Geografis		58,18
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	93,55	68,44
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	135,69	47,93
2	Kapasitas Pemerintahan		71,34
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		74,41
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		87,54
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	97,58
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		64,22
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	88,41	88,41
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,31	57,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	76,55	76,55
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	58,28	31,17
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		76,20
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	71,45	71,45
2.2	Keuangan Daerah		56,86
2.2.1	Kapasitas Fiskal		50,41
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,90	49,66
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,46	51,15
2.2.2	Alokasi Anggaran		63,94
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	97,59	88,05
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	16,55	48,96
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,41	20,04
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		78,38
2.3.1	Layanan Kesehatan		83,00
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	66,00	66,00
2.3.2	Layanan Pendidikan		79,10
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	95,37	95,37
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	62,84	62,84

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAMBI

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		93,28
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,76	76,35
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		61,48
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,29	65,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,43	57,17
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		64,27
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	7,95	79,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	7,66	51,07
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,62	36,17
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	4,77	47,73
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,56	75,56
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		69,89
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		70,28
3.1.1	Daya Beli		73,49
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,73	73,49
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		44,07
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,66	44,07
3.1.3	Kestabilan Harga		19,02
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,22	19,02
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		42,64
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	0,63	30,06
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	13,04	55,22
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		68,89
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,63	66,26
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,17	67,81
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7,28	72,78
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		71,29
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		68,47
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	7,58	64,36
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,20	69,23
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,29	70,71
3.2.1.4	Gini Ratio	0,34	31,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	2,76	91,01
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		63,22
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,66	65,84
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,60	60,60
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		76,90
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,80	79,65
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	13,50	74,16
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		74,66
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	68,07	68,07
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	89,29	89,29
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	65,10	65,10
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		68,15
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		68,15
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	68,15	68,15

SUMATERA SELATAN

62,78/66,13 – Cukup

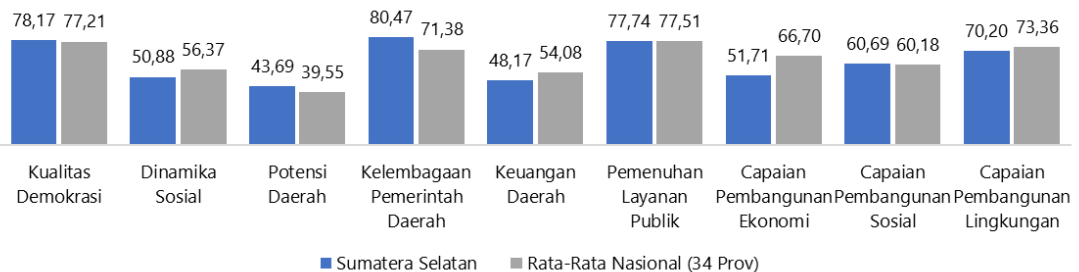
Aspek
Sistem Pendukung
49,64/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
69,04/69,63

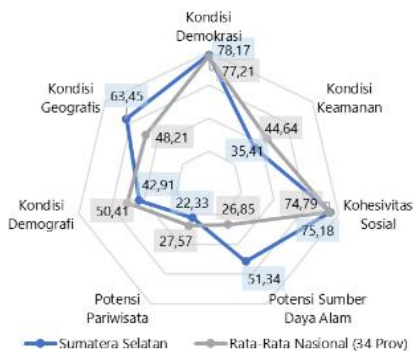
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
59,00/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

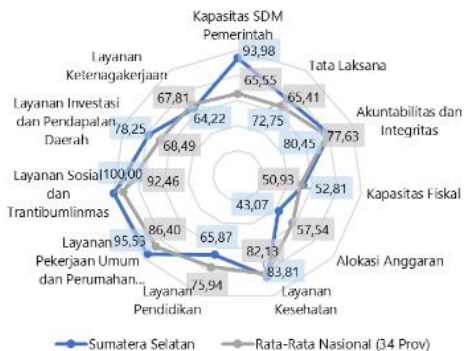
SKOR VARIABEL



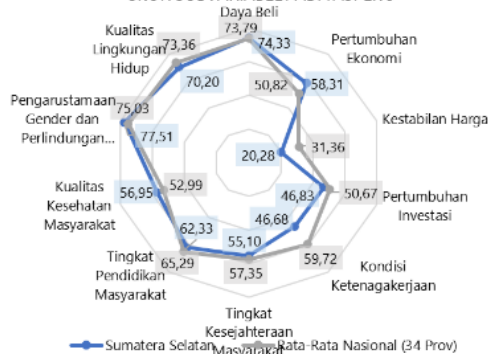
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Potensi pariwisata dapat dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan, untuk mendukung pembangunan potensi pariwisata perlu dilakukan: 1) mendorong kemajuan pembangunan pemuda; 2) peningkatan keamanan di masyarakat; dan 3) menanggulangi risiko bencana.
- Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan melakukan perbaikan pada: 1) Penerapan NSPK Manajemen ASN; 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan; 3) Kapasitas Fiskal Daerah; dan 4) peningkatan kinerja alokasi anggaran belanja daerah.
- Pelayanan pendidikan dioptimalkan sehingga mendorong kualitas tenaga kerja. Layanan pendidikan terkait budaya literasi, tingkat representasi masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, peningkatan angka partisipasi murni SMA/MA/Sederajat dan peningkatan pelatihan dan kompetensi pekerja.
- Pemerintah perlu meningkatkan kinerja capaian pembangunan ekonomi daerah melalui: 1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; 2) strategi menurunkan angka inflasi; 3) meningkatkan pertumbuhan investasi; 4) memperbaiki hubungan industrial dan lingkungan kerja.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		62,78
1	Sistem Pendukung		49,64
1.1	Kualitas Demokrasi		78,17
1.1.1	Kondisi Demokrasi		78,17
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	78,17	78,17
1.2	Dinamika Sosial		50,88
1.2.1	Kondisi Keamanan		35,41
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	214,00	57,11
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	1478,00	13,70
1.2.2	Kohesivitas Sosial		75,18
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,32	77,32
1.2.2.2	Modal Sosial	73,04	73,04
1.3	Potensi Daerah		43,69
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		51,34
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	12,28	51,34
1.3.2	Potensi Pariwisata		22,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,34	22,33
1.3.3	Kondisi Demografi		42,91
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	47,23	31,83
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	54,00	54,00
1.3.4	Kondisi Geografis		63,45
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	91,39	74,21
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	131,24	52,69
2	Kapasitas Pemerintahan		69,04
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		80,47
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		93,98
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	95,46
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		72,75
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	85,25	85,25
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,62	40,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	79,12	79,12
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	155,19	82,99
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,45
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,93	69,93
2.2	Kuangan Daerah		48,17
2.2.1	Kapasitas Fiskal		52,81
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,83	47,62
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,52	58,00
2.2.2	Alokasi Anggaran		43,07
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	18,57	92,86
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	86,13	31,23
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	12,25	35,18
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,35	17,27
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		77,74
2.3.1	Layanan Kesehatan		83,81
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	99,71	99,71
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	67,90	67,90
2.3.2	Layanan Pendidikan		65,87
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	63,11	63,11
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	68,64	68,64

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SUMATERA SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		95,53
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	93,57	93,57
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,92	92,24
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		78,25
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,25	85,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,29	71,50
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		64,22
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,70	97,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	3,79	25,25
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,61	36,10
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	6,80	68,02
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	5,97	59,70
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		59,00
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		51,71
3.1.1	Daya Beli		74,33
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	74,33
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		58,31
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,08	58,31
3.1.3	Kestabilan Harga		20,28
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,17	20,28
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		46,83
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	8,11	36,84
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	17,06	56,83
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		46,68
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,81	68,14
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	9,05	60,30
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,98	9,82
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		60,69
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		55,10
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	11,78	44,62
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,72	55,90
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,39	60,61
3.2.1.4	Gini Ratio	0,34	32,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	2,03	93,38
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		62,33
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,63	63,42
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	61,24	61,24
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		56,95
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,78	77,94
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	20,30	35,96
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		77,51
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	76,58	76,58
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	93,25	93,25
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	61,90	61,90
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		70,20
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		70,20
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	70,20	70,20

BENGKULU

58,41/66,13 – Cukup

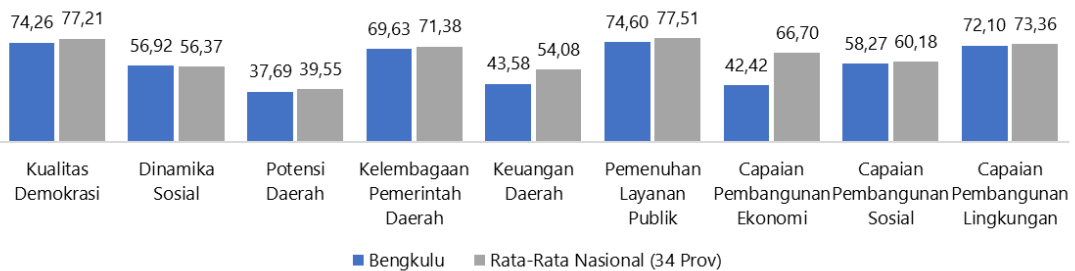
Aspek
Sistem Pendukung
46,44/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
64,54/69,63

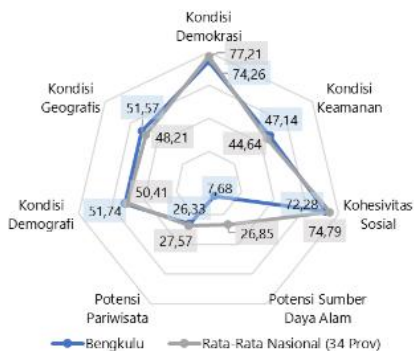
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
54,43/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

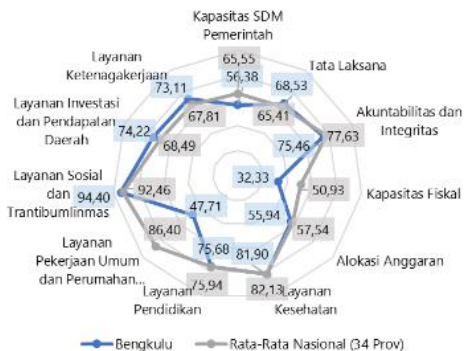
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Dukungan potensi daerah dibutuhkan Provinsi Bengkulu, peningkatan potensi daerah dapat dilakukan melalui: 1) pengelolaan sektor pariwisata; 2) mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah; dan 3) menanggulangi risiko bencana dengan menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif.
- Tantangan dalam peningkatan kapasitas fiskal menjadi salah satu yang perlu diintervensi. Selain itu, alokasi anggaran urusan lingkungan hidup dan alokasi belanja modal harapannya dapat ditingkatkan guna mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu.
- Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kinerja lebih rendah diantara lima pelayanan publik lainnya. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kondisi kemantapan jalan di Provinsi Bengkulu.
- Capaian ekonomi masih menjadi catatan dalam kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kestabilan Harga termasuk dalam sangat kurang, disusul dengan pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BENGKULU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		58,41
1	Sistem Pendukung		46,44
1.1	Kualitas Demokrasi		74,26
1.1.1	Kondisi Demokrasi		74,26
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	74,26	74,26
1.2	Dinamika Sosial		56,92
1.2.1	Kondisi Keamanan		47,14
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	290,00	41,88
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	5652,00	52,39
1.2.2	Kohesivitas Sosial		72,28
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	74,55	74,55
1.2.2.2	Modal Sosial	70,00	70,00
1.3	Potensi Daerah		37,69
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		7,68
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,84	7,68
1.3.2	Potensi Pariwisata		26,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,58	26,33
1.3.3	Kondisi Demografi		51,74
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,08	46,14
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	57,33	57,33
1.3.4	Kondisi Geografis		51,57
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	93,27	69,19
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	148,75	33,95
2	Kapasitas Pemerintahan		64,54
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		69,63
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		56,38
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	50,26
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	62,50	62,50
2.1.2	Tata Laksana		68,53
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	87,05	87,05
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,12	53,00
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	85,32	85,32
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	85,47	45,71
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,46
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,24	69,24
2.2	Kuangan Daerah		43,58
2.2.1	Kapasitas Fiskal		32,33
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,17	27,53
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,33	37,12
2.2.2	Alokasi Anggaran		55,94
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	15,00	75,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	97,95	89,84
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	18,28	54,51
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,08	3,78
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		74,60
2.3.1	Layanan Kesehatan		81,90
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	95,00	95,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	68,80	68,80
2.3.2	Layanan Pendidikan		75,68
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	91,53	91,53
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	59,83	59,83

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BENGKULU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		47,71
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	45,00	45,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	40,71	40,71
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,60	59,87
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		94,40
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	98,80	98,80
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	90,00	90,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		74,22
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,23	84,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,83	63,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,11
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,72	87,17
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,70	78,00
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,50	35,04
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,95	59,52
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,42	84,16
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		54,43
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		42,42
3.1.1	Daya Beli		73,52
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	73,52
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		30,51
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,26	30,51
3.1.3	Kestabilan Harga		22,29
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,09	22,29
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,66
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	3,62	32,77
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	31,46	62,55
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		41,95
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,93	69,26
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,54	50,27
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,45	4,50
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		58,27
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		43,88
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	14,04	33,99
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,14	45,13
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,52	47,47
3.2.1.4	Gini Ratio	0,33	33,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5,59	81,76
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		67,68
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,68	68,27
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	67,09	67,09
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		56,66
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	76,80
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	20,20	36,52
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		75,81
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	70,06	70,06
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	91,57	91,57
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,34	64,34
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		72,10
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		72,10
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	72,10	72,10

LAMPUNG

62,86/66,13 – Cukup

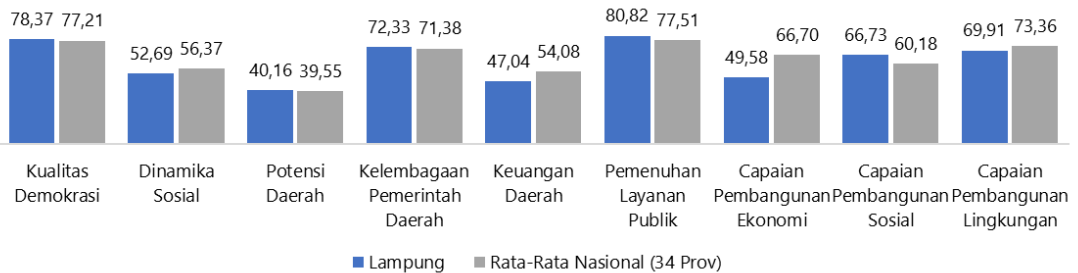
**Aspek
Sistem Pendukung**
47,72/47,93

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan**
69,50/69,63

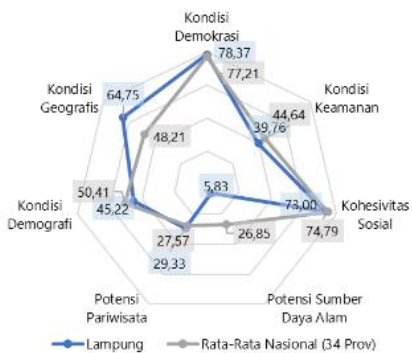
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah**
59,20/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

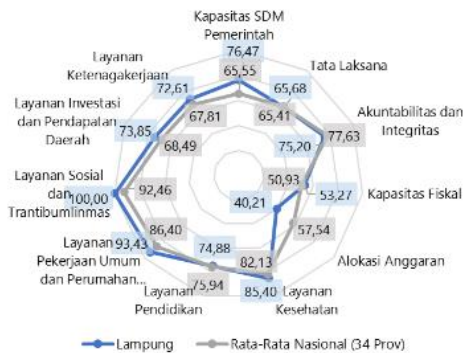
SKOR VARIABEL



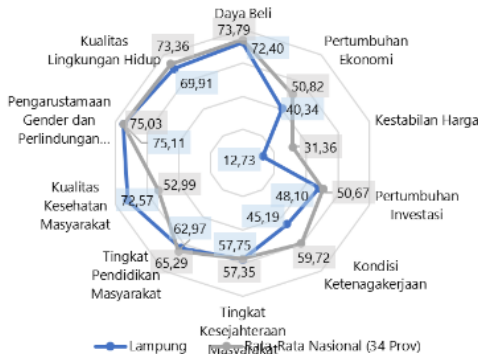
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Untuk mendukung aspek pendukung ekonomi, pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan perbaikan dalam hal: 1) peningkatan keamanan di lingkungan masyarakat; 2) keamanan dapat meningkatkan potensi daerah khususnya terkait pariwisata; 3) menyusun strategi terkait mitigasi kebencanaan; sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mengurangi rasio ketergantungan penduduk.
- Kapasitas kelembagaan dan keuangan yang mendukung tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan melalui: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah; 2) meningkatkan inovasi pemerintah daerah; 3) mendorong akuntabilitas dan integritas dalam menyelenggaran pemerintahan.
- Bidang ketenagakerjaan dalam implementasi maupun capaian perlu intervensi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan: 1) mendorong pelatihan dan kompetensi kerja; 2) mengharmoniasi hubungan industrial; 3) mempublikasikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal; dan 4) mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, gender dan anak perlu menjadi perhatian guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbaikan kualitas udara, air, tanah akan mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup di masyarakat.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI LAMPUNG

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		62,86
1	Sistem Pendukung		47,72
1.1	Kualitas Demokrasi		78,37
1.1.1	Kondisi Demokrasi		78,37
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	78,37	78,37
1.2	Dinamika Sosial		52,69
1.2.1	Kondisi Keamanan		39,76
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	190,00	61,92
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	1898,00	17,59
1.2.2	Kohesivitas Sosial		73,00
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	73,35	73,35
1.2.2.2	Modal Sosial	72,65	72,65
1.3	Potensi Daerah		40,16
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		5,83
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,40	5,83
1.3.2	Potensi Pariwisata		29,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,76	29,33
1.3.3	Kondisi Demografi		45,22
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	46,41	37,28
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	53,17	53,17
1.3.4	Kondisi Geografis		64,75
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	88,65	81,53
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	135,66	47,96
2	Kapasitas Pemerintahan		69,50
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		72,33
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		76,47
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	75,44
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		65,68
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	65,58	65,58
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,81	70,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	71,78	71,78
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	103,26	55,22
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,20
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	68,45	68,45
2.2	Kuangan Daerah		47,04
2.2.1	Kapasitas Fiskal		53,27
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,73	44,39
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,56	62,15
2.2.2	Alokasi Anggaran		40,21
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	15,00	75,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	85,12	26,23
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	16,94	50,20
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,26	12,49
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		80,82
2.3.1	Layanan Kesehatan		85,40
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	70,80	70,80
2.3.2	Layanan Pendidikan		74,88
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	90,51	90,51
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	59,25	59,25

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI LAMPUNG

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		47,71
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	45,00	45,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	40,71	40,71
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,60	59,87
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		94,40
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	98,80	98,80
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	90,00	90,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		74,22
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,23	84,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,83	63,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,11
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,72	87,17
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,70	78,00
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,50	35,04
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,95	59,52
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,42	84,16
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		54,43
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		42,42
3.1.1	Daya Beli		73,52
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	73,52
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		30,51
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,26	30,51
3.1.3	Kestabilan Harga		22,29
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,09	22,29
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,66
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	3,62	32,77
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	31,46	62,55
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		41,95
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,93	69,26
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,54	50,27
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,45	4,50
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		58,27
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		43,88
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	14,04	33,99
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,14	45,13
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,52	47,47
3.2.1.4	Gini Ratio	0,33	33,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5,59	81,76
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		67,68
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,68	68,27
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	67,09	67,09
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		56,66
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	76,80
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	20,20	36,52
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		75,81
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	70,06	70,06
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	91,57	91,57
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,34	64,34
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		72,10
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		72,10
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	72,10	72,10

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

68,26/66,13 – Cukup

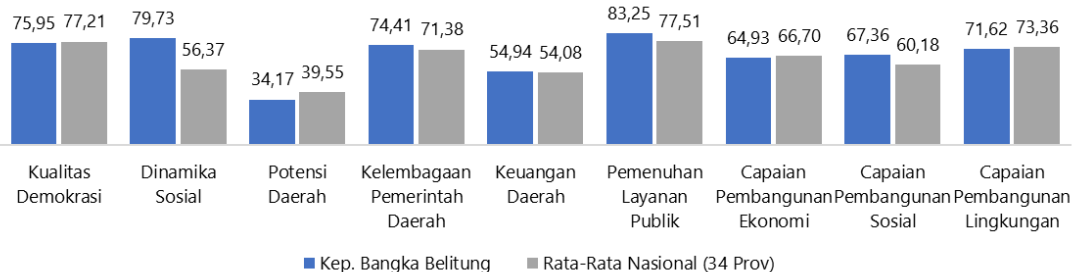
Aspek
Sistem Pendukung
49,15/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
73,56/69,63

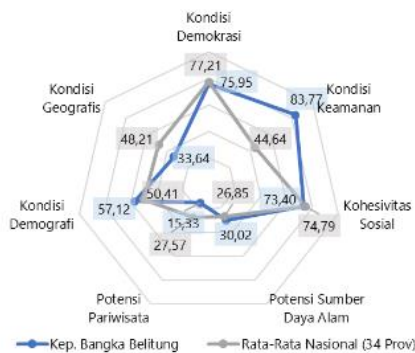
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
67,38/67,17

Ket: **Skor Provinsi**/Rata-rata Nasional

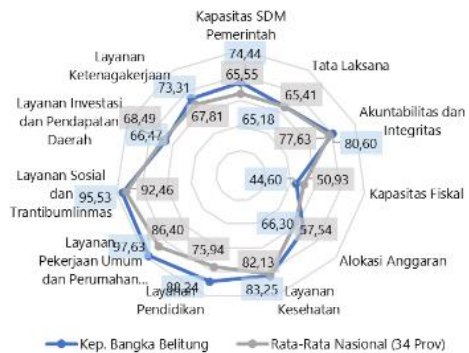
SKOR VARIABEL



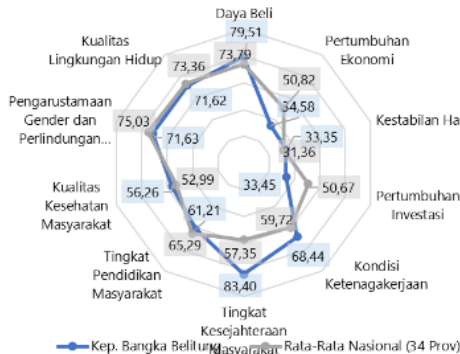
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Walaupun potensi sumber daya alam dan dukungan geografis yang tinggi, pemerintah Kep. Bangka Belitung dapat mengembangkan potensi pariwisata. Pengembangan pariwisata dapat menjadi peluang untuk meningkatkan peran pemuda dan rasio ketergantungan masyarakat di daerah.
- Kapasitas fiskal masih menjadi perhatian dalam mendorong kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dan inovasi daerah menjadi sasaran dalam memperkuat tata laksana pemerintahan Kab. Bangka Belitung.
- Capaian kinerja perekonomian, kestabilan harga, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh Pemerintah Kab. Bangka Belitung. Inovasi dalam tata laksana dapat menjadi pintu masuk guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		68,26
1	Sistem Pendukung		49,15
1.1	Kualitas Demokrasi		75,95
1.1.1	Kondisi Demokrasi		75,95
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	75,95	75,95
1.2	Dinamika Sosial		79,73
1.2.1	Kondisi Keamanan		83,77
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	162,00	67,54
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	14263,00	100,00
1.2.2	Kohesivitas Sosial		73,40
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	75,92	75,92
1.2.2.2	Modal Sosial	70,87	70,87
1.3	Potensi Daerah		34,17
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		30,02
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	7,18	30,02
1.3.2	Potensi Pariwisata		15,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	1,92	15,33
1.3.3	Kondisi Demografi		57,12
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	42,77	61,56
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	52,67	52,67
1.3.4	Kondisi Geografis		33,64
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	103,94	40,67
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	155,61	26,61
2	Kapasitas Pemerintahan		73,56
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		74,41
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		74,44
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	71,39
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		65,18
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	92,07	92,07
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,14	53,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	75,26	75,26
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	68,00	36,36
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,60
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	70,37	70,37
2.2	Kuangan Daerah		54,94
2.2.1	Kapasitas Fiskal		44,60
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,76	45,27
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,40	43,92
2.2.2	Alokasi Anggaran		66,30
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	14,64	73,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	91,56	58,16
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	16,61	49,15
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,75	85,85
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		83,25
2.3.1	Layanan Kesehatan		83,25
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	66,50	66,50
2.3.2	Layanan Pendidikan		88,24
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	98,98	98,98
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	77,50	77,50

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		97,63
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,92	91,67
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		95,53
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	91,73	91,73
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	99,33	99,33
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		66,47
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,43	68,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,86	64,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,31
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,37	93,71
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,20	74,69
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,74	27,38
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	7,43	74,31
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,40	74,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		67,38
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		64,93
3.1.1	Daya Beli		79,51
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,80	79,51
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		34,58
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,38	34,58
3.1.3	Kestabilan Harga		33,35
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,65	33,35
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		33,45
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	20,76	48,30
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-79,01	18,60
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		68,44
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,40	73,99
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	11,86	79,08
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,14	51,41
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		67,36
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		83,40
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	4,52	78,75
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,63	83,85
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	86,87
3.2.1.4	Gini Ratio	0,25	51,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		61,21
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,62	61,69
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,72	60,72
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		56,26
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,79	78,82
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	20,70	33,71
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		71,63
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	58,22	58,22
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	89,84	89,84
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,19	64,19
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		71,62
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		71,62
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	71,62	71,62

KEPULAUAN RIAU

69,23/66,13 – Cukup

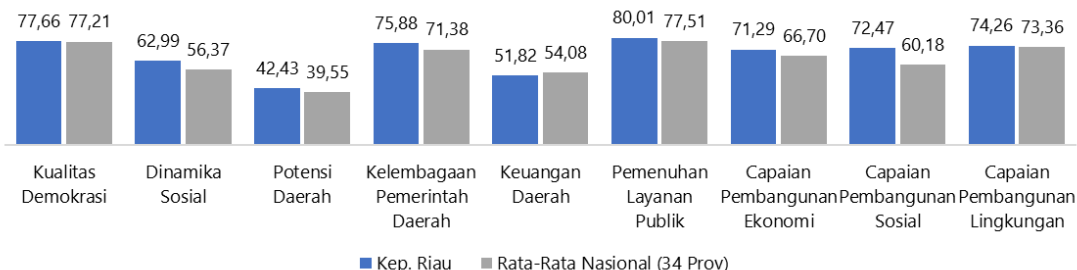
Aspek
Sistem Pendukung
51,29/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
70,92/69,63

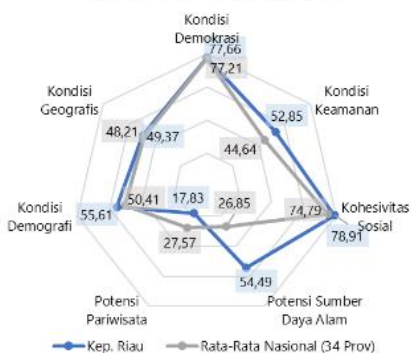
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
72,40/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

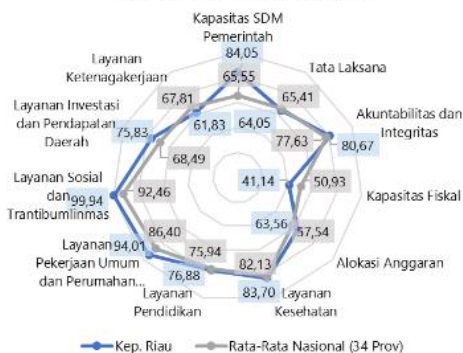
SKOR VARIABEL



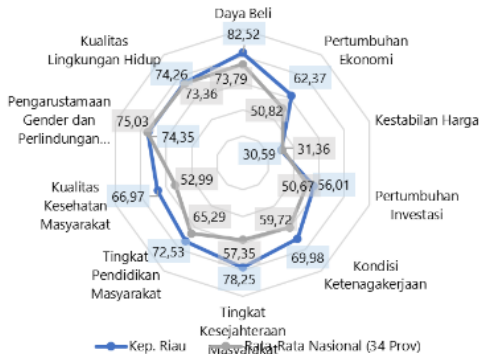
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Letak geografis yang sulit menjadi salah satu kendala untuk mendukung potensi daerah di Kepulauan Riau. Kesulitan geografis dapat berkontribusi pada rendahnya potensi pariwisata. Selain juga memperbaiki tingkat keamanan di lingkungan sosial masyarakat.
- Kondisi kapasitas fiskal Kepulauan Riau cukup rendah. Namun, realiasi anggaran belanja dan anggaran yang dimandatkan telah di implementasikan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dengan baik.
- Pelayanan ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah dapat menambah daftar pelatihan dan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disamping itu perbaikan hubungan industrial dan lingkungan kerja juga dapat mendorong kinerja pelayanan tenaga kerja. Dibutuhkan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
- Capaian pembangunan ekonomi lebih rendah daripada dua capaian pembangunan lainnya. Pemerintah harapannya dapat melakukan intervensi untuk menciptakan kestabilan harga dalam pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KEP. RIAU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		69,23
1	Sistem Pendukung		51,29
1.1	Kualitas Demokrasi		77,66
1.1.1	Kondisi Demokrasi		77,66
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	77,66	77,66
1.2	Dinamika Sosial		62,99
1.2.1	Kondisi Keamanan		52,85
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	259,00	48,10
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	6215,00	57,61
1.2.2	Kohesivitas Sosial		78,91
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	83,58	83,58
1.2.2.2	Modal Sosial	74,23	74,23
1.3	Potensi Daerah		42,43
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		54,49
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	13,04	54,49
1.3.2	Potensi Pariwisata		17,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,07	17,83
1.3.3	Kondisi Demografi		55,61
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	43,62	55,90
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,33	55,33
1.3.4	Kondisi Geografis		49,37
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	111,32	20,95
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	107,79	77,79
2	Kapasitas Pemerintahan		70,92
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		75,88
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		84,05
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	90,60
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		64,05
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	86,74	86,74
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,68	42,00
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	90,11	90,11
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	62,33	33,33
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,67
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	70,58	70,58
2.2	Kuangan Daerah		51,82
2.2.1	Kapasitas Fiskal		41,14
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,59	40,30
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,38	41,97
2.2.2	Alokasi Anggaran		63,56
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,29	96,43
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	96,49	82,60
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	14,01	40,80
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,73	35,87
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		80,01
2.3.1	Layanan Kesehatan		83,70
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	67,40	67,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		76,88
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	91,24	91,24
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	62,52	62,52

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KEP. RIAU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		94,01
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	98,54	98,54
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,81	80,78
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,94
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	99,88	99,88
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		75,83
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,35	87,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,88	64,67
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		61,83
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,19	81,86
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	4,91	32,74
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,28	32,78
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	3,00	30,00
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		72,40
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		71,29
3.1.1	Daya Beli		82,52
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,83	82,52
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		62,37
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20	62,37
3.1.3	Kestabilan Harga		30,59
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,76	30,59
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		56,01
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	45,61	70,83
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-22,25	41,18
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		69,98
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,34	73,41
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	14,26	95,08
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,00	40,00
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		72,47
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		78,25
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	5,69	73,25
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,82	78,97
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,18	81,82
3.2.1.4	Gini Ratio	0,34	32,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		72,53
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,71	70,95
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	74,11	74,11
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		66,97
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,78	78,32
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	16,80	55,62
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		74,35
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	58,83	58,83
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	93,96	93,96
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	67,28	67,28
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		74,26
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		74,26
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	74,26	74,26

DKI JAKARTA

75,91/66,13 – Baik

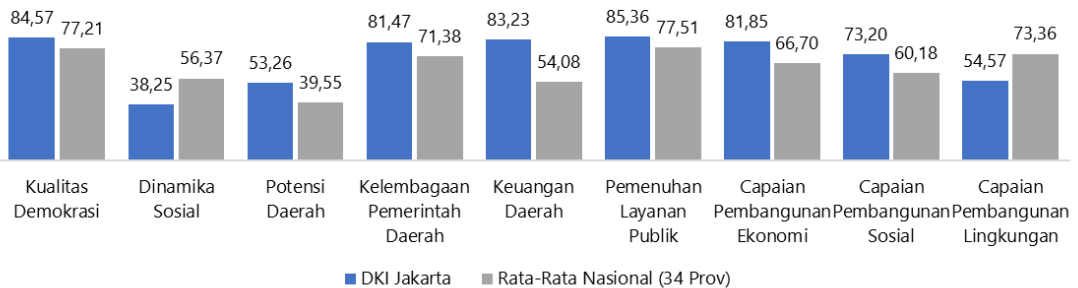
Aspek
Sistem Pendukung
54,12/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
84,25/69,63

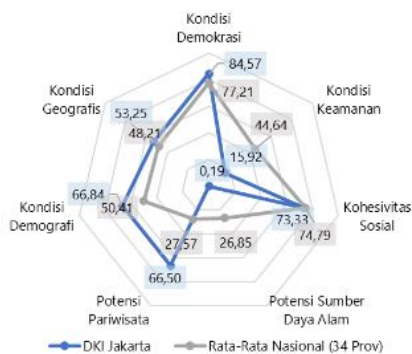
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
72,11/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

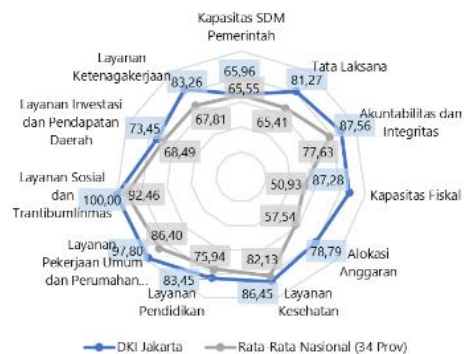
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- DKI Jakarta memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi, namun untuk menunjang potensi pariwisata berkelanjutan beberapa perbaikan perlu dilakukan: 1) meningkatkan keamanan dan upaya mengurangi intensitas tindakan kriminalitas; 2) Meningkatkan aksesibilitas menuju ke destinasi wisata; dan 3) melibatkan peran pemuda agar lebih kreatif dan produktif.
- Peningkatan Kinerja pelayanan publik pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dukung dengan: 1) penambahan rasio ASN terhadap jumlah penduduk; dan 2) meningkatkan alokasi anggaran belanja khususnya belanja modal.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu meningkatkan pelayanan investasi guna mendukung perekonomian daerah: 1) kondisi hubungan industrial; 2) mendorong produktivitas tenaga kerja; 3) meningkatkan strategi pertumbuhan ekonomi; dan 4) meningkatkan kualitas pelayanan investasi baik dalam negeri maupun investasi asing.
- Perbaikan lingkungan hidup perlu menjadi perhatian, upaya perbaikan dilakukan dengan: 1) peningkatan efektivitas anggaran urusan lingkungan hidup untuk rehabilitasi kerusakan lingkungan, 2) mengalokasikan anggaran belanja dan modal untuk peningkatan kualitas udara, air, dan tanah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI DKI JAKARTA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		75,91
1	Sistem Pendukung		54,12
1.1	Kualitas Demokrasi		84,57
1.1.1	Kondisi Demokrasi		84,57
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	84,57	84,57
1.2	Dinamika Sosial		38,25
1.2.1	Kondisi Keamanan		15,92
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	357,00	28,46
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	364,00	3,37
1.2.2	Kohesivitas Sosial		73,33
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	76,47	76,47
1.2.2.2	Modal Sosial	70,18	70,18
1.3	Potensi Daerah		53,26
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,19
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,05	0,19
1.3.2	Potensi Pariwisata		66,50
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	4,99	66,50
1.3.3	Kondisi Demografi		66,84
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	39,82	81,19
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	52,50	52,50
1.3.4	Kondisi Geografis		53,25
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	116,73	6,49
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	61,31	100,00
2	Kapasitas Pemerintahan		84,25
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		81,47
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		65,96
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	39,42
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		81,27
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	89,60	89,60
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	4,21	80,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	73,00	73,00
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	152,46	81,53
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		87,56
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90,00	85,71
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	76,96	76,96
2.2	Kuangan Daerah		83,23
2.2.1	Kapasitas Fiskal		87,28
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	3,41	95,73
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,71	78,83
2.2.2	Alokasi Anggaran		78,79
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	92,55	63,06
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	18,37	54,78
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	4,15	100,00
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		85,36
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,45
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	72,90	72,90
2.3.2	Layanan Pendidikan		83,45
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	95,92	95,92
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	70,99	70,99

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI DKI JAKARTA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		97,80
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	96,08	96,08
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,97	97,27
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		73,45
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,42	68,40
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,71	78,50
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		83,26
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,98	99,75
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,44	82,93
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	5,72	57,15
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	7,09	70,95
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,18	91,81
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		72,11
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		81,85
3.1.1	Daya Beli		90,34
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,90	90,34
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		54,24
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,96	54,24
3.1.3	Kestabilan Harga		42,66
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,28	42,66
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,08
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	6,28	35,18
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	22,48	58,98
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		78,85
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,82	78,21
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	14,12	94,11
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,35	63,50
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		73,20
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		80,77
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	4,44	79,13
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,70	82,05
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,18	81,82
3.2.1.4	Gini Ratio	0,43	13,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		68,00
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,75	75,19
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,81	60,81
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		66,83
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,83	82,54
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	17,60	51,12
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		80,97
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	76,31	76,31
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	95,24	95,24
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	70,11	70,11
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		54,57
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		54,57
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	54,57	54,57

JAWA BARAT

70,75/66,13 – Baik

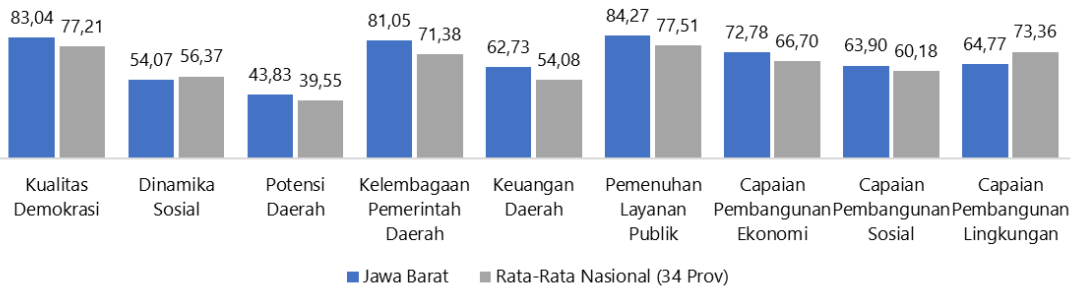
Aspek
Sistem Pendukung
51,02/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
77,31/69,63

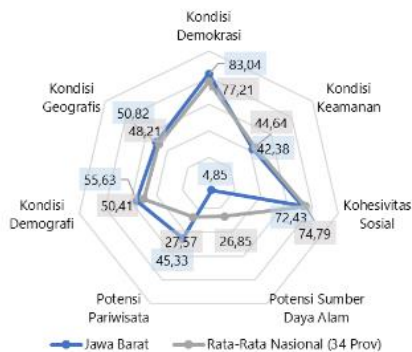
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
68,52/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

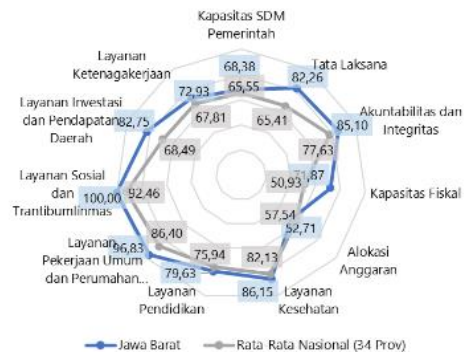
SKOR VARIABEL



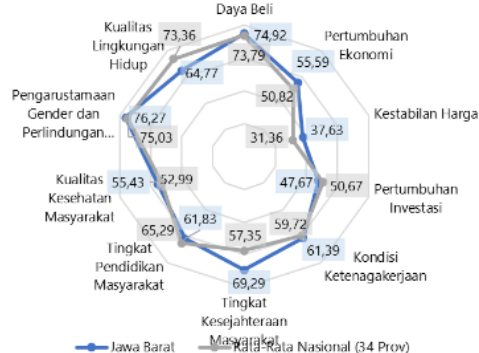
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Potensi pariwisata di Jawa Barat dapat mendorong perekonomian daerah, namun perlu meningkatkan: 1) menurunkan angka kriminalitas dengan memperkuat keamanan di lingkungan masyarakat khususnya area pariwisata; 2) meningkatkan akses destinasi wisata; dan 3) memberdayakan pemuda lokal dalam pengembangan pariwisata.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan tata kelola kelembagaan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan dapat dilakukan melalui: 1) menyesuaikan rasio ideal ASN dengan jumlah penduduk; dan 2) meningkatkan integritas sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi.
- Capaian pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan dengan: 1) meningkatkan serapan anggaran belanja modal untuk mendukung infrastruktur; 2) mendorong program wajib belajar 12 tahun; 3) melakukan edukasi dan intervensi untuk mengurangi angka stunting di Jawa Barat.
- Pembangunan ekonomi juga perlu didukung dengan: 1) menyusun strategi kebijakan fiskal untuk menurunkan inflasi; 2) meningkatkan produktivitas tenaga lokal; dan 3) mempromosikan potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		70,75
1	Sistem Pendukung		51,02
1.1	Kualitas Demokrasi		83,04
1.1.1	Kondisi Demokrasi		83,04
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	83,04	83,04
1.2	Dinamika Sosial		54,07
1.2.1	Kondisi Keamanan		42,38
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	108,00	78,36
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	690,00	6,40
1.2.2	Kohesivitas Sosial		72,43
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	74,10	74,10
1.2.2.2	Modal Sosial	70,76	70,76
1.3	Potensi Daerah		43,83
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		4,85
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,16	4,85
1.3.2	Potensi Pariwisata		45,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	3,72	45,33
1.3.3	Kondisi Demografi		55,63
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	42,99	60,09
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	51,17	51,17
1.3.4	Kondisi Geografis		50,82
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	104,08	40,30
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	123,16	61,34
2	Kapasitas Pemerintahan		77,31
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		81,05
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		68,38
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	44,25
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		82,26
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96,77	96,77
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	4,14	78,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	81,08	81,08
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	132,92	71,08
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		85,10
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90,00	85,71
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,60	69,60
2.2	Kuangan Daerah		62,73
2.2.1	Kapasitas Fiskal		71,87
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,46	66,65
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,69	77,08
2.2.2	Alokasi Anggaran		52,71
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	95,56	77,99
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	7,50	19,93
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,34	16,82
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		84,27
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,15
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	72,30	72,30
2.3.2	Layanan Pendidikan		79,63
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	99,24	99,24
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	60,02	60,02

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		96,83
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,89	88,82
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		82,75
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,65	93,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,35	72,50
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		72,93
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,63	86,30
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	8,27	55,15
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	4,21	42,07
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,95	59,50
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		68,52
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		72,78
3.1.1	Daya Beli		74,92
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,75	74,92
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		55,59
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	55,59
3.1.3	Kestabilan Harga		37,63
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,48	37,63
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,67
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	8,19	36,91
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	21,12	58,44
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		61,39
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,30	63,04
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	9,75	64,98
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,59	55,89
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		63,90
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		69,29
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	7,62	64,17
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,17	70,00
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27	72,73
3.2.1.4	Gini Ratio	0,43	15,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		61,83
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,65	64,66
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	59,01	59,01
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		55,43
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,83	82,77
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	21,70	28,09
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,27
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	71,74	71,74
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	90,23	90,23
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	65,61	65,61
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		64,77
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		64,77
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	64,77	64,77

JAWA TENGAH

67,81/66,13 – *Cukup*

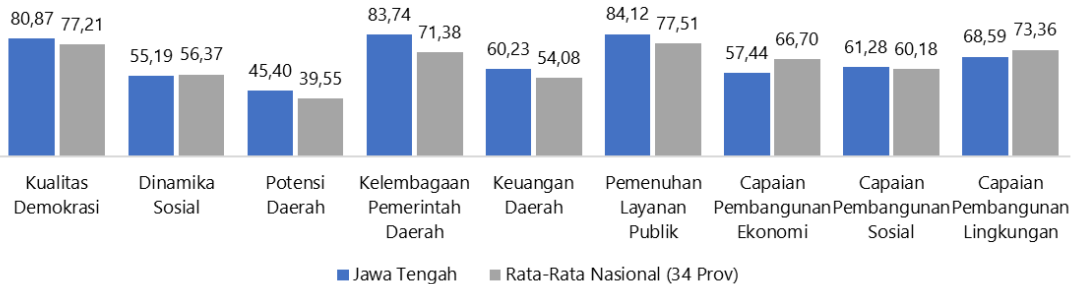
Aspek
Sistem Pendukung
52,02/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
76,78/69,63

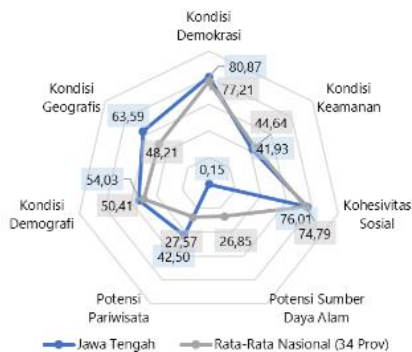
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
61,49/67,17

Ket: **Skor Provinsi**/Rata-rata Nasional

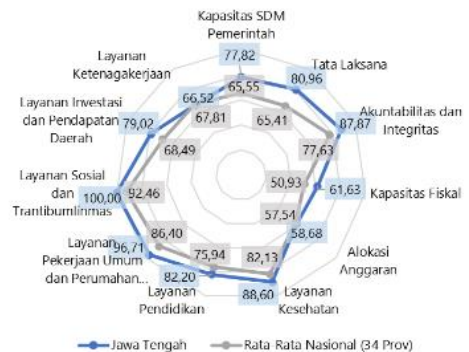
SKOR VARIABEL



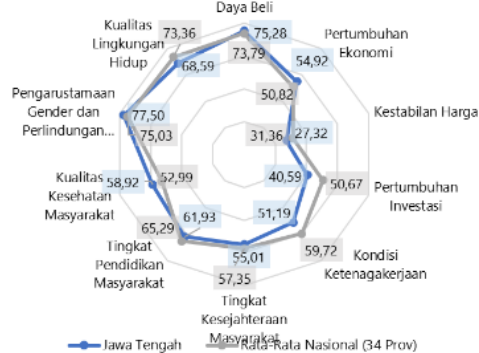
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Pertumbuhan investasi daerah patut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Investasi daerah dapat mendorong berbagai sektor perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1) peningkatan keamanan di lingkungan masyarakat; 2) peningkatan pelayanan ketenagakerjaan (terkait hubungan industrial, lingkungan kerja dan produktivitasnya); 3) membangun konektivitas sehingga meningkatkan efisiensi pelaku usaha.
- Tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan melalui: 1) menyesuaikan sebaran rasio ideal ASN dengan jumlah penduduk; 2) meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) pengelolaan alokasi belanja modal lebih optimal.
- Capaian tingkat kesejahteraan masyarakat harapannya dapat ditingkatkan melalui: 1) mengimplementasikan kebijakan maupun strategi untuk mengurangi angka keparahan dan kedalaman kemiskinan; 2) meningkatkan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun; dan 3) mengurangi angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah.
- Sebagai daerah yang terdampak perubahan iklim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan alokasi anggaran terkait urusan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga harapannya dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam sektor air, tanah dan udara di wilayah Jawa Tengah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		67,81
1	Sistem Pendukung		52,02
1.1	Kualitas Demokrasi		80,87
1.1.1	Kondisi Demokrasi		80,87
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	80,87	80,87
1.2	Dinamika Sosial		55,19
1.2.1	Kondisi Keamanan		41,93
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	115,00	76,95
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	745,00	6,91
1.2.2	Kohesivitas Sosial		76,01
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,90	77,90
1.2.2.2	Modal Sosial	74,12	74,12
1.3	Potensi Daerah		45,40
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,15
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,04	0,15
1.3.2	Potensi Pariwisata		42,50
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	3,55	42,50
1.3.3	Kondisi Demografi		54,03
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	44,12	52,55
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,50	55,50
1.3.4	Kondisi Geografis		63,59
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	100,19	50,69
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	109,01	76,49
2	Kapasitas Pemerintahan		76,78
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		83,74
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		77,82
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	63,13
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		80,96
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,52	94,52
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	4,26	81,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	84,55	84,55
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	115,74	61,89
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		87,87
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90,00	85,71
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	77,91	77,91
2.2	Kuangan Daerah		60,23
2.2.1	Kapasitas Fiskal		61,63
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,82	47,29
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,68	75,98
2.2.2	Alokasi Anggaran		58,68
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	93,88	69,66
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	7,21	18,99
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,00	48,85
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		84,12
2.3.1	Layanan Kesehatan		88,60
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	77,20	77,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		82,20
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	100,00	100,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	64,40	64,40

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA TENGAH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		96,71
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,88	88,40
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		79,02
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,01	80,20
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,67	77,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		66,52
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,50	95,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	6,83	45,54
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,38	33,77
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	3,75	37,46
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,23	92,28
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		61,49
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		57,44
3.1.1	Daya Beli		75,28
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,75	75,28
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		54,92
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,98	54,92
3.1.3	Kestabilan Harga		27,32
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,89	27,32
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		40,59
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	24,24	51,46
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-51,06	29,72
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		51,19
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,10	71,03
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	8,56	57,08
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,41	24,13
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		61,28
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		55,01
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	10,77	49,37
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,75	55,13
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,42	57,58
3.2.1.4	Gini Ratio	0,37	26,20
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,41	98,66
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		61,93
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,62	62,39
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	61,46	61,46
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		58,92
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,84	84,14
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	20,70	33,71
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		77,50
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	74,18	74,18
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	92,87	92,87
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,34	64,34
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		68,59
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		68,59
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	68,59	68,59

DI YOGYAKARTA

71,43/66,13 – Baik

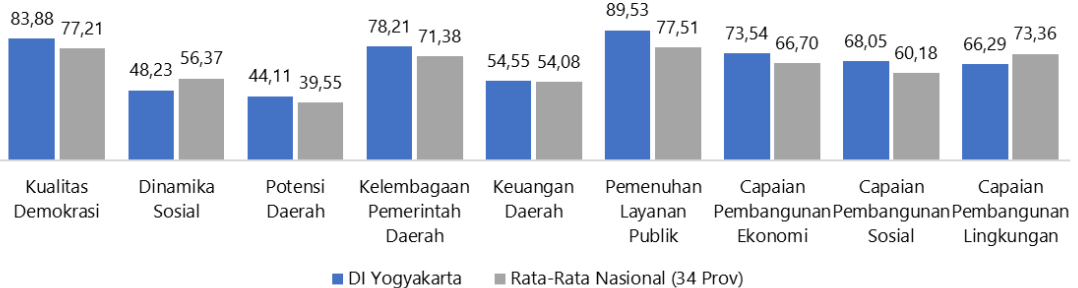
Aspek
Sistem Pendukung
50,09/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
77,51/69,63

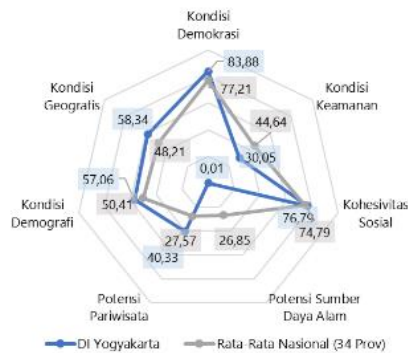
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
70,25/67,17

Ket: **Skor Provinsi**/Rata-rata Nasional

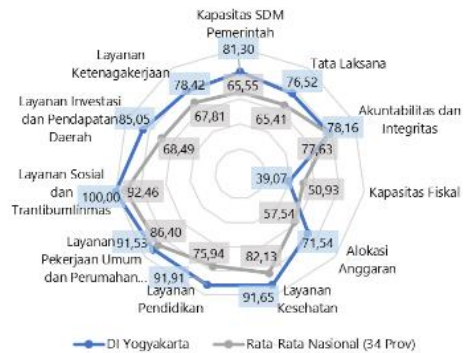
SKOR VARIABEL



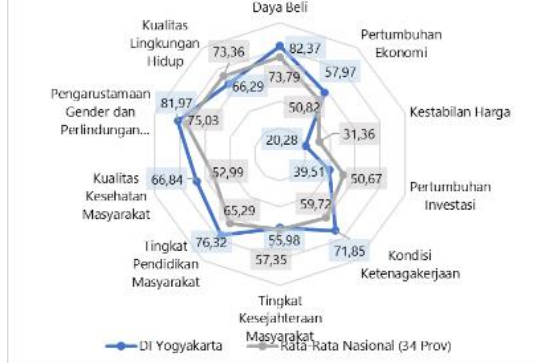
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Perekonomian daerah di DI Yogyakarta didominasi oleh potensi pariwisata yang tinggi. Namun, faktor pendukung perlu dilakukan perbaikan, diantaranya kondisi keamanan dan kondisi geografis. Perbaikan tersebut dapat mendorong peluang pertumbuhan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Bidang ketenagakerjaan juga menjadi tantangan dalam tata kelola di DI Yogyakarta, perbaikan dapat dilakukan terkait: 1) mendorong hubungan industrial yang harmonis; 2) meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang nyaman; 3) membuka program untuk meningkatkan kesempatan kerja; dan 4) memberikan pelatihan guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.
- Isu kesehatan kemiskinan juga patut menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut diantaranya: 1) menyusun kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan; 2) memberikan prioritas pembangunan bagi kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI DI YOGYAKARTA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		71,43
1	Sistem Pendukung		50,09
1.1	Kualitas Demokrasi		83,88
1.1.1	Kondisi Demokrasi		83,88
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	83,88	83,88
1.2	Dinamika Sosial		48,23
1.2.1	Kondisi Keamanan		30,05
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	320,00	35,87
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2614,00	24,23
1.2.2	Kohesivitas Sosial		76,79
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	79,56	79,56
1.2.2.2	Modal Sosial	74,01	74,01
1.3	Potensi Daerah		44,11
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,01
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,00	0,01
1.3.2	Potensi Pariwisata		40,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	3,42	40,33
1.3.3	Kondisi Demografi		57,06
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,88	40,78
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	73,33	73,33
1.3.4	Kondisi Geografis		58,34
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	104,46	39,28
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	108,15	77,41
2	Kapasitas Pemerintahan		77,51
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		78,21
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		81,30
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	85,10
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		76,52
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	94,18	94,18
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	4,22	80,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	88,37	88,37
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	77,09	41,22
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		78,16
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	77,33	77,33
2.2	Kuangan Daerah		54,55
2.2.1	Kapasitas Fiskal		39,07
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,42	35,00
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,39	43,14
2.2.2	Alokasi Anggaran		71,54
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	94,84	74,42
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	14,34	41,87
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,47	72,06
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		89,53
2.3.1	Layanan Kesehatan		91,65
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	83,30	83,30
2.3.2	Layanan Pendidikan		91,91
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	98,72	98,72
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	85,09	85,09

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI DI YOGYAKARTA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		91,53
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,70	70,18
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		85,05
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,68	93,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,59	76,50
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		78,42
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,55	95,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,03	80,19
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,56	35,56
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	6,52	65,23
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		70,25
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		73,54
3.1.1	Daya Beli		82,37
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,82	82,37
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		57,97
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,07	57,97
3.1.3	Kestabilan Harga		20,28
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,17	20,28
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		39,51
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	54,64	79,02
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-147,55	0,00
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		71,85
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	8,19	81,89
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,34	68,93
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,44	64,35
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		68,05
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		55,98
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	11,04	48,10
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,72	55,90
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,38	61,62
3.2.1.4	Gini Ratio	0,45	10,20
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		76,32
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,76	76,27
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	76,37	76,37
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		66,84
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,85	84,80
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	18,00	48,88
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		81,97
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	78,46	78,46
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	94,93	94,93
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	71,48	71,48
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		66,29
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		66,29
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	66,29	66,29

JAWA TIMUR

69,47/66,13 – Cukup

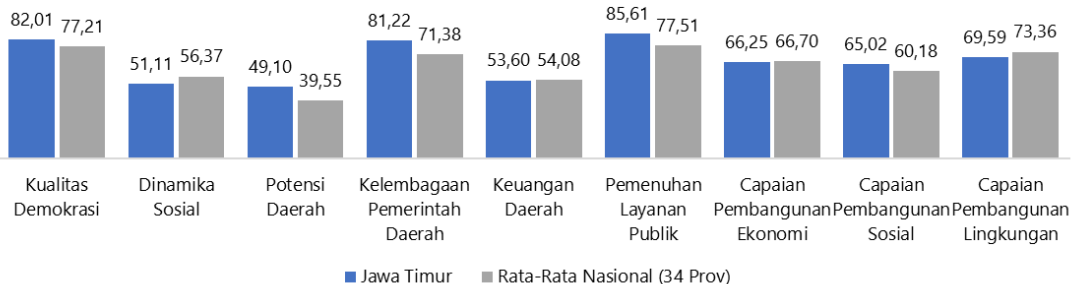
**Aspek
Sistem Pendukung
53,75/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
75,32/69,63**

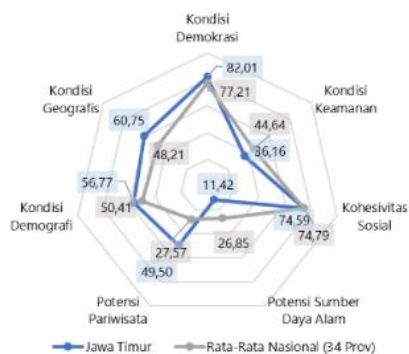
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
66,93/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

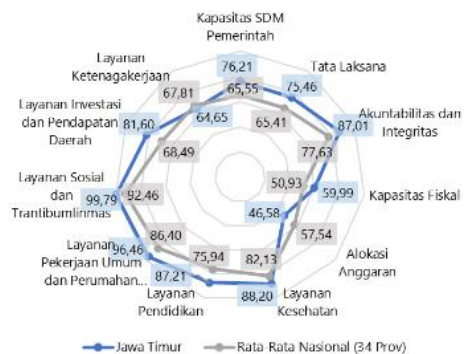
SKOR VARIABEL



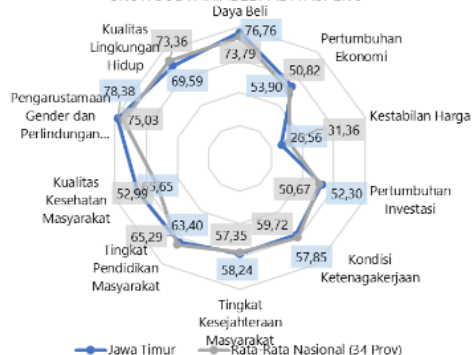
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Pembangunan kepemudaan dapat didorong lebih optimal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui: 1) peningkatan kapasitas pelatihan dan kompetensi kerja; 2) harmonisasi kondisi hubungan industrial; 3) peningkatan kondisi lingkungan kerja; 4) penciptaan lapangan pekerjaan yang luas; dan 5) pemberdayaan pembangunan pemuda yang dapat mendorong produktivitas tenaga kerja.
- Bidang pariwisata di Jawa Timur juga membutuhkan dorongan berupa: 1) tingkat keamanan yang perlu diperlu diperkuat sehingga intensitas kejadian kejahatan berkurang; 2) mitigasi risiko penanggulangan bencana perlu ditingkatkan; 3) promosi potensi daerah sebagai pendorong laju investasi; dan 4) penurunan inflasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Kapasitas fiskal dan anggaran dioptimalkan agar sasaran pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai dengan meningkatkan efektivitas realisasi belanja anggaran dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan lingkungan.
- Ketimpangan sosial juga masih menjadi agenda perbaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proporsi penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan perlu diselesaikan. Pada bidang pendidikan pemerintah perlu mendorong kebijakan wajib belajar 12 tahun sehingga tingkat representasi masyarakat mengakses pendidikan formal dan partisipasi murni SMA/MA/ Sederajat dapat meningkat.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		69,47
1	Sistem Pendukung		53,75
1.1	Kualitas Demokrasi		82,01
1.1.1	Kondisi Demokrasi		82,01
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	82,01	82,01
1.2	Dinamika Sosial		51,11
1.2.1	Kondisi Keamanan		36,16
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	160,00	67,94
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	472,00	4,37
1.2.2	Kohesivitas Sosial		74,59
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,55	77,55
1.2.2.2	Modal Sosial	71,62	71,62
1.3	Potensi Daerah		49,10
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		11,42
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	2,73	11,42
1.3.2	Potensi Pariwisata		49,50
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	3,97	49,50
1.3.3	Kondisi Demografi		56,77
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	43,44	57,04
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	56,50	56,50
1.3.4	Kondisi Geografis		60,75
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	98,47	55,29
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	118,61	66,21
2	Kapasitas Pemerintahan		75,32
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		81,22
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		76,21
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	59,92
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		75,46
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	88,81	88,81
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,62	65,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	77,07	77,07
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	128,19	68,55
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		87,01
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90,00	85,71
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	75,33	75,33
2.2	Kuangan Daerah		53,60
2.2.1	Kapasitas Fiskal		59,99
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,87	48,63
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,64	71,35
2.2.2	Alokasi Anggaran		46,58
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	92,31	61,87
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	7,53	20,01
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,16	7,59
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		85,61
2.3.1	Layanan Kesehatan		88,20
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	76,40	76,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		87,21
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	99,24	99,24
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	75,18	75,18

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI JAWA TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		96,46
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	98,78	98,78
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,89	89,10
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,79
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	99,57	99,57
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		81,60
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,51	90,20
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,38	73,00
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		64,65
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,53	95,32
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	6,66	44,38
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,16	31,61
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	2,90	29,05
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,33	93,28
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,95	99,51
3	Capaian Pembangunan Daerah		66,93
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		66,25
3.1.1	Daya Beli		76,76
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,77	76,76
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		53,90
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,95	53,90
3.1.3	Kestabilan Harga		26,56
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,92	26,56
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		52,30
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	12,79	41,08
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	33,89	63,52
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		57,85
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,41	74,10
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	8,07	53,79
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,50	45,01
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		65,02
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		58,24
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	10,35	51,34
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,63	58,21
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,37	62,63
3.2.1.4	Gini Ratio	0,39	22,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		63,40
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,64	64,20
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	62,59	62,59
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		65,65
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,80	80,17
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	17,60	51,12
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		78,38
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	74,90	74,90
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	92,15	92,15
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	67,03	67,03
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		69,59
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		69,59
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	69,59	69,59

BANTEN

71,29/66,13 – Baik

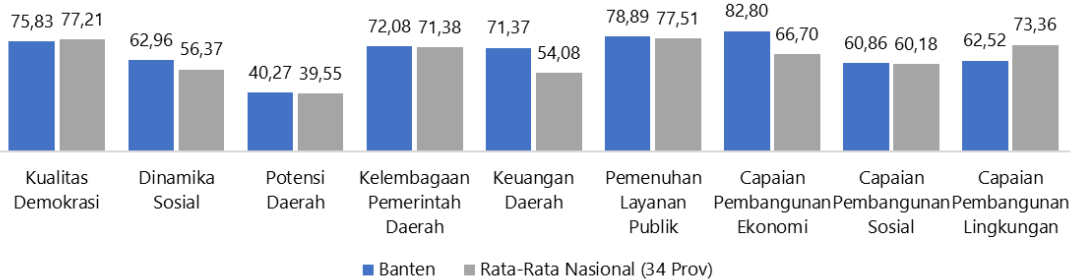
Aspek
Sistem Pendukung
49,62/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
75,78/69,63

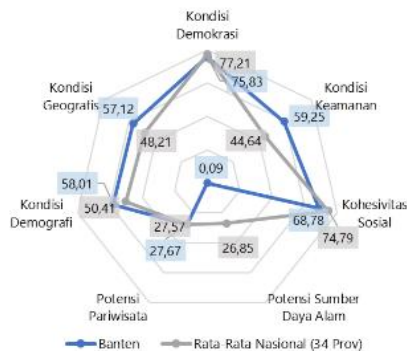
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
72,14/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

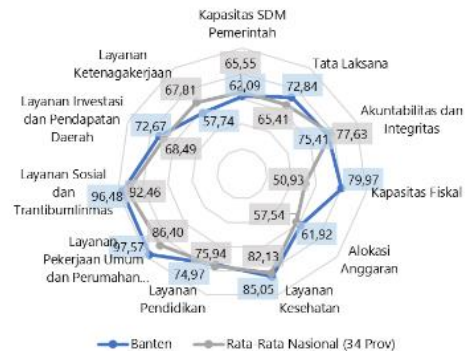
SKOR VARIABEL



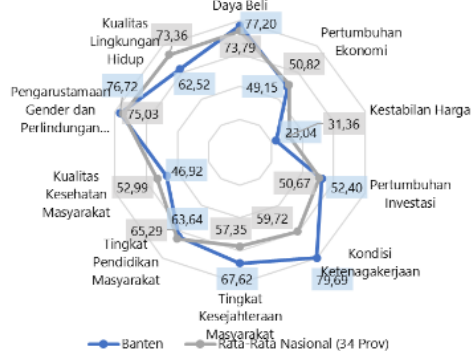
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Kelembagaan pemerintah Provinsi Banten dapat ditingkatkan dalam: 1) persebaran ASN yang ideal dengan jumlah penduduk; 2) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi daerah dalam menyelenggarakan layanan pemerintahan; dan 3) mendorong akuntabilitas dan integritas dalam kinerja pemerintah sebagai upaya pemberantasan korupsi.
- Anggaran pembangunan berperan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemda. Pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui: 1) peningkatan efektivitas alokasi belanja modal; 2) peningkatan alokasi anggaran terkait urusan lingkungan; 3) merumuskan kebijakan fiskal yang efektif untuk menurunkan inflasi di daerah.
- Capaian perekonomian di Provinsi Banten perlu ditingkatkan dalam laju pertumbuhan investasi baik dalam maupun luar negeri. Selain itu perbaikan terkait persaingan usaha yang sehat juga dibutuhkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam berusaha.
- Sektor pendidikan perlu dioptimalkan untuk mendorong generasi muda yang unggul. Strategi dalam meningkatkan sektor pendidikan diantaranya: 1) melibatkan anak muda dalam kemajuan pembangunan; 2) melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi; 3) melakukan pelatihan dan kompetensi; 4) meningkatkan partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BANTEN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		71,29
1	Sistem Pendukung		49,62
1.1	Kualitas Demokrasi		75,83
1.1.1	Kondisi Demokrasi		75,83
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	75,83	75,83
1.2	Dinamika Sosial		62,96
1.2.1	Kondisi Keamanan		59,25
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	105,00	78,96
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4266,00	39,54
1.2.2	Kohesivitas Sosial		68,78
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	70,05	70,05
1.2.2.2	Modal Sosial	67,51	67,51
1.3	Potensi Daerah		40,27
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,09
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,02	0,09
1.3.2	Potensi Pariwisata		27,67
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,66	27,67
1.3.3	Kondisi Demografi		58,01
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	42,60	62,68
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	53,33	53,33
1.3.4	Kondisi Geografis		57,12
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	95,74	62,59
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	132,21	51,65
2	Kapasitas Pemerintahan		75,78
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		72,08
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		62,09
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	46,67
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		72,84
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,16	91,16
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,39	59,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	88,59	88,59
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	91,56	48,96
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,41
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,09	69,09
2.2	Kuangan Daerah		71,37
2.2.1	Kapasitas Fiskal		79,97
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,82	77,71
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,74	82,22
2.2.2	Alokasi Anggaran		61,92
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	95,42	77,29
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	15,24	44,75
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,56	27,63
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		78,89
2.3.1	Layanan Kesehatan		85,05
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	70,10	70,10
2.3.2	Layanan Pendidikan		74,97
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	97,45	97,45
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	52,50	52,50

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BANTEN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		97,57
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,91	91,45
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		96,48
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	97,97	97,97
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	95,00	95,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		72,67
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,90	78,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,04	67,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		57,74
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	5,70	57,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	3,53	23,51
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,49	24,92
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	4,94	49,39
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		72,14
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		82,80
3.1.1	Daya Beli		77,20
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,77	77,20
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		49,15
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,81	49,15
3.1.3	Kestabilan Harga		23,04
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,06	23,04
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		52,40
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	17,61	45,45
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	23,38	59,34
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		79,69
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,36	63,62
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	12,38	82,55
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	9,36	93,58
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		60,86
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		67,62
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,17	70,99
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,20	69,23
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,36	63,64
3.2.1.4	Gini Ratio	0,37	26,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	8,24	73,14
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		63,64
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,67	66,86
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,42	60,42
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		46,92
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,78	78,11
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	23,90	15,73
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,72
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	69,87	69,87
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	92,48	92,48
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	66,18	66,18
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		62,52
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		62,52
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	62,52	62,52

BALI

70,97/66,13 – Baik

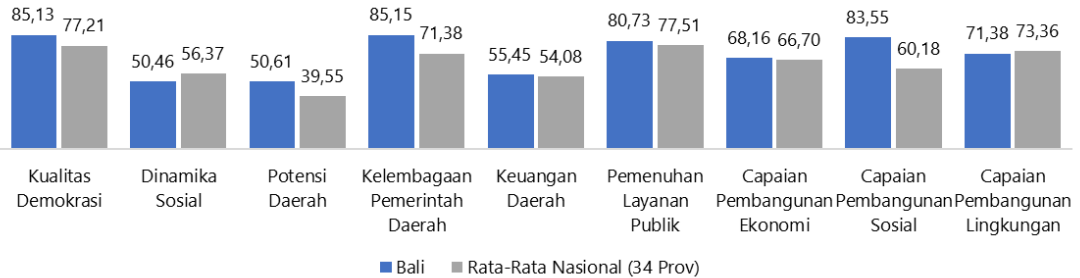
**Aspek
Sistem Pendukung
55,01/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
73,54/69,63**

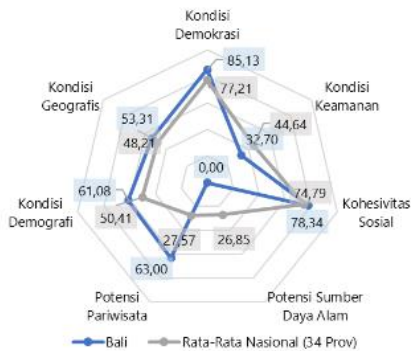
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
72,48/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

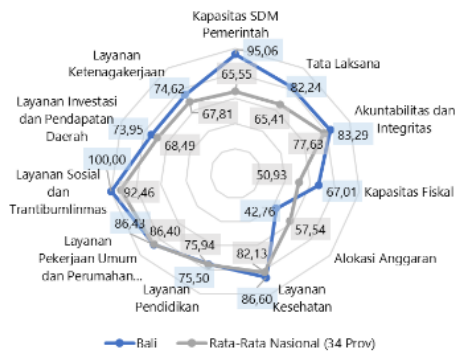
SKOR VARIABEL



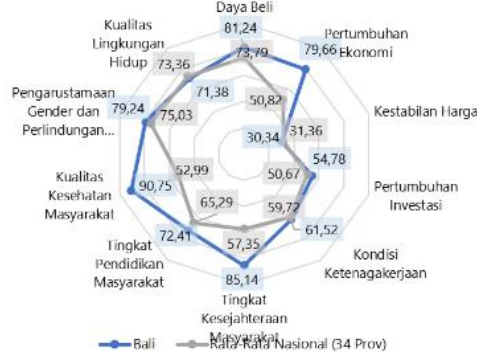
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Memperkuat Sistem Pendukung, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga kondisi keamanan terutama mengurangi risiko penduduk mengalami kejahatan dan frekwensi terjadinya kriminalitas cukup tinggi;
- Memperkuat Kapasitas Pemerintahan melalui: (1) meningkatkan pelayanan pemerintah dengan dukungan teknologi informasi atau e-government yang berorientasi pada pelayanan pariwisata bertaraf internasional; (2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah untuk optimalisasi realisasi penganggaran; (3) Peningkatan alokasi anggaran untuk lingkungan yang mendukung sektor pariwisata.
- Memperkokoh Capaian Ekonomi Daerah dengan fokus pada: (1) Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat; (2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong PMDN khususnya investasi di sektor pariwisata yang mulai mengalami penurunan;
- Optimalisasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi keunggulannya, dengan meningkatkan asesibilitas dan konektivitas daerah-daerah tujuan wisata baru atau antar lokasi tujuan wisata melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi.
- Dan dari aspek tenaga kerja: (1) pemerintah harus memfasilitasi hubungan industrial yang berkeadilan, (2) jaminan perlindungan kepada tenaga kerja; (3) Mengkreasikan program-program untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata yang ada.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BALI

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		70,97
1	Sistem Pendukung		55,01
1.1	Kualitas Demokrasi		85,13
1.1.1	Kondisi Demokrasi		85,13
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	85,13	85,13
1.2	Dinamika Sosial		50,46
1.2.1	Kondisi Keamanan		32,70
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	295,00	40,88
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2646,00	24,53
1.2.2	Kohesivitas Sosial		78,34
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	82,38	82,38
1.2.2.2	Modal Sosial	74,29	74,29
1.3	Potensi Daerah		50,61
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,00	0,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		63,00
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	4,78	63,00
1.3.3	Kondisi Demografi		61,08
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	43,08	59,50
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	62,67	62,67
1.3.4	Kondisi Geografis		53,31
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	103,40	42,12
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	120,21	64,50
2	Kapasitas Pemerintahan		73,54
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		85,15
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		95,06
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	97,62
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		82,24
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96,46	96,46
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	4,07	76,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	89,93	89,93
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	119,59	63,95
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		83,29
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	78,45	78,45
2.2	Kuangan Daerah		55,45
2.2.1	Kapasitas Fiskal		67,01
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,18	58,20
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,68	75,82
2.2.2	Alokasi Anggaran		42,76
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	83,29	17,15
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	18,88	56,42
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,06	2,72
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		80,73
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,60
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	73,20	73,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		75,50
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	88,30	88,30
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	62,70	62,70

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI BALI

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		86,43
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	78,33	78,33
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,80	79,95
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		73,95
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,22	84,40
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,81	63,50
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		74,62
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,30	93,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,33	75,56
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,58	25,84
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	6,17	61,68
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,84	98,38
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		72,48
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		68,16
3.1.1	Daya Beli		81,24
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,81	81,24
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		79,66
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71	79,66
3.1.3	Kestabilan Harga		30,34
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,77	30,34
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		54,78
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	13,65	41,86
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	44,40	67,70
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		61,52
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	8,90	88,95
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,88	72,50
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,11	21,12
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		83,55
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		85,14
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	4,25	80,02
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,55	85,90
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,10	89,90
3.2.1.4	Gini Ratio	0,36	27,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,00	100,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		72,41
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,69	69,22
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	75,60	75,60
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		90,75
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,82	81,51
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	7,20	100,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		79,24
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	73,77	73,77
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	94,59	94,59
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	67,95	67,95
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		71,38
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		71,38
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	71,38	71,38

NUSA TENGGARA BARAT

58,17/66,13 – Cukup

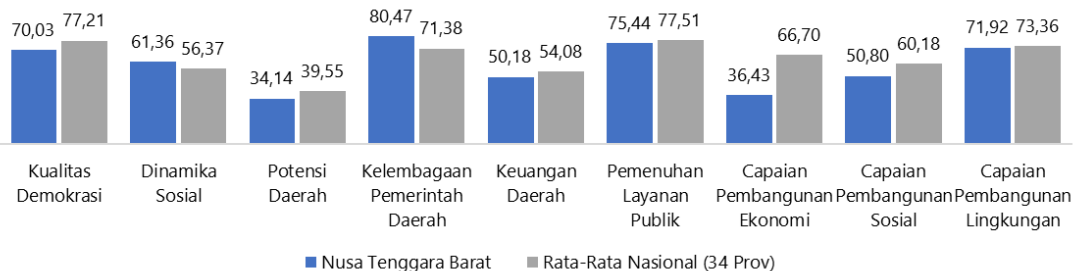
Aspek
Sistem Pendukung
44,49/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
68,33/69,63

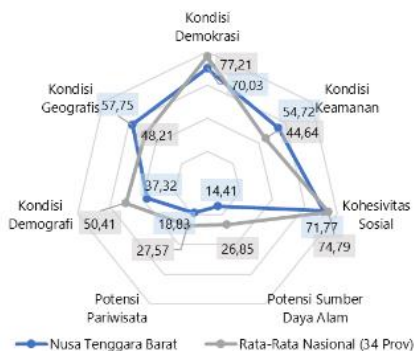
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
49,78/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

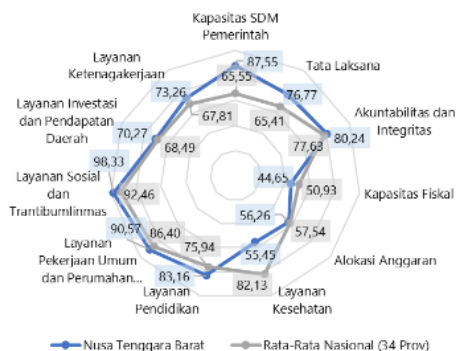
SKOR VARIABEL



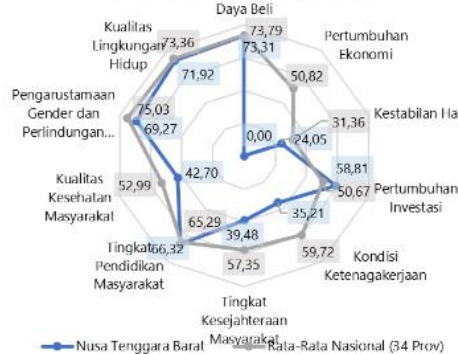
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Sebagai daerah yang kurang memiliki dukungan sumber daya NTB bisa memfokuskan dukungan perekonomian daerah dengan optimalisasi sektor pariwisata, pertanian, dan perekonomian berbasis masyarakat (pedesaan)
- aspek pendukung yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan keamanan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Polri untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan.
- Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, melalui: (1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui mendorong pertumbuhan sektor ekonomi untuk memperluas local tax base, (2) Perbaikan sistem tata kelola perencanaan dan penganggaran agar program-program pembangunan ekonomi produktif lebih efektif melalui peningkatan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
- Memperkuat Capaian Pembangunan Ekonomi, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui: (1) Menjaga kestabilan harga; (2) Penciptaan iklim investasi yang kondusif terutama untuk mendorong pertumbuhan investasi asing (PMA); (3) Program untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan dunia usaha di daerah, (4) Aktif memfasilitasi hubungan antara dunia usaha dengan pekerja sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat dan kenyamanan lingkungan kerja.
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui: (1) Peningkatan standar pelayanan kesehatan (fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat); (2) Program perlindungan kepada anak dan perempuan (pengarusutamaan gender); (3) Mengefektifkan program penurunan prevalensi stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		58,17
1	Sistem Pendukung		44,49
1.1	Kualitas Demokrasi		70,03
1.1.1	Kondisi Demokrasi		70,03
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	70,03	70,03
1.2	Dinamika Sosial		61,36
1.2.1	Kondisi Keamanan		54,72
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	146,00	70,74
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4176,00	38,71
1.2.2	Kohesivitas Sosial		71,77
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	71,99	71,99
1.2.2.2	Modal Sosial	71,55	71,55
1.3	Potensi Daerah		34,14
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		14,41
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	3,45	14,41
1.3.2	Potensi Pariwisata		18,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,13	18,83
1.3.3	Kondisi Demografi		37,32
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	48,85	20,98
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	53,67	53,67
1.3.4	Kondisi Geografis		57,75
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	102,01	45,83
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	115,37	69,68
2	Kapasitas Pemerintahan		68,33
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		80,47
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		87,55
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	97,59
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		76,77
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	84,51	84,51
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,40	60,00
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	82,31	82,31
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	146,67	78,43
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,24
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,29	69,29
2.2	Kuangan Daerah		50,18
2.2.1	Kapasitas Fiskal		44,65
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,38	33,69
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,50	55,61
2.2.2	Alokasi Anggaran		56,26
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	13,93	69,65
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	90,80	54,39
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	8,96	24,60
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,59	77,87
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		75,44
2.3.1	Layanan Kesehatan		55,45
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	32,59	32,59
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	78,30	78,30
2.3.2	Layanan Pendidikan		83,16
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	100,00	100,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	66,32	66,32

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		90,57
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	95,00	95,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	95,00	95,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,79	79,38
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		98,33
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	96,67	96,67
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		70,27
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,61	72,20
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,10	68,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,26
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,25	82,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,18	81,23
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,22	32,22
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	7,98	79,75
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,80	68,05
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		49,78
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		36,43
3.1.1	Daya Beli		73,31
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,73	73,31
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		0,00
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,80	0,00
3.1.3	Kestabilan Harga		24,05
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,02	24,05
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		58,81
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	64,14	87,63
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-50,40	29,98
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		35,21
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,30	62,98
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	4,89	32,62
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,87	8,73
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		50,80
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		39,48
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	13,85	34,88
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,38	38,97
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,59	40,40
3.2.1.4	Gini Ratio	0,38	25,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,69	97,76
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		66,32
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,65	64,61
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	68,04	68,04
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		42,70
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,73	73,03
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	24,50	12,36
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		69,27
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	53,28	53,28
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	91,39	91,39
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	59,99	59,99
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		71,92
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		71,92
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	71,92	71,92

NUSA TENGGARA TIMUR

58,42/66,13 – Cukup

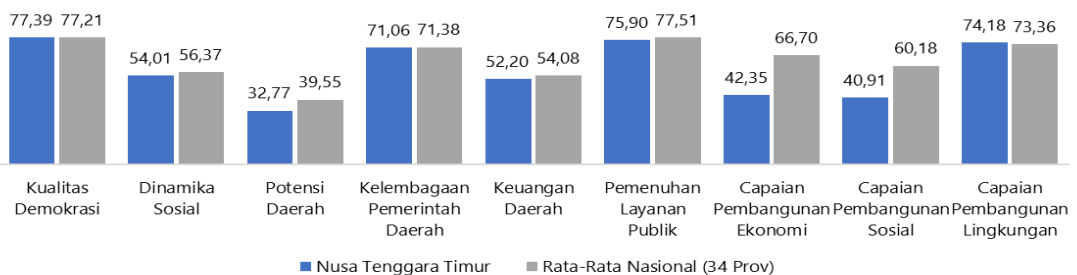
Aspek
Sistem Pendukung
42,98/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
68,09/69,63

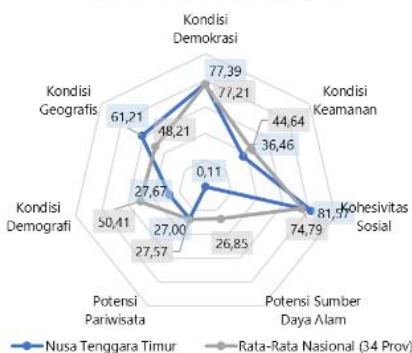
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
51,16/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

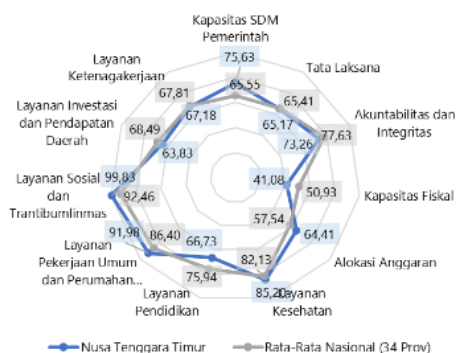
SKOR VARIABEL



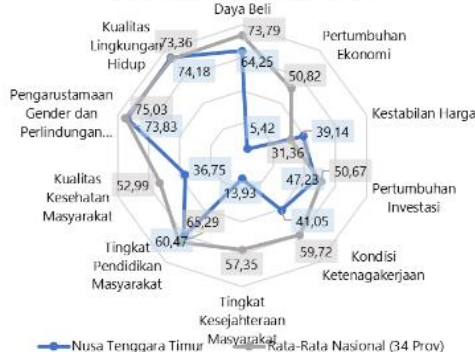
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Kurangkanya dukungan SDA sehingga NTT perlu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lebih optimal dan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, antara lain dengan: (1) Peningkatan alokasi anggaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pusat-pusat produksi dengan perkotaan (perhubungan laut dan udara); (2) Alokasi untuk mendorong perekonomian pedesaan, untuk mengurangi kesenjangan desa-kota.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, melalui: (1) Perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk efektivitas penganggaran untuk program produktif; (2) Mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi untuk memperluas *local tax base* dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- Peningkatan Capaian Pembangunan ekonomi, khususnya dengan mendorong pertumbuhan investasi melalui: (1) menjaga kestabilan harga; (2) Perbaikan pelayanan bidang investasi dan ketenagakerjaan. (3) Program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, (4) Aktif memfasilitasi hubungan pengusaha dengan pekerja sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat dan kenyamanan lingkungan kerja.
- Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat dengan: (1) Program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan dan peningkatan ekonomi pedesaan; (2) Peningkatan perlindungan kepada anak; (3) Efektivitas program penurunan angka prevalensi stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		58,42
1	Sistem Pendukung		42,98
1.1	Kualitas Demokrasi		77,39
1.1.1	Kondisi Demokrasi		77,39
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	77,39	77,39
1.2	Dinamika Sosial		54,01
1.2.1	Kondisi Keamanan		36,46
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	250,00	49,90
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2484,00	23,02
1.2.2	Kohesivitas Sosial		81,57
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	85,64	85,64
1.2.2.2	Modal Sosial	77,50	77,50
1.3	Potensi Daerah		32,77
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,11
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,03	0,11
1.3.2	Potensi Pariwisata		27,00
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,62	27,00
1.3.3	Kondisi Demografi		27,67
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	55,06	0,00
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,33	55,33
1.3.4	Kondisi Geografis		61,21
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	92,44	71,41
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	132,81	51,01
2	Kapasitas Pemerintahan		68,09
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		71,06
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		75,63
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	58,76
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		65,17
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	63,92	63,92
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,83	70,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	63,99	63,99
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	116,82	62,47
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		73,26
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	62,65	62,65
2.2	Kuangan Daerah		52,20
2.2.1	Kapasitas Fiskal		41,08
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,51	37,65
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,40	44,51
2.2.2	Alokasi Anggaran		64,41
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	14,29	71,43
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	91,12	55,97
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	15,16	44,50
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,78	86,96
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		75,90
2.3.1	Layanan Kesehatan		85,20
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	70,40	70,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		66,73
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	72,94	72,94
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	60,53	60,53

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		91,98
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,72	71,77
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,83
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	99,67	99,67
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		63,83
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,25	65,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,76	62,67
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		67,18
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,25	82,45
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	5,21	34,73
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,64	26,45
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,98	99,80
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,23	62,31
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		51,16
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		42,35
3.1.1	Daya Beli		64,25
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,64	64,25
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		5,42
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,52	5,42
3.1.3	Kestabilan Harga		39,14
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,42	39,14
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,23
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	-1,53	28,10
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	41,01	66,35
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		41,05
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,75	67,47
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	5,55	37,01
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,75	17,51
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		40,91
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		13,93
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	19,96	6,16
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,33	14,62
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,80	19,19
3.2.1.4	Gini Ratio	0,33	35,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	38,54	0,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		60,47
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,63	62,79
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	58,15	58,15
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		36,75
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,73	73,49
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	37,90	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		73,83
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	75,10	75,10
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	93,38	93,38
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	52,35	52,35
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		74,18
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		74,18
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	74,18	74,18

KALIMANTAN BARAT

66,25/66,13 – Cukup

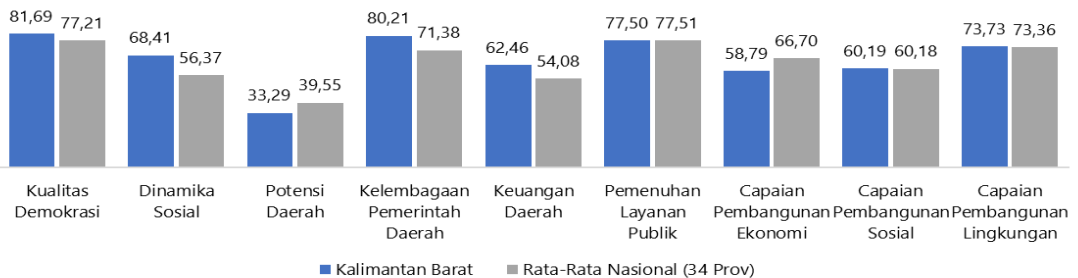
**Aspek
Sistem Pendukung**
46,92/47,93

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan**
73,23/69,63

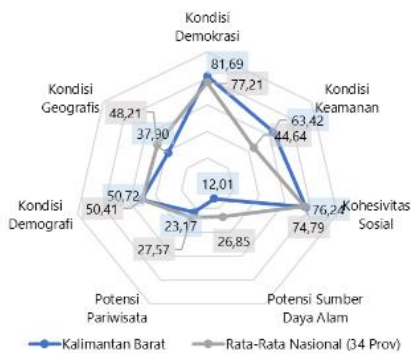
**Aspek
Cap. Pembangunan Daerah**
63,38/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

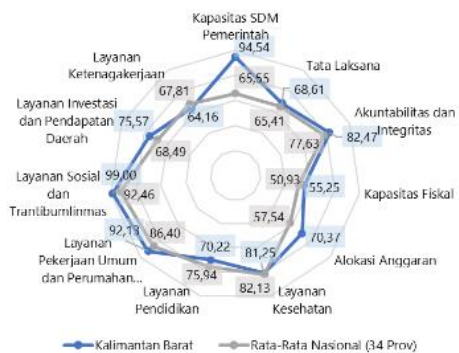
SKOR VARIABEL



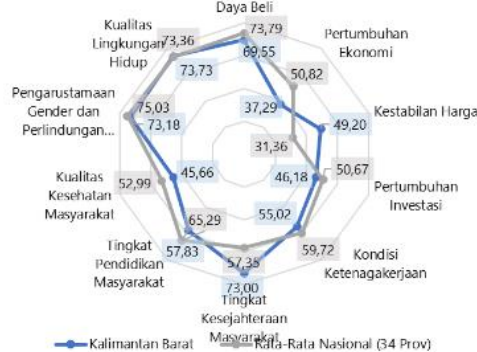
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Sistem Pendukung Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat antara lain dengan: (1) Peningkatan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengurangi intensitas kriminalitas yang ada; (2) Pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah daerah; (3) Optimalisasi pembangunan pariwisata.
- Optimalisasi Kapasitas Pemerintahan terutama dengan: (1) Mendorong dan menerapkan inovasi daerah dalam pelayanan publik; (2) Peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan lokal tax base sehingga terjadi peningkatan PAD; (3) Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan lingkungan hidup akibat kegiatan ekonomi ekstraktif.
- Memperkuat Capaian Pembangunan Ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi melalui: (1) Pengendalian kestabilan harga; (2) Peningkatan aksesibilitas daerah dengan pembangunan infrastruktur (3) Pelayanan investasi yang lebih baik;
- Peningkatan Investasi melalui: (1) peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, (2) Menjaga hubungan industrial yang lebih baik serta menciptakan kenyamanan lingkungan kerja.
- Perbaikan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat melalui: (1) Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting; (2) Perlindungan kepada anak; (3) Peningkatan alokasi anggaran untuk Pendidikan yang lebih tepat sasaran khususnya untuk meningkatkan akses terhadap Pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		66,25
1	Sistem Pendukung		46,92
1.1	Kualitas Demokrasi		81,69
1.1.1	Kondisi Demokrasi		81,69
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	81,69	81,69
1.2	Dinamika Sosial		68,41
1.2.1	Kondisi Keamanan		63,42
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	108,00	78,36
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	5230,00	48,48
1.2.2	Kohesivitas Sosial		76,24
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	79,01	79,01
1.2.2.2	Modal Sosial	73,47	73,47
1.3	Potensi Daerah		33,29
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		12,01
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	2,87	12,01
1.3.2	Potensi Pariwisata		23,17
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,39	23,17
1.3.3	Kondisi Demografi		50,72
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	44,78	48,11
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	53,33	53,33
1.3.4	Kondisi Geografis		37,90
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	107,44	31,32
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	138,92	44,47
2	Kapasitas Pemerintahan		73,23
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		80,21
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		94,54
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	96,57
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		68,61
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90,30	90,30
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,58	64,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	83,37	83,37
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	62,82	33,59
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		82,47
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	75,99	75,99
2.2	Kuangan Daerah		62,46
2.2.1	Kapasitas Fiskal		55,25
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,06	54,51
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,50	55,99
2.2.2	Alokasi Anggaran		70,37
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	95,67	78,53
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	21,90	66,11
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,82	40,13
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		77,50
2.3.1	Layanan Kesehatan		81,25
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	62,50	62,50
2.3.2	Layanan Pendidikan		70,22
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	73,36	73,36
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	67,08	67,08

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		92,13
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,72	72,28
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		99,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	98,00	98,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		75,57
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,39	87,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,80	63,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		64,16
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,35	83,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	5,09	33,95
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,44	34,35
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	4,88	48,80
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,93	89,34
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		63,38
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		58,79
3.1.1	Daya Beli		69,55
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,70	69,55
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		37,29
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,46	37,29
3.1.3	Kestabilan Harga		49,20
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,02	49,20
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		46,18
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	36,99	63,02
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-51,99	29,35
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		55,02
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,93	69,30
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,44	69,60
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,47	24,68
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		60,19
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		73,00
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,71	68,45
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,03	73,59
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	75,76
3.2.1.4	Gini Ratio	0,32	35,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,78	97,45
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		57,83
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,61	60,89
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	54,76	54,76
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		45,66
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,79	78,95
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	24,50	12,36
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		73,18
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	73,05	73,05
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	88,06	88,06
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	57,78	57,78
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		73,73
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		73,73
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	73,73	73,73

KALIMANTAN TENGAH

65,08/66,13 – Cukup

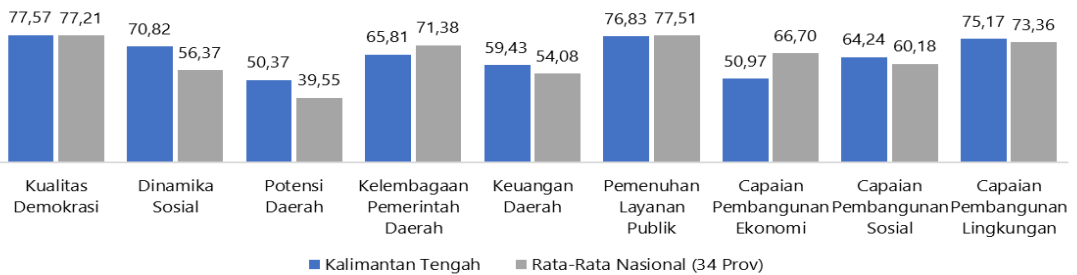
**Aspek
Sistem Pendukung
58,18/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
70,21/69,63**

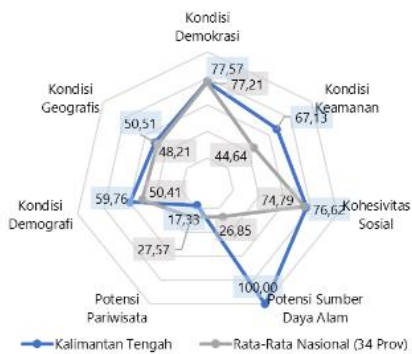
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
60,84/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

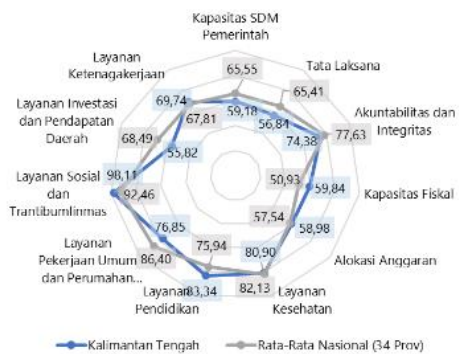
SKOR VARIABEL



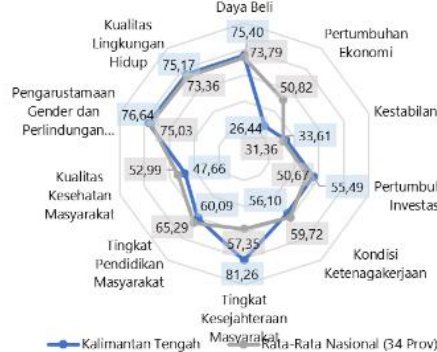
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Penguatan Sistem Pendukung Provinsi Kalimantan Tengah melalui: (1) Mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki; (2) Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan pendukung untuk aksesibilitas antar daerah; (3) Pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk siap mendukung pembangunan ekonomi daerah.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, melalui: (1) Perencanaan kebutuhan PNS mengingat saat ini dirasakan belum mencukupi; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dukungan teknologi informasi dan inovasi daerah; (3) Perbaikan tata kelola sistem keuangan daerah terutama untuk meningkatkan akuntabilitas; (4) Mendorong perekonomian formal untuk meningkatkan *local tax based* dan PAD.
- Optimalisasi Capaian Pembangunan Ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi melalui: (1) Menjaga kestabilan harga; (2) Mendorong pertumbuhan investasi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan perbaikan pelayanan investasi, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta fasilitasi hubungan industrial yang lebih sehat.
- Perbaikan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat dengan: (1) Optimalisasi alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan angka partisipasi sekolah menengah; (2) Percepatan program penurunan angka stunting; dan perlindungan untuk anak-anak dan peningkatan SPM di bidang kesehatan.
- Perbaikan Kualitas Lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran untuk lingkungan khususnya untuk perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekstraktif, serta aksi adaptasi khususnya bencana kebakaran pada lahan gambut dan sebagainya.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		65,08
1	Sistem Pendukung		58,18
1.1	Kualitas Demokrasi		77,57
1.1.1	Kondisi Demokrasi		77,57
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	77,57	77,57
1.2	Dinamika Sosial		70,82
1.2.1	Kondisi Keamanan		67,13
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	159,00	68,14
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	7134,00	66,13
1.2.2	Kohesivitas Sosial		76,62
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	79,68	79,68
1.2.2.2	Modal Sosial	73,56	73,56
1.3	Potensi Daerah		50,37
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		100,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	25,14	100,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		17,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,04	17,33
1.3.3	Kondisi Demografi		59,76
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	42,30	64,69
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	54,83	54,83
1.3.4	Kondisi Geografis		50,51
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	104,89	38,13
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	121,72	62,88
2	Kapasitas Pemerintahan		70,21
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		65,81
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		59,18
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	40,86
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		56,84
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	86,60	86,60
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,75	43,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	75,55	75,55
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	32,50	17,38
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		74,38
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	66,00	66,00
2.2	Kuangan Daerah		59,43
2.2.1	Kapasitas Fiskal		59,84
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,79	76,86
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,39	42,81
2.2.2	Alokasi Anggaran		58,98
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	86,54	33,27
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	26,63	81,31
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,52	25,38
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		76,83
2.3.1	Layanan Kesehatan		80,90
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	61,80	61,80
2.3.2	Layanan Pendidikan		83,34
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	100,00	100,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	66,68	66,68

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		76,85
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	50,00	50,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,81	80,53
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		98,11
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	96,21	96,21
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		55,82
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,54	50,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,65	60,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		69,74
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,60	96,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	9,45	63,02
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	4,69	46,94
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	3,16	31,63
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,44	84,42
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		60,84
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		50,97
3.1.1	Daya Beli		75,40
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,75	75,40
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		26,44
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,14	26,44
3.1.3	Kestabilan Harga		33,61
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,64	33,61
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		55,49
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	25,32	52,44
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	21,40	58,55
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		56,10
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,27	72,69
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	11,81	78,73
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,49	14,89
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		64,24
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		81,26
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	5,11	75,98
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,66	83,08
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	85,86
3.2.1.4	Gini Ratio	0,32	36,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9,99	67,44
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		60,09
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,65	64,54
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	55,63	55,63
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		47,66
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,77	77,34
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	23,50	17,98
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,64
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	79,99	79,99
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	89,49	89,49
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	60,37	60,37
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		75,17
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		75,17
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	75,17	75,17

KALIMANTAN SELATAN

69,65/66,13 – Cukup

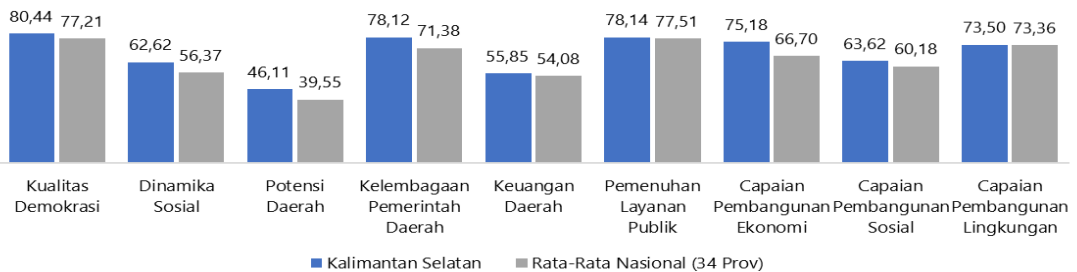
Aspek
Sistem Pendukung
54,00/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
71,34/69,63

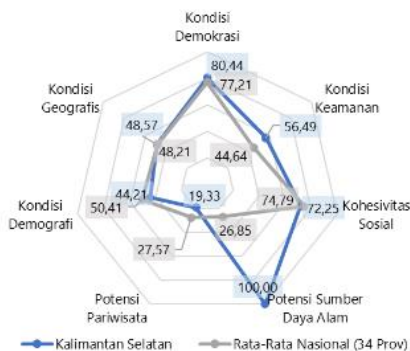
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
72,15/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

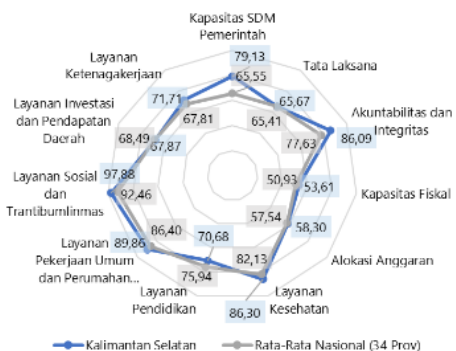
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Untuk optimalisasi sistem pendukung yang masih perlu dilakukan adalah: (1) pengembangan sektor pariwisata, (2) meningkatkan aksesibilitas daerah dengan meningkatkan kualitas jalan antar daerah.
- Untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, terutama dengan: (1) Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan; (2) Inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, (3) memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui perluasan local tax based dengan mendorong pertumbuhan sektor kegiatan ekonomi produktif yang masuk dalam sektor formal.
- Memperkuat Capaian Ekonomi Makro Daerah melalui: (1) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan investasi khususnya PMDN; (2) Program untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan industri; (3) Aktif dalam memfasilitasi hubungan antara dunia usaha dengan pekerja sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat dan kenyamanan lingkungan kerja.
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat khususnya melalui peningkatan alokasi anggaran untuk (1) pendidikan menengah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah; (2) program percepatan penurunan prevalensi stunting pada anak.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		69,65
1	Sistem Pendukung		54,00
1.1	Kualitas Demokrasi		80,44
1.1.1	Kondisi Demokrasi		80,44
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	80,44	80,44
1.2	Dinamika Sosial		62,62
1.2.1	Kondisi Keamanan		56,49
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	164,00	67,13
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4946,00	45,84
1.2.2	Kohesivitas Sosial		72,25
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	73,53	73,53
1.2.2.2	Modal Sosial	70,96	70,96
1.3	Potensi Daerah		46,11
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		100,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	25,20	100,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		19,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,16	19,33
1.3.3	Kondisi Demografi		44,21
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	46,94	33,75
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	54,67	54,67
1.3.4	Kondisi Geografis		48,57
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	103,25	42,52
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	129,44	54,62
2	Kapasitas Pemerintahan		71,34
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		78,12
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		79,13
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	80,75
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		65,67
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	85,77	85,77
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,69	42,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	90,21	90,21
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	76,00	40,64
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		86,09
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	90,00	85,71
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	72,55	72,55
2.2	Kuangan Daerah		55,85
2.2.1	Kapasitas Fiskal		53,61
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,90	49,79
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,52	57,44
2.2.2	Alokasi Anggaran		58,30
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	91,98	60,24
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	18,01	53,64
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,45	22,15
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		78,14
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,30
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	72,60	72,60
2.3.2	Layanan Pendidikan		70,68
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	70,07	70,07
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	71,29	71,29

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		89,86
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,64	64,30
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		97,88
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	99,09	99,09
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	96,66	96,66
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		67,87
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,52	70,40
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,92	65,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		71,71
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,72	97,23
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	8,70	57,99
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	4,12	41,19
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,88	58,80
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,79	77,93
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		72,15
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		75,18
3.1.1	Daya Beli		78,04
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,78	78,04
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		50,17
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,84	50,17
3.1.3	Kestabilan Harga		38,89
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,43	38,89
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		54,93
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	17,43	45,29
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	36,55	64,58
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		68,16
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,30	73,01
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,76	71,75
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,93	59,30
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		63,62
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		82,88
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	4,29	79,83
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,61	84,36
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,16	83,84
3.2.1.4	Gini Ratio	0,31	37,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,11	99,65
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		62,03
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,64	64,22
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	59,83	59,83
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		43,63
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,76	76,03
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	24,70	11,24
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,23
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	75,97	75,97
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	89,65	89,65
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	62,46	62,46
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		73,50
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		73,50
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	73,50	73,50

KALIMANTAN TIMUR

75,37/66,13 – Baik

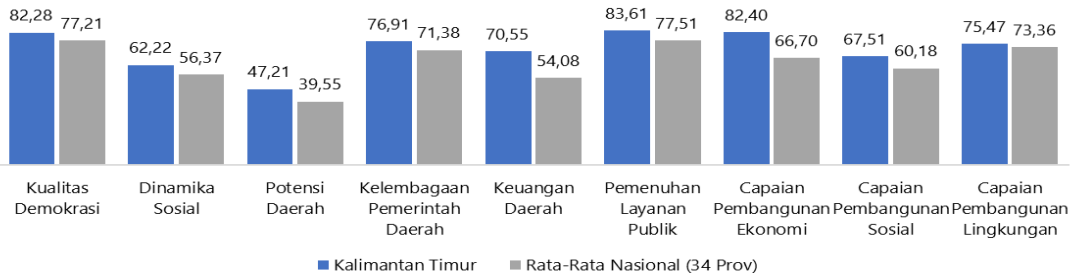
**Aspek
Sistem Pendukung
54,88/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
78,82/69,63**

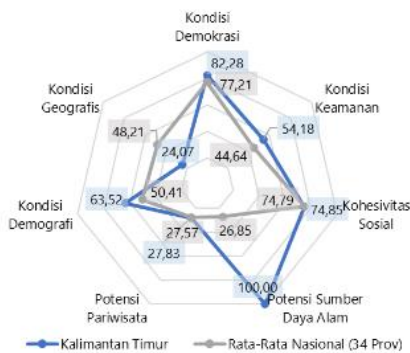
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
77,13/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

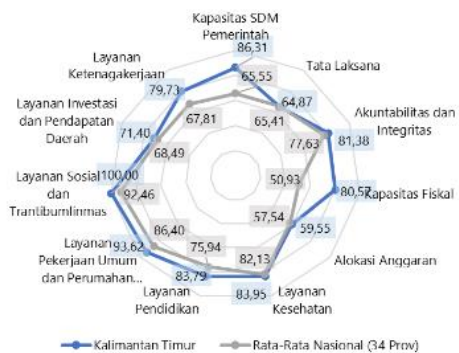
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Pemprov perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk mengatasi dua hal yaitu: (1) konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan provinsi untuk memperkuat sistem pendukung; (2) Alokasi anggaran lingkungan, mengatasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi ekstratif, (3) Mendorong perekonomian lokal berbasis masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat.
- Untuk memperkokok ekonomi makro daerah masih perlu upaya: (1) Pengendalian harga khususnya untuk memperkuat daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (2) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif dan sesuai kebutuhan sektor ekonomi formal.
- Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan: (1) program penurunan angka prevalensi stunting yang masih tinggi (22,8%) (2) program ekonomi kerakyatan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terutama di daerah pedesaan.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		75,37
1	Sistem Pendukung		54,88
1.1	Kualitas Demokrasi		82,28
1.1.1	Kondisi Demokrasi		82,28
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	82,28	82,28
1.2	Dinamika Sosial		62,22
1.2.1	Kondisi Keamanan		54,18
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	174,00	65,13
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4663,00	43,22
1.2.2	Kohesivitas Sosial		74,85
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,08	77,08
1.2.2.2	Modal Sosial	72,62	72,62
1.3	Potensi Daerah		47,21
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		100,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	30,62	100,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		27,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,67	27,83
1.3.3	Kondisi Demografi		63,52
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	41,82	67,87
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	59,17	59,17
1.3.4	Kondisi Geografis		24,07
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	115,58	9,57
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	144,43	38,57
2	Kapasitas Pemerintahan		78,82
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		76,91
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		86,31
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	80,12
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	92,50	92,50
2.1.2	Tata Laksana		64,87
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,08	91,08
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,91	47,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	70,55	70,55
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	86,82	46,43
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		81,38
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	72,71	72,71
2.2	Kuangan Daerah		70,55
2.2.1	Kapasitas Fiskal		80,57
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	3,65	100,00
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,55	61,14
2.2.2	Alokasi Anggaran		59,55
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	91,11	55,92
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	24,06	73,04
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,25	12,05
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		83,61
2.3.1	Layanan Kesehatan		83,95
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	67,90	67,90
2.3.2	Layanan Pendidikan		83,79
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	98,80	98,80
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	68,77	68,77

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		93,62
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,78	77,52
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		71,40
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,89	77,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,90	65,00
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		79,73
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,50	95,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	9,87	65,79
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	5,17	51,69
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	7,00	70,00
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		77,13
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		82,40
3.1.1	Daya Beli		78,62
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,79	78,62
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		96,95
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,22	96,95
3.1.3	Kestabilan Harga		12,98
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,46	12,98
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		51,68
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	24,11	51,34
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	4,99	52,02
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		77,10
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,81	78,05
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	13,61	90,73
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,18	61,78
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		67,51
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		79,50
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,11	71,27
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,77	80,26
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	85,86
3.2.1.4	Gini Ratio	0,32	35,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,59	98,06
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		71,07
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,72	72,24
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	69,89	69,89
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		53,05
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,84	84,18
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	22,80	21,91
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		73,79
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	68,96	68,96
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	87,13	87,13
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	64,04	64,04
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		75,47
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		75,47
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	75,47	75,47

KALIMANTAN UTARA

70,42/66,13 – Baik

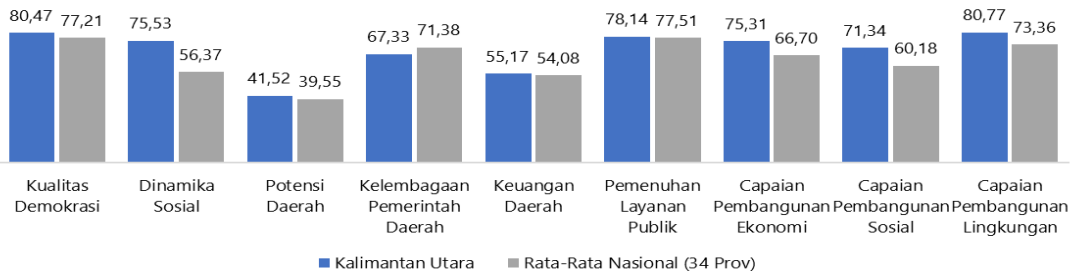
**Aspek
Sistem Pendukung
53,70/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
69,84/69,63**

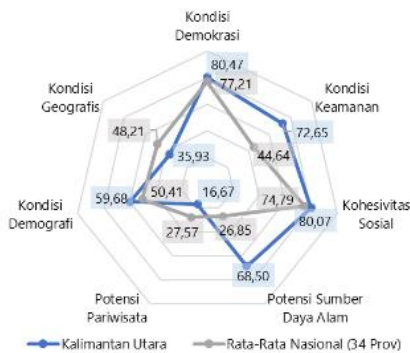
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
76,00/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

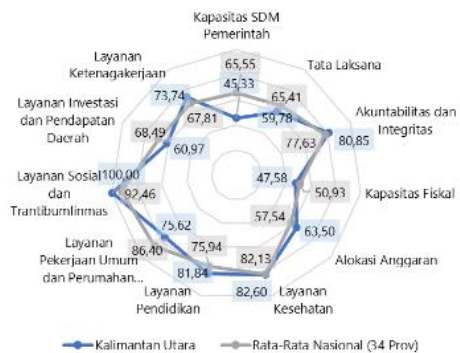
SKOR VARIABEL



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Memperkuat Sistem Pendukung dengan: (1) peningkatan konektivitas antar daerah dan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur khususnya jalan provinsi; (2) peningkatan SPM bidang PUPR; (3) peningkatan anggaran untuk perbaikan jalan.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dengan: (1) perencanaan kebutuhan SDM di bidang pemerintahan; (2) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government); (3) inovasi daerah dalam layanan kepada masyarakat, (4) perbaikan sistem penerimaan daerah untuk meningkatkan tax base dan tax rate.
- Performa Capaian Pembangunan Ekonomi dengan: (1) fokus pada pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kegiatan ekonomi non ekstratif misalnya sektor pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif; (2) Pemprov menjadi fasilitator dalam hubungan industrial yang lebih baik serta menciptakan kenyamanan lingkungan kerja.
- Pembangunan Manusia: (1) program penurunan prevalensi stunting; (2) meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		70,42
1	Sistem Pendukung		53,70
1.1	Kualitas Demokrasi		80,47
1.1.1	Kondisi Demokrasi		80,47
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	80,47	80,47
1.2	Dinamika Sosial		75,53
1.2.1	Kondisi Keamanan		72,65
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	273,00	45,29
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	18539,00	100,00
1.2.2	Kohesivitas Sosial		80,07
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	81,18	81,18
1.2.2.2	Modal Sosial	78,95	78,95
1.3	Potensi Daerah		41,52
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		68,50
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	16,39	68,50
1.3.2	Potensi Pariwisata		16,67
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,00	16,67
1.3.3	Kondisi Demografi		59,68
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	41,77	68,19
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	51,17	51,17
1.3.4	Kondisi Geografis		35,93
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	105,21	37,28
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	148,16	34,58
2	Kapasitas Pemerintahan		69,84
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		67,33
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		45,33
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	13,15
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		59,78
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	89,23	89,23
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,83	45,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	65,09	65,09
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	65,90	35,24
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		80,85
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	71,11	71,11
2.2	Kuangan Daerah		55,17
2.2.1	Kapasitas Fiskal		47,58
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,35	63,32
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,29	31,84
2.2.2	Alokasi Anggaran		63,50
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	92,32	61,92
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	23,08	69,92
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,54	26,36
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		78,14
2.3.1	Layanan Kesehatan		82,60
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	98,00	98,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	67,20	67,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		81,84
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	98,30	98,30
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	65,39	65,39

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		75,62
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,14	14,15
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		60,97
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,88	57,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,86	64,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,74
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,75	97,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	10,36	69,08
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,82	38,18
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,39	53,93
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,82	88,16
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		76,00
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		75,31
3.1.1	Daya Beli		69,31
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,69	69,31
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		53,56
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	53,56
3.1.3	Kestabilan Harga		38,64
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,44	38,64
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		56,64
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	8,20	36,93
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	66,16	76,36
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		73,50
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,67	76,72
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	12,47	83,14
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	60,00
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		71,34
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		80,24
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,45	69,68
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,64	83,59
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11	88,89
3.2.1.4	Gini Ratio	0,28	44,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	21,48	29,98
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		67,25
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,68	67,80
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	66,70	66,70
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		66,65
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,81	81,06
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	17,40	52,25
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		71,24
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	58,86	58,86
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	88,46	88,46
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	63,95	63,95
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		80,77
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		80,77
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	80,77	80,77

SULAWESI UTARA

65,64/66,13 – Cukup

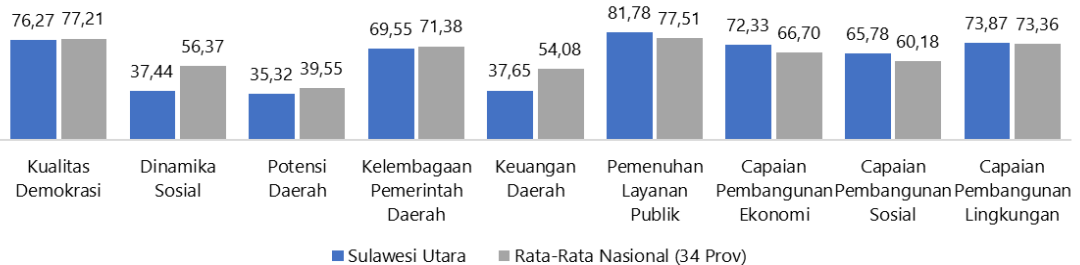
**Aspek
Sistem Pendukung
41,03/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
66,86/69,63**

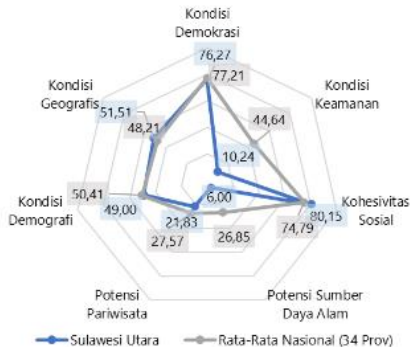
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
71,33/67,17**

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

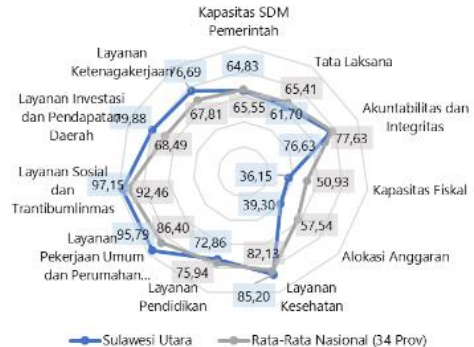
SKOR VARIABEL



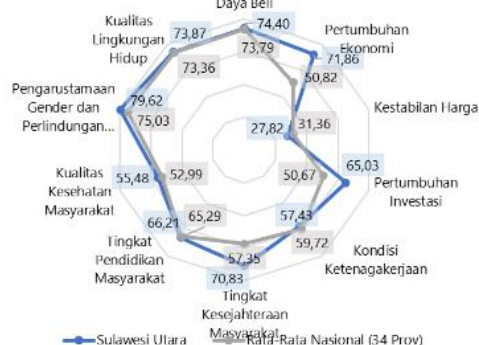
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Kohesivitas sosial sudah baik, namun perlu meningkatkan keamanan daerah karena risiko penduduk terkena kejahatan yang sangat tinggi berdasarkan frekuensi terjadinya kejahatan yang cukup tinggi.
- Mengingat kontribusi DBH SDA yang cukup rendah (1,44% dari penerimaan daerah), maka Pemprov perlu mengembangkan sektor pariwisata sebagai daya dukung perekonomian daerah.
- Pengembangan potensi pariwisata dilakukan melalui: (1) Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan darat untuk memperlancar aksesibilitas antar daerah, (2) meningkatkan alokasi anggaran untuk lingkungan hidup yang mendukung pariwisata alam.
- Beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan antara lain adalah: (1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (e-government) dan inovasi daerah untuk peningkatan layanan pemerintahan yang lebih efektif. (2) Memperluas lokal tax based dengan mendorong pertumbuhan sektor kegiatan ekonomi produktif yang masuk dalam sektor formal untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
- Untuk memkokoh perekonomian daerah dilakukan melalui: (1) Pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (2) Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan pebaikan penyanan investasi untuk meningkatkan investasi daerah baik PMA maupun PMDN.
- Perbaiki kondisi masyarakat dengan: (1) Pemerataan akses ekonomi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat, (2) Peningkatan kesehatan masyarakat khususnya mengurangi prevalensi stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		65,64
1	Sistem Pendukung		41,03
1.1	Kualitas Demokrasi		76,27
1.1.1	Kondisi Demokrasi		76,27
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	76,27	76,27
1.2	Dinamika Sosial		37,44
1.2.1	Kondisi Keamanan		10,24
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	589,00	0,00
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2210,00	20,48
1.2.2	Kohesivitas Sosial		80,15
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	81,64	81,64
1.2.2.2	Modal Sosial	78,66	78,66
1.3	Potensi Daerah		35,32
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		6,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,44	6,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		21,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,31	21,83
1.3.3	Kondisi Demografi		49,00
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,53	43,16
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	54,83	54,83
1.3.4	Kondisi Geografis		51,51
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	101,62	46,87
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	128,01	56,15
2	Kapasitas Pemerintahan		66,86
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		69,55
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		64,83
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	52,16
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		61,70
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	97,18	97,18
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,30	32,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	76,67	76,67
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	65,50	35,03
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		76,63
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	72,75	72,75
2.2	Kuangan Daerah		37,65
2.2.1	Kapasitas Fiskal		36,15
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,17	27,50
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,40	44,80
2.2.2	Alokasi Anggaran		39,30
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	14,64	73,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	88,21	41,55
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	11,24	31,94
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,26	12,80
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		81,78
2.3.1	Layanan Kesehatan		85,20
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	70,40	70,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		72,86
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	86,57	86,57
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	59,15	59,15

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		95,79
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,85	85,18
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		97,15
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	94,29	94,29
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		79,88
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,43	88,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,27	71,17
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		76,69
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,48	94,83
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	8,02	53,45
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	4,62	46,24
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,49	94,89
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,22	72,15
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		71,33
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		72,33
3.1.1	Daya Beli		74,40
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,74	74,40
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		71,86
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,48	71,86
3.1.3	Kestabilan Harga		27,82
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,87	27,82
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		65,03
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	34,50	60,76
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	48,38	69,29
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		57,43
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,43	64,26
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	9,33	62,17
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,53	45,28
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		65,78
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		70,83
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	7,38	65,30
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,09	72,05
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,26	73,74
3.2.1.4	Gini Ratio	0,37	26,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1,66	94,59
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		66,21
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,69	68,57
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	63,86	63,86
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		55,48
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,81	80,62
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	21,30	30,34
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		79,62
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	80,56	80,56
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	95,06	95,06
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	62,71	62,71
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		73,87
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		73,87
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	73,87	73,87

SULAWESI TENGAH

69,75/66,13 – Cukup

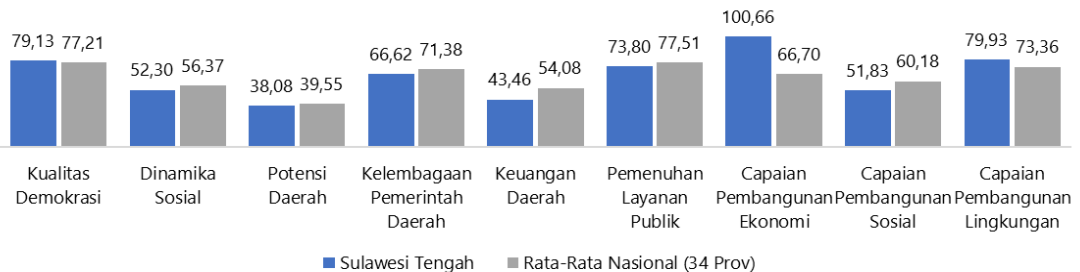
**Aspek
Sistem Pendukung
46,35/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
63,69/69,63**

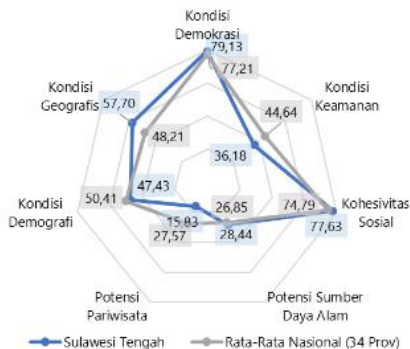
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
83,93/67,17**

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

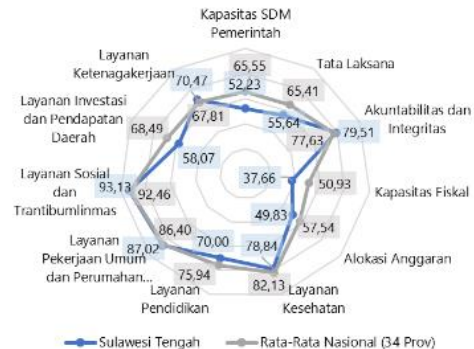
SKOR VARIABEL



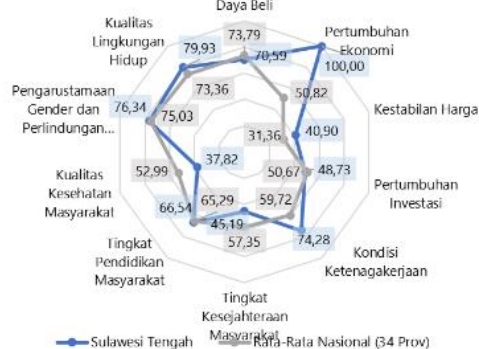
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dengan: (1) merancang kebutuhan SDM Pemerintahan (2) dukungan ITE (e-government) dan inovasi daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, (3) peningkatan akuntabilitas salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa, (4) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memperluas local tax based dan mendorong kegiatan ekonomi produktif yang masuk dalam sektor formal.
- Peningkatan alokasi belanja modal khususnya untuk: (1) perbaikan kualitas jalan provinsi untuk meningkatkan aksesibilitas antar daerah, (2) program-program adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana, dan kerusakan lingkungan serta perubahan iklim (anggaran lingkungan baru sebesar 0,24% dari APBD).
- Mendorong pertumbuhan investasi khususnya PMDN dengan: (1) program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri, (2) memfasilitasi hubungan industrial yang sehat antara pelaku usaha dan tenaga kerja.
- Perbaikan kualitas hidup penduduk dengan: (1) program pengentasan kemiskinan daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan tingkat pedesaan, (2) program kesehatan untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting, dan perlindungan terhadap anak.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI TENGAH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		69,75
1	Sistem Pendukung		46,35
1.1	Kualitas Demokrasi		79,13
1.1.1	Kondisi Demokrasi		79,13
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	79,13	79,13
1.2	Dinamika Sosial		52,30
1.2.1	Kondisi Keamanan		36,18
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	301,00	39,68
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	3526,00	32,68
1.2.2	Kohesivitas Sosial		77,63
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	76,95	76,95
1.2.2.2	Modal Sosial	78,30	78,30
1.3	Potensi Daerah		38,08
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		28,44
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	6,80	28,44
1.3.2	Potensi Pariwisata		15,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	1,95	15,83
1.3.3	Kondisi Demografi		47,43
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	46,77	34,86
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	60,00	60,00
1.3.4	Kondisi Geografis		57,70
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	91,96	72,69
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	140,56	42,72
2	Kapasitas Pemerintahan		63,69
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		66,62
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		52,23
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	26,95
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		55,64
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	81,37	81,37
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,14	53,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	59,80	59,80
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	47,00	25,13
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		79,51
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80,00	71,43
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	67,10	67,10
2.2	Kuangan Daerah		43,46
2.2.1	Kapasitas Fiskal		37,66
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,36	33,23
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,38	42,08
2.2.2	Alokasi Anggaran		49,83
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	89,02	45,56
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	16,12	47,58
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,24	11,61
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		73,80
2.3.1	Layanan Kesehatan		78,84
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	88,29	88,29
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	69,40	69,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		70,00
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	76,06	76,06
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	63,94	63,94

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI TENGAH

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		87,02
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	92,50	92,50
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,64	63,89
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		93,13
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	92,99	92,99
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	93,28	93,28
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		58,07
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,59	51,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,86	64,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		70,47
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,96	89,58
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,07	73,79
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,98	29,81
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,67	56,74
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,78	77,77
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		83,93
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		100,66
3.1.1	Daya Beli		70,59
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,71	70,59
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		100,00
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	11,91	100,00
3.1.3	Kestabilan Harga		40,90
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,35	40,90
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		48,73
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	21,25	48,75
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-3,34	48,71
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		74,28
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,21	72,07
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,80	52,01
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	10,00	100,00
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		51,83
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		45,19
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	12,41	41,65
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,12	45,64
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,54	45,45
3.2.1.4	Gini Ratio	0,30	39,20
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	8,20	73,27
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		66,54
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,67	66,89
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	66,18	66,18
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		37,82
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,76	75,65
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	27,20	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,34
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	77,29	77,29
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	92,63	92,63
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	58,54	58,54
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		79,93
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		79,93
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	79,93	79,93

SULAWESI SELATAN

67,22/66,13 – Cukup

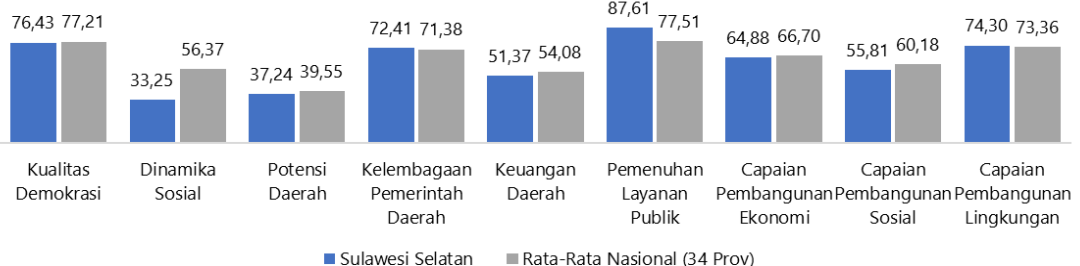
Aspek
Sistem Pendukung
41,43/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
74,74/69,63

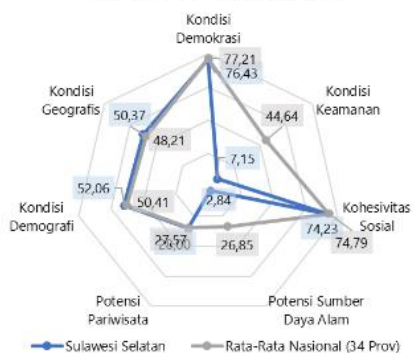
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
65,58/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

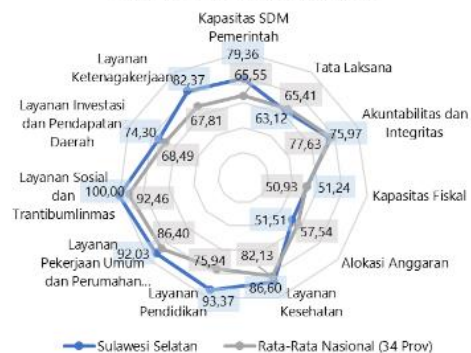
SKOR VARIABEL



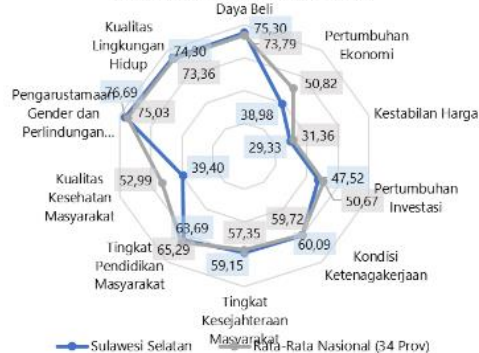
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Perbaiki Sistem Pendukung melalui koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menekan tingkat kriminalitas
- Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata melalui: (1) mengembangkan destinasi wisata berdasarkan potensi yang dimiliki, (2) pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata (3) pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
- Penguatan Kapasitas Pemerintahan Daerah melalui: (1) penerapan NSPK dalam manajemen ASN (2) mendorong dan mengembangkan inovasi daerah untuk pelayanan publik, (3) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui perluasan taxbase yaitu mendorong pertumbuhan usaha di daerah.
- Perbaiki ekonomi daerah melalui: (1) menselaraskan pertumbuhan ekonomi dan program pengendalian kestabilan harga dan daya beli masyarakat, (2) peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA selain dengan promosi investasi, juga meningkatkan kompetensi mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, dan fasilitasi hubungan industrial yang sehat.
- Perbaiki tingkat kesejahteraan sosial melalui: (1) meningkatkan angka partisipasi sekolah, (2) percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		67,22
1	Sistem Pendukung		41,43
1.1	Kualitas Demokrasi		76,43
1.1.1	Kondisi Demokrasi		76,43
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	76,43	76,43
1.2	Dinamika Sosial		33,25
1.2.1	Kondisi Keamanan		7,15
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	463,00	7,21
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	765,00	7,09
1.2.2	Kohesivitas Sosial		74,23
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	76,39	76,39
1.2.2.2	Modal Sosial	72,06	72,06
1.3	Potensi Daerah		37,24
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		2,84
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,68	2,84
1.3.2	Potensi Pariwisata		28,00
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,68	28,00
1.3.3	Kondisi Demografi		52,06
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	44,88	47,45
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	56,67	56,67
1.3.4	Kondisi Geografis		50,37
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	95,88	62,21
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	144,47	38,53
2	Kapasitas Pemerintahan		74,74
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		72,41
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		79,36
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,00	81,21
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		63,12
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	73,38	73,38
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,09	52,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	80,86	80,86
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	82,23	43,97
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,97
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	70,76	70,76
2.2	Kuangan Daerah		51,37
2.2.1	Kapasitas Fiskal		51,24
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,55	38,87
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,57	63,61
2.2.2	Alokasi Anggaran		51,51
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	15,00	75,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	93,54	67,97
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	17,39	51,65
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,25	12,08
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		87,61
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,60
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	73,20	73,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		93,37
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	100,00	100,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	86,74	86,74

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI SELATAN

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		92,03
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,72	71,95
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		100,00
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		74,30
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,43	88,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,60	60,00
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		82,37
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,10	91,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,23	81,55
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	5,78	57,85
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,65	96,51
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,85	68,47
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		65,58
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		64,88
3.1.1	Daya Beli		75,30
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,75	75,30
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		38,98
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,51	38,98
3.1.3	Kestabilan Harga		29,33
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,81	29,33
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,52
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	34,36	60,63
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-39,29	34,40
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		60,09
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,99	69,94
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	8,63	57,52
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,24	52,43
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		55,81
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		59,15
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	8,70	59,10
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,57	59,74
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,41	58,59
3.2.1.4	Gini Ratio	0,38	24,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,28	76,26
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		63,69
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,67	66,81
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,57	60,57
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		39,40
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,79	78,80
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	27,40	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		76,69
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	75,24	75,24
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	93,19	93,19
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	60,74	60,74
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		74,30
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		74,30
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	74,30	74,30

SULAWESI TENGGARA

64,22/66,13 – Cukup

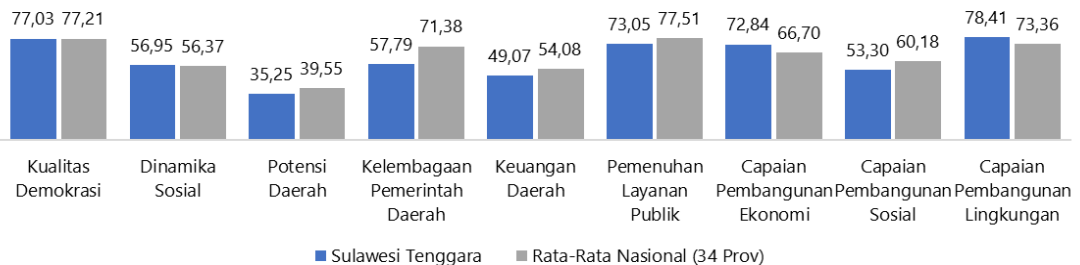
**Aspek
Sistem Pendukung
45,19/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
63,91/69,63**

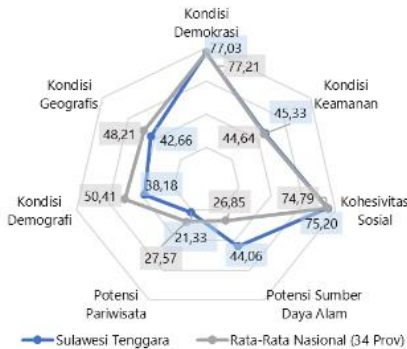
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
70,13/67,17**

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

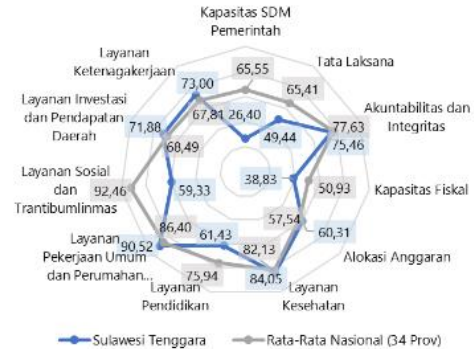
SKOR VARIABEL



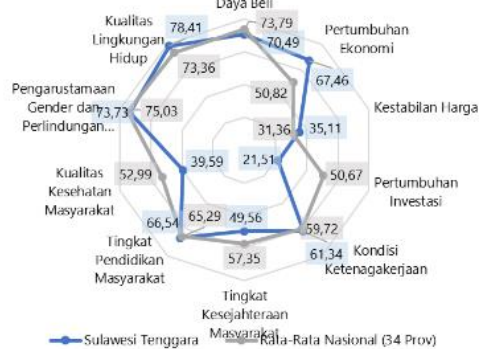
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Selain mengancarkan dukungan sumber daya alam, Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan pembangunan sektor pariwisata melalui: (1) memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan promosi dan perbaikan fasilitas pendukung, (2) pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata, (3) pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
- Perbaikan kualitas lingkungan melalui: (1) peningkatan alokasi anggaran sektor lingkungan (saat ini baru 0,25% dari APBD), (2) restorasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri ekstraktif.
- Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah melalui: (1) penerapan NSPK dalam manajemen ASN (2) mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik (3) mendorong pertumbuhan usaha di daerah untuk meningkatkan tax base sehingga terjadi peningkatan PAD dan kapasitas fiskal daerah.
- Peningkatan Pembangunan Ekonomi melalui: (1) mengendalikan kestabilan harga dan daya beli masyarakat,
- Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat melalui: (1) Peningkatan kompetensi dan jaminan tenaga kerja perlu dilakukan agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja. (2) meningkatkan angka partisipasi sekolah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		64,22
1	Sistem Pendukung		45,19
1.1	Kualitas Demokrasi		77,03
1.1.1	Kondisi Demokrasi		77,03
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	77,03	77,03
1.2	Dinamika Sosial		56,95
1.2.1	Kondisi Keamanan		45,33
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	279,00	44,09
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	5024,00	46,57
1.2.2	Kohesivitas Sosial		75,20
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	75,49	75,49
1.2.2.2	Modal Sosial	74,90	74,90
1.3	Potensi Daerah		35,25
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		44,06
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	10,54	44,06
1.3.2	Potensi Pariwisata		21,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,28	21,33
1.3.3	Kondisi Demografi		38,18
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	49,05	19,68
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	56,67	56,67
1.3.4	Kondisi Geografis		42,66
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	98,20	56,01
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	153,08	29,32
2	Kapasitas Pemerintahan		63,91
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		57,79
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		26,40
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	5,31
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	47,50	47,50
2.1.2	Tata Laksana		49,44
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	56,48	56,48
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,59	39,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	77,54	77,54
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	41,38	22,13
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,46
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	69,24	69,24
2.2	Kuangan Daerah		49,07
2.2.1	Kapasitas Fiskal		38,83
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,52	38,02
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,36	39,63
2.2.2	Alokasi Anggaran		60,31
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,64	98,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	90,39	52,35
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	26,66	81,38
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,25	12,10
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		73,05
2.3.1	Layanan Kesehatan		84,05
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	68,10	68,10
2.3.2	Layanan Pendidikan		61,43
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	55,33	55,33
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	67,53	67,53

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		90,52
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	95,00	95,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	99,29	99,29
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,74	73,91
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		59,33
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	21,14	21,14
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	97,53	97,53
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		71,88
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	3,38	67,60
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	5,57	76,17
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,00
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,65	96,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	6,10	40,67
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	3,00	29,97
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	8,78	87,78
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,69	86,88
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		70,13
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		72,84
3.1.1	Daya Beli		70,49
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,70	70,49
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		67,46
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,35	67,46
3.1.3	Kestabilan Harga		35,11
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,58	35,11
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		21,51
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	1,79	31,11
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-95,83	11,90
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		61,34
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,68	66,81
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	8,50	56,64
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,05	60,53
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		53,30
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		49,56
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	11,43	46,26
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,96	49,74
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,48	51,52
3.2.1.4	Gini Ratio	0,37	25,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	8,81	71,29
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		66,54
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,69	69,09
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	64,00	64,00
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		39,59
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,79	79,18
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	30,00	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		73,73
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	73,58	73,58
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	91,20	91,20
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	55,66	55,66
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		78,41
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		78,41
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	78,41	78,41

GORONTALO

61,87/66,13 – Cukup

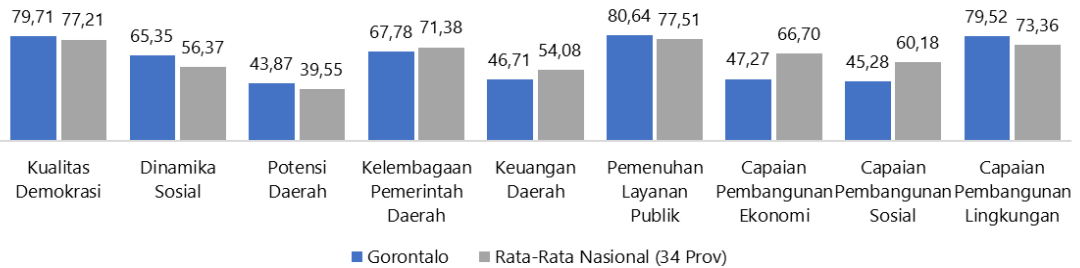
Aspek
Sistem Pendukung
53,01/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
68,75/69,63

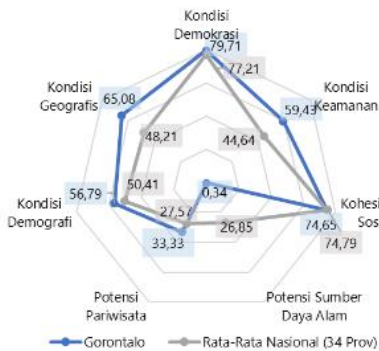
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
56,09/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

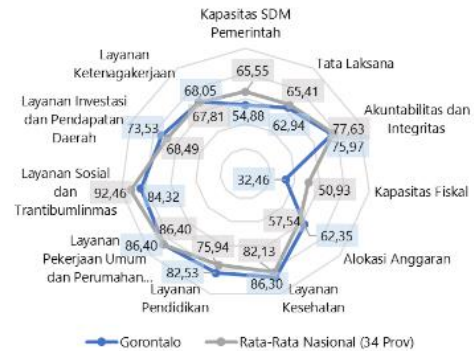
SKOR VARIABEL



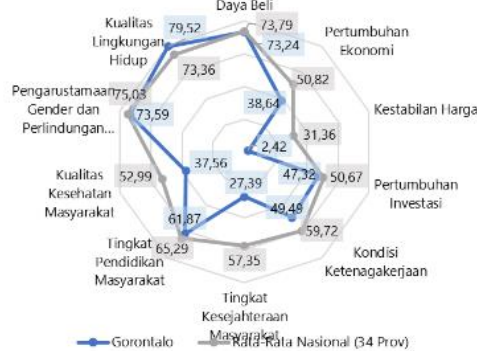
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Peningkatan Sistem Pendukung daerah melalui: (1) meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif seperti pariwisata berbasis potensi (2) koordinasi dengan Polri untuk meningkatkan keamanan (4) mengefektifkan FKUB untuk peningkatan kerukunan antar umat beragama, serta trantibumlinmas.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, melalui: (1) penerapan NSPK dalam manajemen ASN dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, (2) perbaikan sistem pelayanan publik untuk mencegah dan menurunkan tingkat korupsi (3) mendorong pertumbuhan kegiatan usaha formal untuk perluasan tax base dan peningkatan PAD, (4) peningkatan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum khususnya jaringan jalan provinsi.
- Penguatan Ekonomi Daerah melalui: (1) mengendalikan kestabilan harga dan daya beli masyarakat, (2) perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan investasi khususnya PMA melalui perbaikan kualitas infrastruktur dan pelayanan investasi, (3) Peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui: (1) mengatasi kemiskinan yang mencapai 15,15% dengan kedalaman kemiskinan 2,92 melalui program peningkatan produktivitas masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, (2) mempercepat penurunan angka stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI GORONTALO

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		61,87
1	Sistem Pendukung		53,01
1.1	Kualitas Demokrasi		79,71
1.1.1	Kondisi Demokrasi		79,71
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	79,71	79,71
1.2	Dinamika Sosial		65,35
1.2.1	Kondisi Keamanan		59,43
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	314,00	37,07
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	8823,00	81,78
1.2.2	Kohesivitas Sosial		74,65
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	73,25	73,25
1.2.2.2	Modal Sosial	76,05	76,05
1.3	Potensi Daerah		43,87
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,34
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,08	0,34
1.3.2	Potensi Pariwisata		33,33
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	3,00	33,33
1.3.3	Kondisi Demografi		56,79
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	43,64	55,75
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	57,83	57,83
1.3.4	Kondisi Geografis		65,08
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	95,99	61,92
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	116,71	68,24
2	Kapasitas Pemerintahan		68,75
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		67,78
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		54,88
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	32,25
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		62,94
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,36	83,36
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	3,22	55,50
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	74,50	74,50
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	66,82	35,73
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,97
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	70,78	70,78
2.2	Kuangan Daerah		46,71
2.2.1	Kapasitas Fiskal		32,46
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,42	35,09
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,27	29,83
2.2.2	Alokasi Anggaran		62,35
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	15,00	75,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	91,80	59,35
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	11,80	33,72
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,69	82,77
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		80,64
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,30
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	72,60	72,60
2.3.2	Layanan Pendidikan		82,53
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	94,67	94,67
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	70,39	70,39

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI GORONTALO

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		86,40
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	93,57	93,57
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,60	60,10
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		84,32
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	70,30	70,30
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	98,33	98,33
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		73,53
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	4,27	85,40
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,70	61,67
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		68,05
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	9,35	93,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	8,90	59,35
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	1,05	10,50
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	8,44	84,44
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,49	64,85
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		56,09
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		47,27
3.1.1	Daya Beli		73,24
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,73	73,24
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		38,64
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,50	38,64
3.1.3	Kestabilan Harga		2,42
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	3,88	2,42
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		47,32
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	71,88	94,65
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-204,06	0,00
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		49,49
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,87	68,71
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,80	52,01
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,66	26,64
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		45,28
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		27,39
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	15,15	28,77
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,92	25,13
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,74	25,25
3.2.1.4	Gini Ratio	0,42	16,60
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,46	98,51
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		61,87
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,64	63,56
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	60,18	60,18
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		37,56
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,75	75,12
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	26,80	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		73,59
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	71,11	71,11
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	88,25	88,25
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	60,46	60,46
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		79,52
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		79,52
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	79,52	79,52

SULAWESI BARAT

64,77/66,13 – Cukup

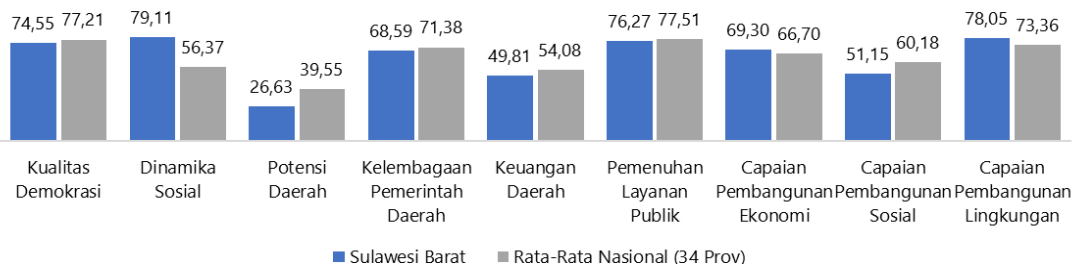
Aspek
Sistem Pendukung
43,86/47,93

Aspek
Kapasitas Pemerintahan
67,28/69,63

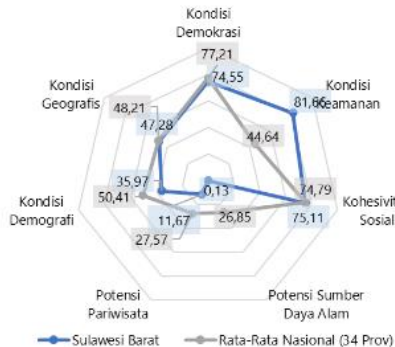
Aspek
Cap. Pembangunan Daerah
67,80/67,17

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

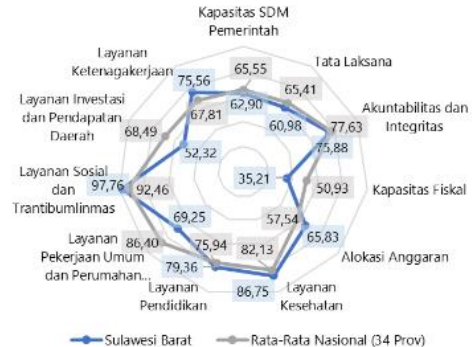
SKOR VARIABEL



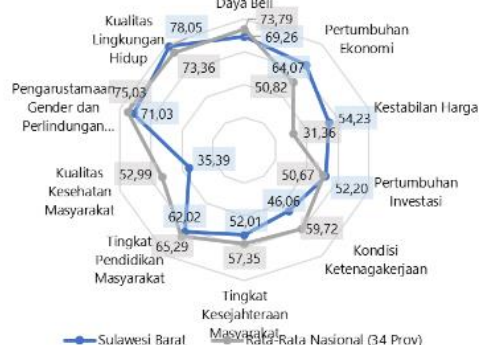
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Karena potensi SDA kurang, maka Sulawesi Barat harus fokus pada pengembangan ekonomi buatan seperti pariwisata dan ekonomi kreatif pendukung, dengan: (1) koordinasi dengan Polri dalam upaya meningkatkan iklim yang kondusif yaitu meningkatkan keamanan, (2) peningkatan alokasi belanja modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur (jalan provinsi) untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah.
- Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan, melalui: (1) memanfaatkan teknologi informasi (e-government) dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien, (2) meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan melalui penerapan NSPK dalam manajemen ASN, (3) peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan tax base untuk peningkatan PAD; (4) Perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
- Perbaikan Perekonomian melalui: (1) peningkatan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan penduduk miskin (2) Peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja
- Kesejahteraan Masyarakat melalui: (1) fokus pada pembangunan ekonomi pedesaan untuk mengatasi kesenjangan antar masyarakat; (2) program penurunan angka stunting secara sistematis dan berkelanjutan; (3) pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		64,77
1	Sistem Pendukung		43,86
1.1	Kualitas Demokrasi		74,55
1.1.1	Kondisi Demokrasi		74,55
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	74,55	74,55
1.2	Dinamika Sosial		79,11
1.2.1	Kondisi Keamanan		81,66
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	183,00	63,33
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	11771,00	100,00
1.2.2	Kohesivitas Sosial		75,11
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	75,34	75,34
1.2.2.2	Modal Sosial	74,88	74,88
1.3	Potensi Daerah		26,63
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		0,13
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	0,03	0,13
1.3.2	Potensi Pariwisata		11,67
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	1,70	11,67
1.3.3	Kondisi Demografi		35,97
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	49,53	16,45
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	55,50	55,50
1.3.4	Kondisi Geografis		47,28
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	91,94	72,74
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	160,08	21,82
2	Kapasitas Pemerintahan		67,28
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		68,59
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		62,90
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	48,31
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	77,50	77,50
2.1.2	Tata Laksana		60,98
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	81,12	81,12
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,89	47,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	89,91	89,91
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	41,60	22,25
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		75,88
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	70,49	70,49
2.2	Kuangan Daerah		49,81
2.2.1	Kapasitas Fiskal		35,21
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,78	46,16
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,22	24,27
2.2.2	Alokasi Anggaran		65,83
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	20,00	100,00
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	96,61	83,19
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	20,81	62,63
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,39	18,90
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		76,27
2.3.1	Layanan Kesehatan		86,75
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	73,50	73,50
2.3.2	Layanan Pendidikan		79,36
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	96,00	96,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	62,73	62,73

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI SULAWESI BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		69,25
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	60,00	60,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,41	41,37
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		97,76
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	100,00	100,00
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	95,51	95,51
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		52,32
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,44	48,80
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,35	55,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		75,56
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,42	84,17
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	11,11	74,09
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,87	28,69
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,59	95,87
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,51	75,12
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		67,80
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		69,30
3.1.1	Daya Beli		69,26
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,69	69,26
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		64,07
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25	64,07
3.1.3	Kestabilan Harga		54,23
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	1,82	54,23
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		52,20
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	34,69	60,94
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-16,53	43,46
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		46,06
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,62	66,19
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	5,77	38,48
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,29	32,86
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		51,15
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		52,01
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	11,49	45,98
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,80	53,85
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,42	57,58
3.2.1.4	Gini Ratio	0,35	29,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	25,04	18,35
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		62,02
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,63	62,88
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	61,17	61,17
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		35,39
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,71	70,78
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	30,40	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		71,03
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	66,93	66,93
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	90,25	90,25
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	54,53	54,53
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		78,05
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		78,05
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	78,05	78,05

MALUKU

59,26/66,13 – Cukup

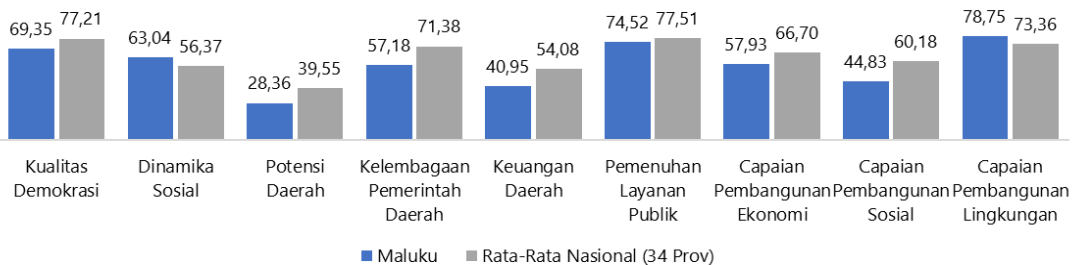
**Aspek
Sistem Pendukung
40,94/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
62,22/69,63**

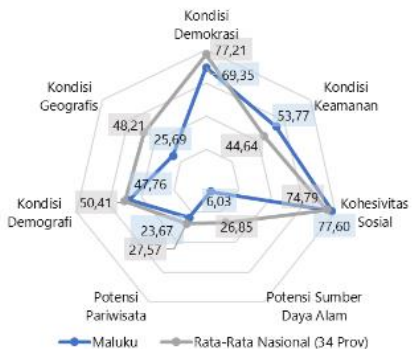
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
61,01/67,17**

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

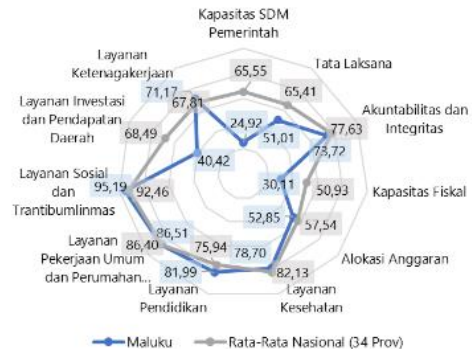
SKOR VARIABEL



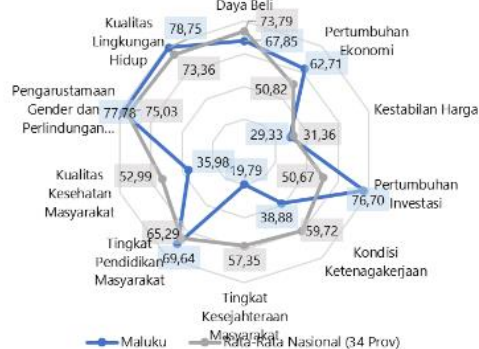
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Maluku kurang memiliki dukungan Sumber Daya Alam sektor ekstraktif (pertambangan), namun memiliki potensi Pariwisata yang cukup besar tetapi belum optimal dikembangkan. Dapat dikembangkan melalui: (1) meningkatkan konektivitas daerah melalui membangun infrastuktur perhubungan antar pulau.
- Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan melalui: (1) Perencanaan kebutuhan ASN secara obyektif dan penerapan NSPK dalam manajemen ASN (2) mendorong inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, (3) peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memperluas local tax based dan mendorong pertumbuhan sektor kegiatan ekonomi produktif yang masuk dalam sektor formal.
- Peningkatan performa ekonomi daerah dilakukan dengan: (1) meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi dan pengendalian harga untuk mendorong investasi baik PMDN maupun PMA agar terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat, (2) program peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui: (1) pembangunan sarana kesehatan, dan program yang mengarah pada penurunan prevalensi stunting yang sangat tinggi yaitu 28,4%, (2) Peningkatan pelayanan publik terutama sarana pendidikan untuk kualitas pendidikan anak usia sekolah.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI MALUKU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		59,26
1	Sistem Pendukung		40,94
1.1	Kualitas Demokrasi		69,35
1.1.1	Kondisi Demokrasi		69,35
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	69,35	69,35
1.2	Dinamika Sosial		63,04
1.2.1	Kondisi Keamanan		53,77
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	270,00	45,89
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	6651,00	61,65
1.2.2	Kohesivitas Sosial		77,60
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	77,46	77,46
1.2.2.2	Modal Sosial	77,73	77,73
1.3	Potensi Daerah		28,36
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		6,03
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	1,44	6,03
1.3.2	Potensi Pariwisata		23,67
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,42	23,67
1.3.3	Kondisi Demografi		47,76
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,82	41,18
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	54,33	54,33
1.3.4	Kondisi Geografis		25,69
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	108,12	29,50
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	160,03	21,88
2	Kapasitas Pemerintahan		62,22
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		57,18
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		24,92
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,01	2,34
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	47,50	47,50
2.1.2	Tata Laksana		51,01
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	54,03	54,03
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,23	30,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	72,00	72,00
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	84,84	45,37
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		73,72
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	64,01	64,01
2.2	Kuangan Daerah		40,95
2.2.1	Kapasitas Fiskal		30,11
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,50	37,44
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,21	22,79
2.2.2	Alokasi Anggaran		52,85
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	14,64	73,22
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	94,46	72,53
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	16,22	47,89
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,37	18,10
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		74,52
2.3.1	Layanan Kesehatan		78,70
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	100,00	100,00
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	57,40	57,40
2.3.2	Layanan Pendidikan		81,99
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	100,00	100,00
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	63,97	63,97

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI MALUKU

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		86,51
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	100,00	100,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,52	52,49
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		95,19
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	97,01	97,01
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	93,38	93,38
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		40,42
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	1,05	21,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,59	59,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		71,17
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,25	82,50
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	7,69	51,23
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,46	24,56
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,28	92,78
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,10	80,96
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		61,01
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		57,93
3.1.1	Daya Beli		67,85
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,68	67,85
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		62,71
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,21	62,71
3.1.3	Kestabilan Harga		29,33
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,81	29,33
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		76,70
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	67,92	91,05
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	30,91	62,34
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		38,88
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	5,19	51,86
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	7,28	48,56
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,51	15,06
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		44,83
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		19,79
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	16,42	22,80
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,08	21,03
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,86	13,13
3.2.1.4	Gini Ratio	0,29	42,40
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	21,50	29,90
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		69,64
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,73	73,11
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	66,16	66,16
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		35,98
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,72	71,97
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	28,40	0,00
3.2.4	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		77,78
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	78,09	78,09
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	93,51	93,51
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	61,12	61,12
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		78,75
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		78,75
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	78,75	78,75

MALUKU UTARA

63,03/66,13 – Cukup

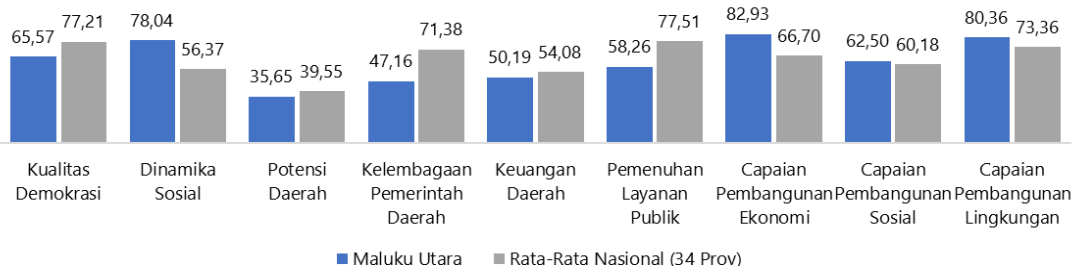
**Aspek
Sistem Pendukung
48,44/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
54,48/69,63**

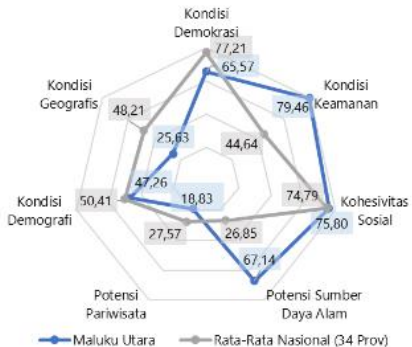
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
77,68/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

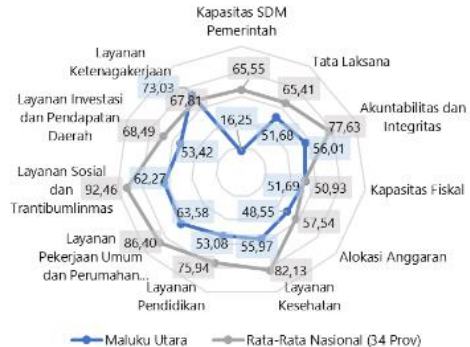
SKOR VARIABEL



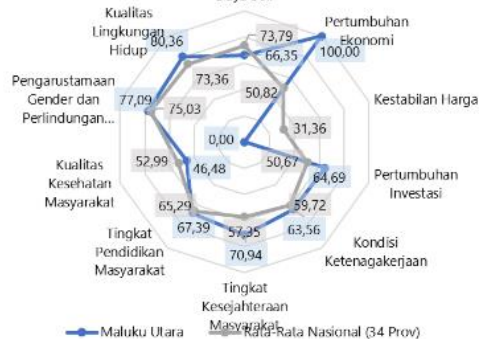
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Peningkatan Sistem Lingkungan Pendukung Maluku Utara dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dukungan Sumber Daya Alam yang sangat memadai, dan potensi Pariwisata yang cukup besar namun untuk belum optimal dikembangkan.
- Mengembangkan Sektor Pariwisata dengan: (1) meningkatkan konektivitas daerah melalui membangun infrastruktur perhubungan antar pulau, yang didukung dengan kualitas jalan darat yang memadai (2) Menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata secara khusus dan yang siap masuk pada sektor formal secara umum.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah melalui: (1) Perencanaan kebutuhan SDM ASN serta penerapan NSPK dalam manajemen SDM ASN, (2) Peningkatan penerapan e-government dalam pelayanan perintah daerah, (3) Meningkatkan kemandirian fiskal melalui penerimaan asli dari potensi daerah sekaligus perbaikan sistem pengelolaan penerimaan daerah, (4) Meningkatkan SPM di bidang pekerjaan umum (pembangunan infrastruktur).
- Peningkatan performa Ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, melalui: (1) dari sisi pelayanan maupun jaminan keamanan sosial, (2) menjadi fasilitator dalam hubungan industrial yang lebih baik serta menciptakan kenyamanan lingkungan kerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (1) melalui pembangunan sarana kesehatan, dan (2) Program yang mengarah pada penurunan prevalensi stunting.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI MALUKU UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		63,03
1	Sistem Pendukung		48,44
1.1	Kualitas Demokrasi		65,57
1.1.1	Kondisi Demokrasi		65,57
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	65,57	65,57
1.2	Dinamika Sosial		78,04
1.2.1	Kondisi Keamanan		79,46
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	205,00	58,92
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	13511,00	100,00
1.2.2	Kohesivitas Sosial		75,80
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	75,79	75,79
1.2.2.2	Modal Sosial	75,81	75,81
1.3	Potensi Daerah		35,65
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		67,14
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	16,06	67,14
1.3.2	Potensi Pariwisata		18,83
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,13	18,83
1.3.3	Kondisi Demografi		47,26
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	46,65	35,68
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	58,83	58,83
1.3.4	Kondisi Geografis		25,63
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	112,70	17,26
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	148,71	33,99
2	Kapasitas Pemerintahan		54,48
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		47,16
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		16,25
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,02	0,00
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	32,50	32,50
2.1.2	Tata Laksana		51,68
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	52,77	52,77
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,49	37,25
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	64,38	64,38
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	95,63	51,14
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		56,01
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	2,00	50,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	60,90	60,90
2.2	Keuangan Daerah		50,19
2.2.1	Kapasitas Fiskal		51,69
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	2,74	75,37
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,25	28,01
2.2.2	Alokasi Anggaran		48,55
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	19,29	96,43
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	62,53	0,00
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	28,45	87,13
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,33	16,26
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		58,26
2.3.1	Layanan Kesehatan		55,97
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	51,73	51,73
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	60,20	60,20
2.3.2	Layanan Pendidikan		53,08
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	49,16	49,16
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	57,00	57,00

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI MALUKU UTARA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		63,58
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	95,00	95,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	41,43	41,43
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,51	50,84
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		62,27
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	68,81	68,81
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	55,72	55,72
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		53,42
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,60	52,00
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,29	54,83
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		73,03
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	8,70	87,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	7,80	51,99
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	2,56	25,60
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	9,25	92,48
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	8,61	86,14
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	100,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		77,68
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		82,93
3.1.1	Daya Beli		66,35
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,66	66,35
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		100,00
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	20,49	100,00
3.1.3	Kestabilan Harga		0,00
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	4,41	0,00
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		64,69
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	50,52	75,28
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	10,22	54,10
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		63,56
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,64	66,35
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	6,60	44,03
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8,11	81,12
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		62,50
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		70,94
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	6,46	69,63
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,08	72,31
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,23	76,77
3.2.1.4	Gini Ratio	0,30	40,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	46,39	0,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		67,39
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,69	69,03
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	65,75	65,75
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		46,48
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,76	75,55
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	23,60	17,42
3.2.4	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak		77,09
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	79,05	79,05
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	90,59	90,59
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	61,34	61,34
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		80,36
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		80,36
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	80,36	80,36

PAPUA

55,23/66,13 – Cukup

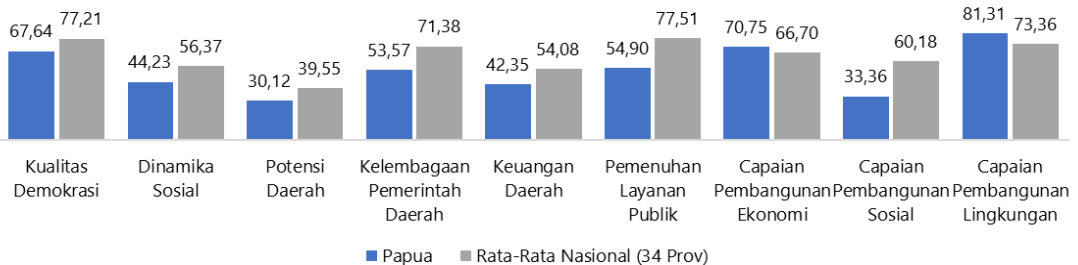
**Aspek
Sistem Pendukung
37,92/47,93**

**Aspek
Kapasitas Pemerintahan
50,91/69,63**

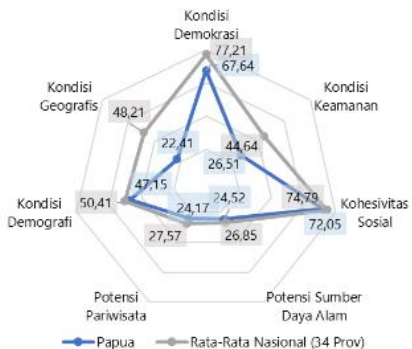
**Aspek
Cap. Pembangunan
Daerah
65,53/67,17**

Ket: Skor Provinsi/Rata-rata Nasional

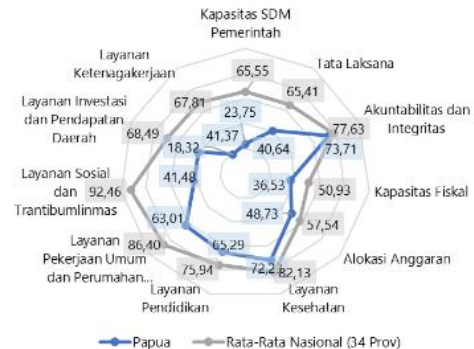
SKOR VARIABEL



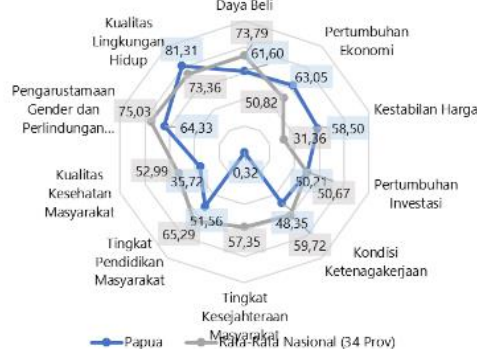
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Dari aspek Sistem Pendukung yang menjadi persoalan utama dari Papua adalah: (1) kondisi keamanan (2) tingkat demokrasi, dan (3) aksesibilitas dan konektivitas daerah, (4) dukungan SDM (kualitas dan ketersediaan).
- Untuk memperkuat system pendukung dengan: (1) Peningkatan komitmen perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan infrastuktur untuk membuka akses daerah-daerah terpencil dan mendukung kinerja ekonomi dan pemerintahan; (2)
- Penguatan Aspek Kapasitas Pemerintahan Daerah, melalui: (1) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan SDM di Bidang Pemerintahan; (2) peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM, (2) Perbaikan sistemik tata kelola perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas serta menghindari praktik koruptif.
- Perbaikan pelayanan publik terutama pada: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) sosial dan lainnya, melalui skema pengelolaan dana otsus yang efektif dan tepat sasaran.
- Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat secara menyeluruh dengan: (1) Peningkatan standar pelayanan publik di pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya melalui skema dana otonomi khusus yang tepat sasaran; (2) Program-program peningkatan kualitas dan produktivitas SDM lokal untuk siap masuk dalam kegiatan formal.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI PAPUA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		55,23
1	Sistem Pendukung		37,92
1.1	Kualitas Demokrasi		67,64
1.1.1	Kondisi Demokrasi		67,64
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	67,64	67,64
1.2	Dinamika Sosial		44,23
1.2.1	Kondisi Keamanan		26,51
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	338,00	32,26
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	2240,00	20,76
1.2.2	Kohesivitas Sosial		72,05
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	75,72	75,72
1.2.2.2	Modal Sosial	68,38	68,38
1.3	Potensi Daerah		30,12
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		24,52
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	5,87	24,52
1.3.2	Potensi Pariwisata		24,17
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,45	24,17
1.3.3	Kondisi Demografi		47,15
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	45,68	42,14
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	52,17	52,17
1.3.4	Kondisi Geografis		22,41
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	135,56	0,00
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	138,59	44,83
2	Kapasitas Pemerintahan		50,91
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		53,57
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		23,75
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,02	0,00
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	47,50	47,50
2.1.2	Tata Laksana		40,64
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	41,68	41,68
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	1,91	22,75
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	78,75	78,75
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	32,60	17,43
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		73,71
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	3,00	100,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	64,00	64,00
2.2	Keuangan Daerah		42,35
2.2.1	Kapasitas Fiskal		36,53
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	1,94	50,76
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,20	22,30
2.2.2	Alokasi Anggaran		48,73
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	7,14	35,72
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	85,51	28,16
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	14,88	43,61
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	1,79	87,78
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		54,90
2.3.1	Layanan Kesehatan		72,23
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	96,77	96,77
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	47,70	47,70
2.3.2	Layanan Pendidikan		65,29
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	83,01	83,01
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	47,57	47,57

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI PAPUA

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		63,01
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	87,50	87,50
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	40,71	40,71
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,59	59,33
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		41,48
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	54,12	54,12
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	28,85	28,85
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		41,37
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	1,22	24,40
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,50	58,33
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		18,32
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	0,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	0,00	0,00
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	0,00	0,00
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	2,41	24,06
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,37	93,70
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,00	0,00
3	Capaian Pembangunan Daerah		65,53
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		70,75
3.1.1	Daya Beli		61,60
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,62	61,60
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		63,05
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22	63,05
3.1.3	Kestabilan Harga		58,50
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	1,65	58,50
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		50,21
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	31,22	57,79
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	-18,63	42,62
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		48,35
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	7,74	77,38
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	4,17	27,77
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,94	39,43
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		33,36
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		0,32
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	26,03	0,00
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,25	0,00
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	2,15	0,00
3.2.1.4	Gini Ratio	0,39	22,80
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	56,75	0,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		51,56
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,55	54,81
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	48,32	48,32
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		35,72
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,71	71,45
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	28,60	0,00
3.2.4	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak		64,33
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	65,70	65,70
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	81,64	81,64
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	45,10	45,10
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		81,31
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		81,31
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	81,31	81,31

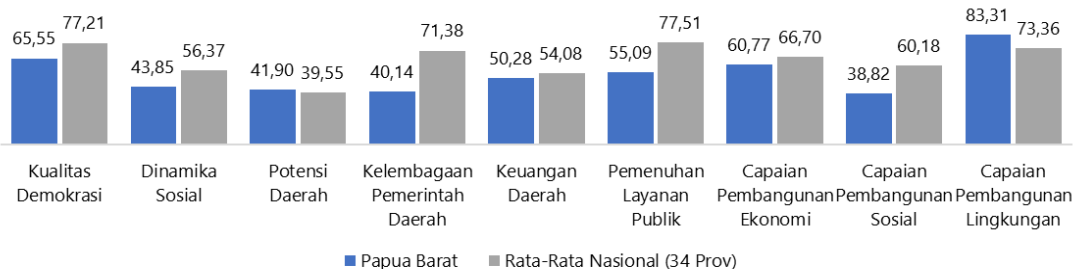
PAPUA BARAT

55,30/66,13 – Cukup

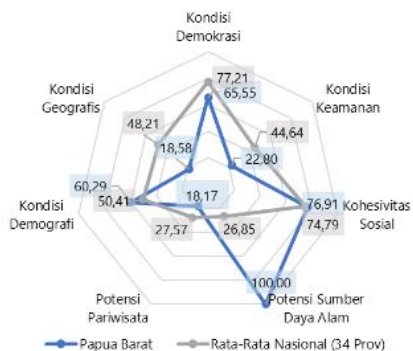
Aspek Sistem Pendukung 45,35/47,93	Aspek Kapasitas Pemerintahan 51,85/69,63	Aspek Cap. Pembangunan Daerah 62,39/67,17
---	---	--

Ket: **Skor Provinsi/Rata-rata Nasional**

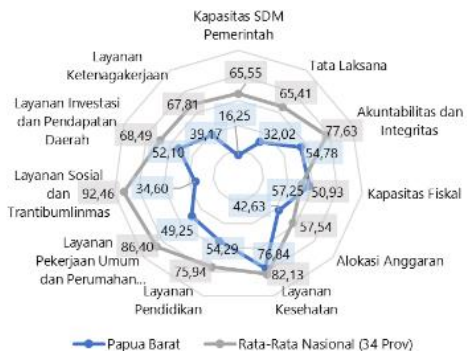
SKOR VARIABEL



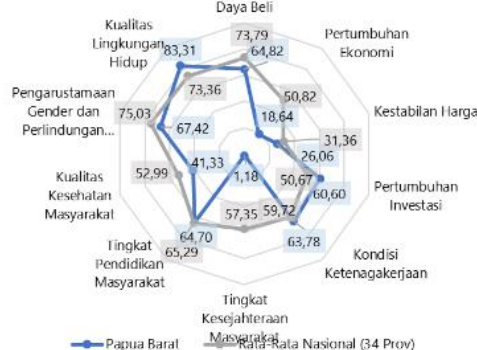
SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 1



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 2



SKOR SUBVARIABEL PADA ASPEK 3



ANALISIS DAN REKOMENDASI

- Perbaikan Aspek Sistem Pendukung khususnya: (1) Meningkatkan koordinasi dengan Polri serta pendekatan sosio kultural untuk menciptakan keamanan daerah, (2) Pembangunan infrastruktur untuk membuka akses daerah-daerah terpencil dan mendukung kinerja ekonomi dan pemerintahan.
- Pengembangan Potensi Pariwisata di cukup tinggi melalui: (1) pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap masuk dalam sektor jasa (pariwisata).
- Peningkatan Aspek Kapasitas Pemerintahan Daerah antara lain: (1) Perencanaan kebutuhan ASN dengan penerapan NSPK dalam manajemen SDM ASN, (2) Peningkatan etos kerja SDM ASN, (3) Perbaikan tata kelola keuangan daerah dan sistem akuntabilitas dalam rangka peningkatan efektivitas anggaran dan pemberantasan korupsi.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pemerintahan melalui: (1) Memperkuat penerapan e-government; (2) Mendorong inovasi daerah; (3) Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa; (4) Upaya sistematis dan sosiologis dalam pemberantasan korupsi.
- Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat secara menyeluruh dengan: (1) Peningkatan standar pelayanan publik di pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya melalui skema dana otonomi khusus yang tepat sasaran; (2) Program-program peningkatan kualitas dan produktivitas SDM lokal untuk siap masuk dalam kegiatan formal.

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI PAPUA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
0	ITKPD		55,30
1	Sistem Pendukung		45,35
1.1	Kualitas Demokrasi		65,55
1.1.1	Kondisi Demokrasi		65,55
1.1.1.1	Tingkat Perkembangan dan Penerapan Demokrasi	65,55	65,55
1.2	Dinamika Sosial		43,85
1.2.1	Kondisi Keamanan		22,80
1.2.1.1	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	532,00	0,00
1.2.1.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan	4919,00	45,59
1.2.2	Kohesivitas Sosial		76,91
1.2.2.1	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	78,64	78,64
1.2.2.2	Modal Sosial	75,18	75,18
1.3	Potensi Daerah		41,90
1.3.1	Potensi Sumber Daya Alam		100,00
1.3.1.1	Rasio DBH SDA terhadap Pendapatan Daerah	49,12	100,00
1.3.2	Potensi Pariwisata		18,17
1.3.2.1	Potensi Pariwisata Daerah	2,09	18,17
1.3.3	Kondisi Demografi		60,29
1.3.3.1	Rasio Ketergantungan berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk	42,49	63,42
1.3.3.2	Tingkat Kemajuan Pembangunan Pemuda	57,17	57,17
1.3.4	Kondisi Geografis		18,58
1.3.4.1	Tingkat Kesulitan Geografis	124,26	0,00
1.3.4.2	Tingkat Resiko Bencana	145,76	37,15
2	Kapasitas Pemerintahan		51,85
2.1	Kelembagaan Pemerintah Daerah		40,14
2.1.1	Kapasitas SDM Pemerintah		16,25
2.1.1.1	Kesesuaian Rasio Ideal ASN dengan Penduduk	0,03	0,00
2.1.1.2	Tingkat Penerapan NSPK Manajemen ASN	32,50	32,50
2.1.2	Tata Laksana		32,02
2.1.2.1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	55,36	55,36
2.1.2.2	Tingkat Pemanfaatan TI dan K dalam Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan	2,28	32,00
2.1.2.3	Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	15,74	15,74
2.1.2.4	Tingkat inovasi daerah	43,08	23,04
2.1.3	Akuntabilitas dan Integritas		54,78
2.1.3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70,00	57,14
2.1.3.2	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	2,00	50,00
2.1.3.3	Tingkat Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	57,19	57,19
2.2	Keuangan Daerah		50,28
2.2.1	Kapasitas Fiskal		57,25
2.2.1.1	Kapasitas Fiskal Daerah	3,88	100,00
2.2.1.2	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	0,13	14,50
2.2.2	Alokasi Anggaran		42,63
2.2.2.1	Tingkat kesesuaian alokasi <i>mandatory spending</i> dan pemenuhan standar pelayanan minimal	18,57	92,86
2.2.2.2	Tingkat realisasi anggaran belanja	72,31	0,00
2.2.2.3	Alokasi belanja modal	21,35	64,35
2.2.2.4	Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup	0,39	18,99
2.3	Pemenuhan Layanan Publik		55,09
2.3.1	Layanan Kesehatan		76,84
2.3.1.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	97,58	97,58
2.3.1.2	Tingkat intervensi percepatan penurunan stunting terhadap rumah tangga 1000HPK	56,10	56,10
2.3.2	Layanan Pendidikan		54,29
2.3.2.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	44,29	44,29
2.3.2.2	Tingkat pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai penunjang budaya literasi masyarakat	64,29	64,29

DATA DAN SKOR INDIKATOR PROVINSI PAPUA BARAT

ID	SKOR INDEKS/ ASPEK/ VARIABEL/ SUB-VARIABEL/ INDIKATOR	DATA	SKOR
2.3.3	Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		49,25
2.3.3.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum	85,00	85,00
2.3.3.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat	17,86	17,86
2.3.3.3	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0,42	42,43
2.3.4	Layanan Sosial dan Trantibumlinmas		34,60
2.3.4.1	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial	1,93	1,93
2.3.4.2	Tingkat ketercapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas	67,26	67,26
2.3.5	Layanan Investasi dan Pendapatan Daerah		52,10
2.3.5.1	Tingkat kualitas pelayanan publik bidang investasi dan pendapatan daerah	2,71	54,20
2.3.5.2	Tingkat Persaingan Usaha	4,00	50,00
2.3.6	Layanan Ketenagakerjaan		39,17
2.3.6.1	Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	0,00
2.3.6.2	Kapasitas Pelatihan dan Kompetensi Kerja	0,00	0,00
2.3.6.3	Kondisi Hubungan Industrial	0,00	0,00
2.3.6.4	Kondisi Lingkungan Kerja	5,63	56,32
2.3.6.5	Proporsi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00	100,00
2.3.6.6	Tingkat Partisipasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,23	92,26
3	Capaian Pembangunan Daerah		62,39
3.1	Capaian Pembangunan Ekonomi		60,77
3.1.1	Daya Beli		64,82
3.1.1.1	Angka pengeluaran rill per kapita pertahun yang disesuaikan	0,65	64,82
3.1.2	Pertumbuhan Ekonomi		18,64
3.1.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,91	18,64
3.1.3	Kestabilan Harga		26,06
3.1.3.1	Tingkat Inflasi	2,94	26,06
3.1.4	Pertumbuhan Investasi		60,60
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Investasi Dalam Negeri	27,99	54,86
3.1.4.2	Laju Pertumbuhan Investasi Asing	41,00	66,35
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan		63,78
3.1.5.1	Tingkat Pengangguran	6,34	63,38
3.1.5.2	Tingkat Kesempatan Kerja	10,17	67,78
3.1.5.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,00	60,00
3.2	Capaian Pembangunan Sosial		38,82
3.2.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		1,18
3.2.1.1	Proporsi Penduduk Miskin	20,49	3,67
3.2.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	4,94	0,00
3.2.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,71	0,00
3.2.1.4	Gini Ratio	0,37	26,00
3.2.1.5	Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	86,91	0,00
3.2.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat		64,70
3.2.2.1	Tingkat respresentasi masyarakat dalam mengkases pendidikan formal	0,63	63,49
3.2.2.2	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat	65,92	65,92
3.2.3	Kualitas Kesehatan Masyarakat		41,33
3.2.3.1	Umur Harapan Hidup	0,72	71,98
3.2.3.2	Angka Prevalensi Stunting	24,80	10,67
3.2.4	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak		67,42
3.2.4.1	Tingkat partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.	62,42	62,42
3.2.4.2	Tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki	84,18	84,18
3.2.4.3	Tingkat pembangunan perlindungan anak	54,27	54,27
3.3	Capaian Pembangunan Lingkungan		83,31
3.3.1	Kualitas Lingkungan Hidup		83,31
3.3.1.1	Kualitas lingkungan hidup	83,31	83,31

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam hal tugas dan wewenang yang harus diemban oleh pemerintah daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan terkait dengan alokasi sumber dayanya. Pelimpahan kewenangan tersebut perlu diiringi dengan kemampuan dan kapasitas daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya.

Laporan ini telah menguraikan bagaimana ITKPD digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola dan capaian pembangunan daerah, serta bagaimana hal ini dapat membantu dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Melalui serangkaian perhitungan dan analisis yang cermat, kita melihat berbagai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kualitas tata kelola dan capaian pembangunan beragam di setiap wilayah, dan hasil ini memberikan pandangan yang jelas tentang sejauh mana tantangan dapat diidentifikasi dan diatasi. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam menunjukkan performa kualitas tata kelola, sementara yang lain masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Satu hal yang jelas dari analisis ini adalah variabilitas yang signifikan antar daerah. Variabilitas ini mencakup kualitas sistem pendukung, kapasitas pemerintahan, dan capaian pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang seragam tidak selalu efektif, dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah menjadi sangat penting. Temuan-temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk merancang strategi dan intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah kunci yang dihadapi provinsi di Indonesia.

Kesimpulan utama dari buku ini, meskipun ada tantangan yang signifikan, tetapi terdapat peluang untuk perbaikan di seluruh Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah, serta dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan capaian pembangunan, kita dapat merancang masa depan yang lebih baik bagi daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan intervensi yang efektif. Dengan kerjasama yang kuat dan pengalaman yang berbagi, kita dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang akan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan yang lebih tinggi.

ITKPD diharapkan dapat memberikan evaluasi, intervensi, arahan dan supervisi yang lebih tepat bagi pemerintah daerah. Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga, terutama yang berkaitan dengan berbagipakai data yang menjadi indikator ITKPD serta pemanfaatan hasil dan tindak lanjut atas analisis rekomendasi Penilaian ITKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Faguet, Jean Paul. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Osborne, S. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>.
- Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Tim Penyusun

Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)
Kementerian Dalam Negeri